



Rp75.000,-

AIRLANGGA MUNDUR, BAHLIL MAJU, JOKOWI MENANG

97 PEMDA
TERLAMBAT
CAIRKAN
ANGGARAN
PILKADA

HEAD TO
HEAD HDCU
VS MATAHATI
DI PILKADA
SUMSEL

PANGGUNG
PILWAKOT
PALEMBANG
MASIH
MENUNGGU
RATU DEWA

PANAS PILKADA
JATENG,
PERTARUNAGAN
JENDERAL VS
JENDERAL

RAPBN 2025
BERKUTAT
DENGAN
MIDDLE
INCOME TRAP

KONTRIBUSI
EKONOMI
KREATIF
MAKIN
KOMPETITIF

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786

COMING
SOON

• iNOVASI UNTUK NEGERI •
info indonesia
AWARD 2024



**DARI
SUMSEL
UNTUK
INDONESIA
EMAS**

21 AGUSTUS 2024

EDISI
BULAN
AGUSTUS
2024

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Di masa lalu, pada Abad XI, Airlangga menduduki tahta Kerajaan Medang Kahuripan, di wilayah Jawa Timur. Pada masa kini, Abad XXI, Airlangga, menduduki jabatan Menko Perekonomian Indonesia dan Ketua Umum Partai Golkar. Di masa kini, Airlangga Hartarto memilih mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.



22

INFO SUMSEL

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dinilai cukup stabil dalam menghadapi perekonomian global dan nasional. Kondisi yang terjaga dan solid membuat Sumatera Selatan mendapat berbagai apresiasi.



36

INFO KALTIM

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar rapat koordinasi semua kementerian di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dilaksanakan rutin setiap minggu.



38

INFO PROFIL

Perjuangan dari bawah ditempuh Pua-di sebagai salah satu bagian dari penyelenggara pemilihan umum di Tanah Air. Memulai karir sebagai guru, kini ia duduk sebagai salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.



56

INFO PILKADA

Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) kian “memanas”, perebutan kursi orang nomor satu tersebut melibatkan dua jenderal besar.



76

INFO MUBA

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menunjukkan prestasinya dalam pengendalian inflasi daerah. Keberhasilan ini diapresiasi dengan meraih penghargaan insentif fiskal sebesar Rp 5,6 miliar untuk kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama.



87

INFO KHUSUS

Setiap 16 Agustus, sehari menjelang peringatan ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia, Presiden menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Kali ini Presiden Joko Widodo menyampaikannya untuk terakhir kali, karena pada 2025, kepala pemerintahan sudah berganti.



3 DARI REDAKSI

20 OPINI

32 INFO PALEMBANG

34 INFO KALTARA

78 INFO EKONOMI

82 INFO ISTANA

86 KAJI

48

INFO PROFIL

Bakal calon Wakil Wali Kota (Bacawawako) Palembang Pilkada 2024, Ir H Baharudin MM adalah aktivis 98 sejak kuliah sengaja terjun ke dunia politik agar bisa menjadi pemimpin yang mampu mensejahterakan umat.

79

Ya, pada 17 Agustus 2024, kita memperingati 79 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah negara-bangsa yang sudah mengumandangkan Indonesia Emas pada 2045.

Beriringan dengan peringatan HUT ke-79 kemerdekaan, perjalanan kita berbangsa berada dalam periode transisi menuju suksesi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekitar sebulan setelah pelantikan Presiden --terjadwal pada 20 Oktober 2024, agenda selanjutnya adalah pemilihan kepala daerah serentak: gubernur tingkat provinsi, bupati kabupaten, dan wali kota untuk kota. Pelaksanaan Pilkada serentak terjadwal pada 27 November 2024. Itu agenda politik.

Nah, kaitan antara upaya mencapai Indonesia Emas dan agenda politik suksesi kepemimpinan nasional serta pemilihan para kepala daerah adalah momentum babak baru penyelenggaraan negara. Terutama jajaran penyelenggara negara di sisi eksekutif yang selama ini tampak paling dominan menentukan arahnya.

Pada sisi legislatif pun parlemen akan memulai momentum baru setelah pelantikan para anggota DPR, DPD, MPR, juga DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Di sisi yudikatif, khususnya penegakan hukum untuk menekan tingkat korupsi, seleksi para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas KPK masih berlangsung pada Agustus 2024. Media yang kerap dianggap sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga layak bercermin ulang demi mendukung upaya mencapai Indonesia Emas 2045.

Jad, kita pantas berharap momentum baru penyelenggaraan negara pada 2024 benar-benar menunjukkan kinerja di jalur yang selaras (*on the right track*) ke arah Indonesia Emas 2045, --pengertian ringkasnya adalah menjadi negara maju. Persoalannya, tak ada negara maju dengan tingkat korupsi memprihatinkan, menjengkelkan karena begitu sulit menekannya hingga ke titik terendah yang mungkin dicapai.

Memang sudah menjadi semacam dalil yang sulit ditolak bahwa kekuasaan cenderung korup (*power tends to corrupt*) sebagaimana sudah banyak dipahami di ranah politik. Namun, tingkat korupsi yang rendah toh dapat diupayakan.

Akhirnya, pada peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, kita, segenap komponen bangsa, sama-sama berada dalam momentum babak baru menuju Indonesia Emas. Semoga kita semua berada di jalur yang tepat saat menghadapi tantangan menjadi negara maju. Tantangannya, bangsa kita terjebak di tingkat penghasilan menengah (*middle income trap*). ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

● TELP 021-791 96781
● FAX 021-791 96786

Twitter : @InfoIndonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadhi, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



AIRLANGGA MUNDUR JOKOWI MAJU

Di masa lalu, pada Abad XI, Airlangga menduduki tahta Kerajaan Medang Kahuripan, di wilayah Jawa Timur. Pada masa kini, Abad XXI, Airlangga, menduduki jabatan Menko Perekonomian Indonesia dan Ketua Umum Partai Golkar. Di masa kini, Airlangga Hartarto memilih mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.



Toh Airlangga kini dan masa lalu memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Tapi jelas, Airlangga Hartarto bukanlah reinkarnasi Prabu Airlangga raja Medang Kahuripan. Begitu pula kisahnya di pentas politik terkait dengan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Ia tersenyum sambil mengangkat map hitam tadi saat ditanya tentang agenda pertemuan dengan Presiden. Pertemuan antara Airlangga dan Presiden berlangsung hampir dua jam.

Airlangga tiba di Istana sekitar pukul 14.00 dan keluar lagi menjelang pukul 16.00 WIB. Saat keluar itulah para jurnalis

Mengapa pertemuan berlangsung empat mata? Toh Airlangga tidak menanggapi pertanyaan itu. Terus saja ia saja menjelaskan soal update berbagai poin terkait perkembangan ekonomi kepada Presiden. Antara lain surplus perdagangan Indonesia dengan China yang mencapai delapan miliar dolar AS



Bahkan isyarat pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pun tak tampak pada Jumat petang, 9 Agustus 2024. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga masih menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta dengan menenteng, antara lain, map hitam.

menghujaninya dengan banyak pertanyaan. Airlangga pun tampak sudah menyiapkan catatan bahan pernyataannya.

Menko Perekonomian itu mengemukakan, pertemuan dengan Presiden Jokowi membahas perkembangan perekonomian terkini. "Update ekonomi tadi," ujarnya.

pada 2023.

"Ya pertama update ekonomi, saya sampaikan ke beliau Indonesia dengan China surplus tahun kemarin delapan billion. Tidak banyak negara yang bisa surplus dengan China sehingga kebijakan kita dan daya saing baik. Apalagi harga komoditas sudah turun juga,"

jelasan.

Airlangga juga menyampaikan dorongan agar Indonesia segera menyelesaikan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (EU CEPA) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). "Satu pilar diselesaikan, dua pilar kita sedang laku-



kan naskah akademik dan akan segera beliau tandatangani," ungkap Airlangga.

Selain itu, ia membenarkan bahwa Presiden meminta agar program Kartu Prakerja masuk dalam APBN 2025 dan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. "Ketiga tentu saya laporkan mengenai prakerja,

capaian-capaian baik. Ke depannya beliau (Presiden) minta itu masuk di dalam APBN 2025," sambungnya.

Toh para wartawan masih bertanya tentang soal di luar portofolio kementerian, terkait dengan persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2024, dan para ketua umum partai memiliki wewenang memilih figur untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah.

Keluarlah pertanyaan tentang siapa calon yang akan berpasangan dengan Ridwan Kamil, calon gubernur dari Partai Golkar, di Pilkada Jakarta 2024. Airlang-

"None of the above (bukan yang disebut tadi)," kata Airlangga menanggapi. Toh Airlangga juga menegaskan bahwa sosok tersebut belum pasti akan diusung sebagai pendamping Ridwan Kamil.

Airlangga masih menanggapi pertanyaan lain yang terkait dengan partainya. Antara lain soal manuver politik internal Partai Golkar untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Ia menegaskan, Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai jadwal pada Desember 2024.



ga menjawab, sosok tersebut memiliki inisial "S".

"(Cawagub RK) Sudah ada. Sementara inisialnya S," ungkap Airlangga.

Para wartawan lanjut bertanya, merenka "S" adalah politisi PKS (Ahmad Syaikhul atau Sohibul Iman).



Satu pilar diselesaikan, dua pilar kita sedang lakukan naskah akademik dan akan segera beliau tandatangani.

"Tidak ada, tidak ada (Munaslub). Munas bulan Desember," ujar.

Airlangga memastikan, internal partai tetap solid dan menegaskan bahwa isu Munaslub merupakan mekanisme internal partai, bukan dorongan dari luar.

"Munaslub kan itu adalah mekanisme internal. Jadi kalau internal, ya internal," katanya.

Muncul juga pertanyaan tentang adanya kemungkinan mengubah AD dan ART parpol dengan mengupayakan Munaslub, Airlangga pun menegaskan, "Munasnya masih bulan Desember," tandasnya.

Bagaimana dengan soal Pilkada? Kalangan media ada pula yang melaporkan sebenarnya Airlangga dan Jokowi pada Jumat petang itu membicarakannya juga. Airlangga dan Jokowi disebutkan membahas pula soal pilkada dan politik. Presiden Jokowi kemudian

mengemukakan informasi yang ia dengar dari pihak Prabowo bahwa Golkar tak sejalan terkait pilkada, khususnya pemilihan gubernur.

Sejalan atau tidak, di beberapa provinsi Partai Golkar dan Partai Gerindra belum sampai pada titik-temu dalam pencalonan gubernur menjelang Pilkada serentak yang terjadwal pada 27 November 2024. Pada sisi lain, waktu pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur semakin mendesak karena jadwalnya hanya beberapa hari, mulai 27 Agustus 2024.

Toh pada Jumat malam setelah bertemu Presiden Joko Widodo, Airlangga masih berkumpul dengan sejumlah elite

Namun, keesokan harinya, Sabtu, 10 Agustus 2024, Wakil Ketua Umum Partai Golkar lainnya, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang sedang berada di Pontianak, diminta kembali ke Jakarta dan berkumpul di Rumah Dinas Menko Perekonomian di Kompleks Widy Chandra, Jakarta Selatan pada Minggu pagi, 11 Agustus 2024.

"Kita pertama sangat terkejut dengan pengunduran diri Pak Airlangga... Kami tahunya pengunduran diri itu tadi malam," ungkap Doli

Menurut Doli keputusan itu diambil Airlangga setelah rapat bersama keluarga. "Jadi alasan yang sangat pribadi. Sebelum kami diundang, itu sudah ada ra-

duran diri Airlangga Hartarto melalui se-carik surat resmi. Di surat pengunduran diri itu, ia menyampaikan keputusan untuk meninggalkan posisi ketua umum hanya empat bulan sebelum masa jabatannya berakhir pada Desember 2024.

Meski tak ada alasan khusus yang disebutkan kecuali persoalan pribadi, permohonan itu dimaklumi oleh para pengurus Golkar. Antara lain yang duduk di Dewan Penasihat, Dewan Etik, dan Dewan Pakar. Terlebih, menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, ketua umum dapat berhenti dengan sejumlah alasan, salah satunya mengundurkan diri. Keua-



Partai Golkar di satu restoran, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hadir antara lain, Melchias Markus Mekeng, Rizal Mallarangeng, dan Bambang Soesatyo, yang merupakan Wakil Ketua Umum Golkar; Bendahara Umum Golkar Dito Ganinduto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Maman Abdurrahman, dan anggota Dewan Penasehat Golkar Jusuf Hamka.

Airlangga dan para tokoh yang berada di satu meja itu pun sempat menyampaikan jargon berulang sambil mengangkat tangan secara kompak. "Golkar, Munas Desember," ucap mereka sebagaimana terekam dalam video.

pat keluarga Pak Airlangga dengan istri tercinta, anak-anak, adik, segala macam. Dan keputusan pengunduran diri itu sudah dirapatkan dan menjadi keputusan keluarga," kata dia.

Oleh sebab itu, ia mengajak publik untuk menghormati keputusan Airlangga mengundurkan diri dari jabatan ketua umum Partai Golkar.

"Jadi saya mohon kita hormati keputusan Airlangga yang personal dan sangat pribadi dan kita tidak usah mengaitkan apa latar belakang dan seterusnya atau mengaitkan dengan siapa saja," kata Doli.

Rupanya pada Sabtu malam, elite Partai Golkar mengetahui ihwal pengun-

Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta, adalah salah satu yang menerima surat pengunduran diri Airlangga.

"Jadi, jika Pak Airlangga memilih mundur, itu menjadi haknya. Kami juga tidak bisa paksa untuk mengungkapkan alasannya. Pasti ada banyak faktor. Saya secara pribadi, menyayangkan karena tinggal beberapa bulan lagi. Tetapi, itu hal yang sangat mendesak sehingga beliau harus mengundurkan diri dan itu dibenarkan oleh AD/ART partai," kata Ketua Dewan Etik Golkar, Mohammad Hatta, Minggu, 11 Agustus 2024.

Nah, pada Minggu pagi itu, Airlangga pun mengumumkan pengunduran di-

rinya secara lebih luas. "Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat," ujar Airlangga dalam pernyataan yang rekaman video, Minggu, 11 Agustus 2024.

"Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," tandasnya.

Setelah video itu beredar, sejumlah elite Golkar mendatangi Airlangga di rumah dinas pada Minggu siang.

rapat kabinet besok di IKN (Ibu Kota Nusantara)," ujar Doli menjelaskan tujuan kepergian Airlangga.

Apapun, kepergian Airlangga dari posisi Ketua Umum Partai Golkar akan berdampak pada ranah politik domestik, dalam negeri. Paling tidak, pengunduran diri itu menjadi kejutan dan memerlukan antisipasi lebih lanjut.

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meraih kursi terbanyak di parlemen DPR RI pada Pemilu 2024 misalnya, mengakui kejutan itu. "Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Doktor Megawati Soekarnoputri terkait dengan dinamika politik nasional,

khususnya yang sangat mengejutkan bagi kami adalah berita mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Minggu, 11 Agustus 2024.

Hasto lantas menyebut bahwa Airlangga adalah sosok komunikator yang baik. Airlangga juga dinilai merupakan sosok yang mampu membangun kerja sama politik yang baik dengan partai lain. "Di dalam Pilkada kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo Hanura dan juga Partai Amanat Nasional," ungkap Hasto.

"Sehingga hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka



Beberapa antaranya merupakan tokoh yang juga hadir dalam pertemuan Jumat malam di Menteng, yakni Maman, Dito, dan Rizal. Selain itu, ada pula Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Erwin Aksa, serta Ketua DPP Golkar Meutya Hafid.

Selain para elite, siang itu anggota keluarga Airlangga, antara lain istrinya, Yanti K Isfandiary, mengantarkan Airlangga meninggalkan rumah. "Besok mau rapat kabinet. Nanti malam ada dinner (makan malam), Pak Presiden Jokowi mengundang semua anggota kabinet kalau tidak salah, juga dengan para gubernur. Jadi, persiapan untuk



Kita pertama sangat terkejut dengan pengunduran diri Pak Airlangga... Kami tahunya pengunduran diri itu tadi malam.

Pilkada serentak dan muncul kejadian politik, dari kami suatu hal yang luar biasa, yang menyentuh aspek kedaulatan partai," ujarnya.

Nah, baik Airlangga raja Medang Kahuripan maupun Airlangga Hartarto merupakan figur politik penting dalam konfigurasi politik pada masanya. Bukan sekadar naik turun tahta, melainkan dampaknya untuk kelanjutan entitas politik bangsa pada babak-babak perjalanan selanjutnya.

Perkembangan berikutnya, Presiden Joko Widodo juga yang akan berada di tengah-tengah pusaran dinamika politik ini. Airlangga mundur, Jokowi maju •



AIRLANGGA MUNDUR MUNAS GOLKAR MAJU

Internal Partai Golkar terkejut dengan pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum. Dengan alasan itu, keputusan memilih Pelaksana Tugas berlangsung secara aklamasi. Musyawarah Nasional Partai Golkar juga bergeser dari jadwal semula.

Pengunduran diri Airlangga Hartarto memang banyak menyisakan tanda tanya. Selain itu, tentu saja mengejutkan. Jumat malam, 10 Agustus 2024 masih menegaskan Musyawarah Nasional Partai Golkar tetap berlangsung pada Desember sesuai dengan jadwal, toh Sabtu malam Airlangga sudah melayangkan surat pengunduran diri.

Entah apa yang terjadi antara Jumat malam dan Sabtu malam, yang jelas Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya secara luas pada Minggu, 11 Agustus 2024. Toh pengunduran dirinya sudah sah menurut aturan partai.

Nah, sepeeninggal Airlangga, sebagai partai politik besar yang paling banyak memenangi pemilihan legislatif sepanjang sejarah Republik, organisasi Partai

Golkar harus tetap berjalan untuk menjaga kesinambungan. Terlebih lagi banyak agenda yang memerlukan pengesahan dari Ketua Umum. Paling tidak, penetapan pasangan calon kepala daerah harus ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Sedangkan masa pendaftaran pasangan calon sudah kian dekat dan hanya berlangsung tiga hari pada 27-29 Agustus 2024.

Di titik itulah, pada Senin, 12 Agustus 2024, sehari setelah pengunduran diri Airlangga, salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Meutya Hafid, memastikan bahwa rapat pleno untuk memilih pelaksana tugas (Plt) ketua umum (Ketum) akan berlangsung pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Ia pun menyarankan agar pemilihan Plt Ketum tidak dilakukan dengan sistem

voting atau pemungutan suara. "Tidak perlu ada voting dalam pemilihan Plt Ketum pada rapat pleno yang rencana akan digelar pada Selasa, 13 Agustus 2024," ungkap Meutya dalam pernyataan resmi.

Meutya menyarankan para Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar agar duduk bersama dan bermusyawarah untuk menentukan sosok yang layak dijadikan Plt Ketum. Menurut Ketua Komisi I DPR yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara I itu, opsi bermusyawarah bertujuan untuk memastikan rapat pleno bisa berjalan dengan kondusif.

Alasannya, para kader partai masih terkejut pengunduran diri Airlangga



Menjaga soliditas amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat.

Hartarto. "Menyarankan para waketum (wakil ketua umum) untuk duduk bersama musyawarah mufakat untuk PLT Ketum, sehingga Pleno dapat berjalan kondusif. Kader masih terkaget-kaget dengan Keputusan Ketum, jangan dipaksa untuk voting," jelas Meutya.

Meutya pun mengingatkan agar seluruh kader maupun pengurus partai agar bersama-sama menjaga soliditas. Dia berharap pihak yang hendak mencalonkan diri sebagai Ketum, agar menggunakan cara-cara bermartabat. "Menjaga soliditas amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat," ujarnya.

Ternyata pemilihan Plt Ketum itu berlangsung dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Selasa malam. Meutya mengemukakan, Rapat Pleno itu pun akan memutuskan jadwal Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih Ketua Umum baru yang definitif. Bukan lagi Plt.

"Ada tiga agenda yang akan dibahas dalam rapat pleno ini yaitu pembacaan

surat pengunduran diri Airlangga. Kedua penentuan jadwal Rapimnas dan penentuan jadwal Munas, Malam ini insya Allah sudah ada keputusan," kata Meutya di gedung DPP Partai Golkar, Selasa, 13 Agustus 2024.

Menurut dia, jadwal Munas tersebut akan ditentukan langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar yang juga akan dipilih dalam rapat

damai, tertib dan cepat," kata Meutya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Hukum Adies Kadir menyebutkan, sejumlah nama mencuat menjadi ketua umum seperti Agus Gumiwang. "Tentu akan diputuskan dalam rapat pleno pemilihan plt ketua umum," ujarnya.

Sedangkan politisi Partai Golkar Riko Lesiangi menilai, empat nama kader internal, mulai dari Bambang Soesatyo



pleno. Meutya berharap rapat pleno bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang strategis untuk kemajuan Partai Golkar.

Menurut dia, rapat pleno akan dihadiri sekitar 300 orang dipimpin oleh Sekjen Partai Golkar. "Saya dan kami semua di DPP mohon doa teman-teman agar kita dapat menyelesaikan dan melakukan pergantian kepemimpinan secara

(Bamsoet), Ahmad Doli Kurnia, Ace Hasan Syadzily, hingga Agus Gumiwang, berpotensi menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. "Saya rasa saat ini yang telah melewati atau sesuai aturan, ya keempat itu," ujar Riko menjelang rapat pleno.

Meskipun keputusan rapat pleno tersebut hanya sementara di bawah keputusan

• INFO UTAMA

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas), kata Riko, hasilnya tetap kuat. "Yang pasti agenda pleno ini sudah sesuai dengan konstitusi partai," tuturnya.

Menurut dia, nya, siapapun sebenarnya bisa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Plt Ketum Partai Golkar, asalkan sudah lolos verifikasi persyaratan yang telah diberikan. Alasannya, sambung Riko, semua kader Golkar potensial dan mumpuni lantaran sudah berproses dari pengkaderan dan jabatan struktural di publik maupun di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat

Plt Ketum. Saya kenalkan dulu. Rapat pleno mengesahkan Plt Ketum yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita," ujar Ketua DPP Golkar Meutya Hafid dalam jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa, 13 Agustus 2024.

"Secara musyawarah dan mufakat saya diberikan amanah untuk memimpin partai Golkar sebagai Plt Ketum Golkar dan tugas utama saya sebagai Plt Ketum Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11," timpal Agus.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bam-

Menurut Bamsoet, nama ringkas Bambang Soesatyo, penunjukan Agus sebagai Plt Ketum Partai Golkar sangatlah tepat. Agus merupakan sosok yang mempunyai banyak pengalaman di dunia politik, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi, serta mampu memimpin Partai Golkar hingga memiliki ketua umum yang baru.

"Agus Gumiwang sahabat saya. Pengalamannya di dunia politik tidak perlu diragukan. Saat ini beliau merupakan salah satu kader Partai Golkar yang dipercaya duduk di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Perindustrian pe-



(DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sedangkan Agus Gumiwang yang menduduki jabatan Wakil Ketua Umum di bawah Airlangga akan menyerahkan keputusan siapa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar pada rapat pleno. "Pleno yang akan menentukan dan semua wakil ketua umum punya hak dan bisa menjadi Plt Ketum mengantarkan Munas," kata dia saat ditemui awak media sebelum rapat pleno di Kantor DPP.

Alhasil, memang Agus Gumiwang yang terpilih menjadi Plt Ketum Partai Golkar dalam rapat pleno itu. "Menunjuk

bang Soesatyo yang juga Ketua MPR RI mengapresiasi serta mendukung terpilihnya Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Plt Ketum Partai Golkar. "Dalam rapat pleno Partai Golkar, para pengurus sepakat secara aklamasi menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Sebelumnya, Sekjen membacakan surat pengunduran diri Airlangga dan rapat pleno memutuskan menerima pengunduran diri Airlangga," ujar Bamsoet usai menghadiri rapat pleno Partai Golkar di Jakarta, Selasa malam, 13 Agustus 2024.

riode 2019-2024. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga memberikan kepercayaan sebagai Menteri Sosial Menteri Sosial pada 24 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, rapat pleno Partai Golkar juga memutuskan akan menggelar Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar pada tanggal 20 Agustus 2024. Rapimnas dan Munas Partai Golkar untuk memilih ketua umum yang baru, akan dilaksanakan di Jakarta.

"Rapat pleno juga menyepakati akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Airlangga Hartarto pada saat peringatan HUT Partai Golkar Oktober 2024 mendatang. Penghargaan diberikan karena selama ini Airlangga berhasil membawa Partai Golkar menghadapi semua tantangan dan rintangan yang ada. Termasuk, mengawal Partai Golkar memperoleh kenaikan kursi di DPR RI menjadi 102 pada Pemilu 2024," ujar Bamsoet.

Sedangkan Agus mengatakan Partai Golkar di bawah kepemimpinannya akan semakin kompak dan solid dalam menjalankan beberapa agenda besar, salah satunya mendukung program-program kerakyatan pemerintah. "Partai Golkar menjaga komitmen untuk menyukseskan pemerintahan bapak Prabowo - Gibran menuju Indonesia maju," kata Agus.

Toh Agus Gumiwang mengatakan dirinya tidak akan mencalonkan jadi Ketua Umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional nanti. "Saya tidak (akan) maju," katanya kepada media yang mengerumuninya di Kantor DPP Partai Golkar.

Dia menegaskan hanya bertugas sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar untuk membawa dua agenda yakni penentuan jadwal Rapimnas dan Munas. Agus menambahkan, dua agenda itu, terutama munas, perlu digelar secepatnya. Alasannya, Partai Golkar dalam waktu dekat akan menghadapi agenda-agenda besar kenegaraan.

Menurut Agus, partainya memerlukan ketua umum yang definitif. Itu alasan mengapa Munas perlu segera berlangsung.

"Tanggal 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta," kata Agus.

Soal nama-nama yang disebutkan bakal menjadi Ketua Umum Golkar, salah satunya Bahlil Lahadalia, Agus menjawab semuanya akan diketahui jika Munas berlangsung. "Siapa yang akan jadi ketua umum, penentuan format organisasi akan ditentukan dalam Munas."

Toh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Dito Ariotedjo yang juga Menteri

Pemuda dan Olahraga mengungkapkan, belum mengetahui apakah bakal hanya ada calon tunggal ketua umum pada Munas mendatang. Meski begitu, ia mengaku telah mendengar aspirasi dari pengurus Golkar yang mengerucut pada nama Bahlil Lahadalia.

"Kita akan melihat bagaimana pastinya untuk munas, kan ada proses pendaftaran calon ketua umum. Nanti kita lihat bagaimana ada yang daftar atau tidak, nanti akan ditentukan dalam forum

dari kalangan pengurus. "Ya, pernah jadi pengurus yang siap secara riil, secara sah, pernah jadi pengurus pusat, maupun daerah, itu bisa diterima menjadi ketua umum. Walaupun tidak otomatis, tapi itu persyaratan," kata Agung, Senin, 12 Agustus 2024.

Menurut Agung Laksono, Bahlil bukan pengurus Partai Golkar di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, jika Bahlil maju pencalonan Ketum Golkar, maka berpotensi gugur. "Jadi kita tidak



nantinya calon tunggal atau tidak," ujar Dito di Kantor DPP Golkar.

Namun Dito tak menyangkal nama Bahlil sudah beredar luas. "Ya memang kita sudah mendengar aspirasi ini mengerucut ke namanya Bang Bahlil," katanya.

Sedangkan Ketua Dewan pakar Partai Golkar Agung Laksono mengemukakan siapapun yang akan mencalonkan sebagai Ketum Golkar definitif harus

bisa menerima calon ketua umum yang tidak pernah duduk sebagai pengurus, apakah pengurus pusat atau daerah. Itu nanti akan gugur dalam seleksi," ujar Agung.

Namun, Agung Laksono enggan berbicara lebih jauh ihwal kepastian Bahlil bakal menduduki ketum definitif. "Ya kita belum tahu. Kita lihat ke depan," tandas Agung. •

AKHIRNYA KIM PLUS VIS A VIS PDIP

Yang terjadi pada Partai Golkar secara internal juga berdampak eksternal, ke luar. Dampak eksternalnya sudah terlihat dalam dinamika persaingan menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Juga peta politik dalam negeri secara keseluruhan.

Sulit menyangkal lengsernya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar terkait dinamika menjelang Pilkada 2024. Jika kaitannya bukan bersifat sebab-akibat, dinamika internal Partai Golkar saling mempengaruhi dengan dinamika menjelang Pilkada 2024.

Di hari yang sama dengan pengumuman Airlangga mengundurkan diri, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pengunduran diri itu akan berdampak langsung dan signifikan pada peta politik dalam Pilkada Serentak 2024.

Ia mengemukakan, dampak itu akan jelas dalam peta persaingan dalam Pilgub 2024 yang disebutnya banyak skenario yang diatur oleh pihak yang memiliki kekuasaan. "Terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario karena

ada kepentingan kekuasaan itu," ujar Hasto Minggu, 11 Agustus 2024.

Toh ia menambahkan, untuk Pilkada 2024 di tingkat kabupaten/kota, cenderung lebih tenang dibandingkan dengan tingkat provinsi. "Tetapi kalau di tingkat kabupaten/kota itu relatif konfigurasi menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah," terang Hasto.

Mengenai wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami perubahan pasca pengunduran diri Airlangga, Hasto tak merincinya. "Terutama daerah-daerah yang padat penduduk, karena ada yang berpikiran bahwa ini Pilkada serentak dan tidak terjadi lagi lima tahun ke depan," ujarnya.

Toh indikasi peta persaingan penentuan pasangan calon yang akan berjuang dalam Pilkada serentak 2024 di daerah provinsi dengan padat penduduk terindikasi di Banten, DKI Jakarta,



Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Di empat provinsi ini boleh dibilang PDIP baru dapat mengajukan calonnya jika berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas 20 persen kursi DPRD hasil Pemilu Legislatif terakhir (2024).

Nah, Partai Golkar saat diketuai oleh Airlangga Hartarto tampak membuka ruang komunikasi dengan PDIP untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam penentuan calon pasangan gubernur Banten misalnya, Partai Golkar hendak memasangkan politisi Airin Rachmy Diany sebagai calon gubernur dengan calon wakil gubernur dari PDIP. Sedangkan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju di luar Golkar sudah memasangkan Andra Soni, politisi Gerindra yang juga Ketua DPRD Banten sebagai Cagub dan Ahmad Dimiyati Natakusumah, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera.

Menjelang Pilgub Jakarta, Partai Golkar berupaya mengajukan Jusuf Hamka sebagai calon gubernur berpasangan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Namun partai-partai lain di KIM tampak hendak mengajukan Ridwan Kamil yang berpengalaman sebagai Gubernur Jawa Barat.

Ridwan Kamil sendiri pernah mengemukakan lebih memilih kembali bersaing untuk Pilgub Jabar. Namun belakangan justru Airlangga menyebutkan Ridwan Kamil akan berpasangan dengan politisi PKS di Pilgub Jakarta. "Inisialnya S," kata Airlangga.

Sedangkan untuk Pilgub Jabar, politisi Gerindra Dedi Mulyadi akan maju setelah KIM termasuk Partai Golkar sepakat mengajukannya sebagai calon gubernur. Penentuan pasangan Dedi Mulyadi belum selesai hingga Airlangga mengundurkan diri. Jusuf Hamka yang sempat disebut-sebut akan mendampingi Dedi ternyata mengundurkan diri juga dari Partai Golkar dan dunia politik beberapa saat setelah Airlangga mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

Di Pilgub Sumatera Utara, PKS belakangan mendukung pasangan Bobby Nasution-Surya yang diajukan oleh KIM. Namun, di provinsi ini PDIP sudah menentukan calon gubernurnya Eddy

Rahmayadi meskipun belum menentukan pasangan yang akan menjadi calon wakil gubernurnya..

Nah dinamika menjelang Pilkada 2024 ini juga beriringan dengan munculnya wacana KIM Plus, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran memenangi Pilpres 2024 merangkul partai-partai lain yang menjadi pesaingnya. Wacana KIM Plus ini sudah dilontarkan oleh Ketua Harian

KIM Plus tadi. Menurut dia, dinamika politik pada Pilkada 2024 cukup aneh karena ada calon kepala daerah yang tidak boleh berpasangan dengan kandidat tertentu.

"Lucu juga deh kalau lihat nih sekarang pilkada nih, yang ini enggak boleh sama yang itu, oh yang ini enggak boleh sama yang itu. Dibuatlah apa namanya ini sekarang, aku sampai dengar lihatin aja," kata Megawati di acara Penyerahan



Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sejak akhir Juli 2024.

Menurut Dasco, sejumlah partai politik bakal bergabung dengan KIM di sejumlah daerah pada Pilkada 2024 sehingga, terbentuk KIM Plus. "Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ada Koalisi Indonesia Maju Plus," ujar Dasco di iNews Tower, Jakarta pada 31 Juli 2024.

Dalam perkembangan berikutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri malah mengomentari langsung

Rekomendasi Calon Kepala Daerah, di Kantor DPP PDIP, Rabu 14 Agustus 2024.

Mega juga mengemukakan terlintas di pikirannya PDIP ditinggal sendirian. "Terus, saya suka ngomong pada diri saya sendiri kasihan deh PDI-P dikungkung, ditelikung tinggal sendirian. Wah yang lain apa namanya? KIM Plus. Nek KIM Plus itu plus ne opo yo (Kalau KIM plus itu plusnya apa ya)?" ujarnya.

Toh wujud KIM Plus agaknya semakin jelas dengan pertemuan Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo

Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dengan beberapa petinggi partai politik lain yang tak mengusungnya di Pilpres 2024. Pada Kamis, 15 Agustus 2024, berturut-turut Prabowo bertemu dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Plt Ketum PPP Mardiono, dan Ketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

PPP dan Perindo adalah parpol yang

Prabowo mengaku tak paham maksud konteks ditinggal. Ia tidak tahu siapa yang ditinggal atau siapa meninggalkan siapa. "Saya tidak mengerti, ditinggal atau siapa yang meninggalkan siapa, saya tidak mengerti," kata Prabowo di Kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2024.

Mengenai hasil pertemuan dengan Surya Paloh, Prabowo menyampaikan

anya NasDem untuk bergabung dengan kami, sama sama mengabdikan kepada negara dan bangsa," ujar dia.

Usai bertemu Prabowo, Paloh mengemukakan, pertemuan dengan Prabowo membahas kehidupan kebangsaan yang harus bergerak dinamis agar upaya dan harapan bersama untuk mengantarkan kehidupan kesatuan masyarakat semakin mudah tercapai. "Betapa pentingnya para elite bangsa harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti karena keangkuhan, ketidakpahaman betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk kehidupan bangsa kita," ujarnya.



Tetapi kalau di tingkat kabupaten/kota itu relatif konfigurasi-nya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah.

Terlebih, sambung Paloh, persatuan bangsa untuk menumbuhkan optimisme dari seluruh komponen dan elemen masyarakat. "Suasana yang lebih sejuk, penuh optimis. Ini akan memudahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mampu mendeliver program dan kerja yang dilaksanakan," ujarnya.

NasDem, kata Surya Paloh, bertekad melakukan segala upaya untuk sukseskan pemerintahan ke depan. Paloh berharap bergabungnya NasDem dengan Prabowo bukan malah menambah beban, tetapi menjadi bagian dari yang meringankan. "Saya juga mengatakan mudah-mudahan bukan sebagai faktor yang menambah beban insya Allah, mudah-mudahan dia bagian daripada yang meringankan," ujarnya.

Berikutnya, usai pertemuan dengan Plt Ketum PPP Mardiono, Prabowo



pada Pilpres 2024 mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dicalonkan PDIP. Sedangkan Partai Nasdem mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Di momen pertemuan itu, kalangan media menanyakan pula kepada Prabowo: apakah PDIP akan ditinggal di pemerintahannya? Pertanyaan itu diajukan kepada Prabowo seiring konferensi pers hasil pertemuannya dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

sepakat berkerja sama dengan Surya Paloh. Prabowo pun menegaskan selalu mengedepankan persatuan.

Menurut dia, persatuan merupakan kunci keberhasilan bangsa. "Saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa," ucapnya.

Prabowo menyambut baik Surya Paloh dan NasDem yang bersedia bergabung dengan koalisinya. "Karena itu saya menyambut sangat baik bersedi-

mengemukakan PPP telah menyampaikan keputusannya untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju sekaligus mendukung pemerintahan ke depan. "Baru saja saya menerima kedatangan Pak Mardiono, sahabat lama saya, dan beliau menyampaikan keputusan PPP untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami. Mendukung pemerintahan yang insyaallah akan saya pimpin Oktober yang akan datang," ucap Prabowo.

Presiden RI Terpilih Periode 2024-2029 itu menyambut baik keputusan PPP. "Saya menyampaikan terima kasih, rasa gembira saya, atas nama teman-teman koalisi kita," kata Prabowo.

Raka pada Pemilihan Presiden 2024.

"Tetapi karena itu (pilpres) sudah kita lakukan, sudah selesai, sudah ada keputusan, maka PPP tidak ada alasan lain harus mendukung kepada Presiden Terpilih Bapak Prabowo agar bisa menjalankan semua program kerja yang hari ini telah ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, untuk bagaimana mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya.

Mardiono menegaskan PPP berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, PPP juga berkomitmen untuk bekerja sama

Prabowo-Gibran," kata Angela usai bertemu Prabowo.

Angela mengatakan, partainya harus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk bisa berkontribusi lebih bagi negara. "Memang kami melihat, Partai Perindo ke depannya ini harus terus mendukung pemerintahan karena kita ingin berkontribusi lebih lagi, ya, tentunya harus bergabung dengan pemerintah," ucapnya.

Ia mengaku disambut baik oleh Prabowo. Di sisi lain, Angela mengatakan bahwa pertemuannya dengan Prabowo tidak membahas jatah menteri. "Kami hanya membahas soal bagaima-



Ia mengemukakan pula, dalam kepemimpinannya akan mengutamakan kolaborasi, kerja sama, dan persatuan dari semua unsur pemangku kepentingan Indonesia. Kerja sama itu untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

"Saya kira intinya itu, dan kita merasa kerja sama ini sangat besar manfaatnya, dan sudah terlihat di banyak daerah. Kita sudah bersinergi, saya kira begitu," ujar Prabowo.

Sedangkan Mardiono mengemukakan, keputusan partainya bergabung dengan koalisi Prabowo karena proses Pilpres 2024 telah selesai. Sebelumnya, PPP tidak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming

dengan Partai Gerindra pada Pilkada 2024. "Kami telah memiliki komitmen dengan Partai Gerindra, yaitu untuk menjalin kerja sama pada pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan ini telah berjalan sejak proses pencalonan pilkada itu dilakukan. Itu sudah berjalan. Jadi, masih ada beberapa tempat lagi," ucap Mardiono.

Dalam rangkaian berikutnya, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoe-soedibjo mengatakan partainya resmi mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah,

na arah pembangunan ke depannya dan bagaimana Perindo bisa terus berkontribusi. Apalagi, hari ini Perindo sudah bertransformasi dengan banyak generasi muda yang join (gabung ke) Perindo. Kami harap ini bisa menyalurkan gagasan-gagasan generasi muda dalam pemerintahan ke depannya," ungkapnya.

Nah, dinamika politik usai Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, dampak internal dan eksternalnya semakin jelas terkait Pilkada serentak 2024 dan peta politik dalam negeri dalam lima tahun ke depan. Telihat KIM Plus vis a vis PDI Perjuangan. ●

TENTANG MUSLIM, TAMBANG, DAN SURVEI

Saya gusar mengikuti polemik izin tambang bagi ormas yang tengah bergulir. Menurut saya, dua poros pro-kontra telah mengambil sikap ekstrem. Maka dari itu, berbekal hasil survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Jakarta tentang agama dan lingkungan yang dirilis pada 24 Juli 2024, saya ingin mendudukan isu ini secara lebih seimbang.

Sebagai informasi, pada 1 Maret-27 Mei 2024, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta menyurvei masyarakat Muslim tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka mengenai lingkungan dan perubahan iklim. Survei ini melibatkan 3.045 responden berusia minimal 15 tahun yang diwawancarai secara tatap muka.

Penafian, survei ini dilakukan sebelum polemik berlangsung. Tambang, kebetulan saja, menjadi salah satu pertanyaan yang kami tanyakan.

Temuan kami mengenai tambang memperlihatkan bahwa 63,83 persen Muslim di Indonesia setuju bahwa pesantren atau ormas keagamaan boleh memiliki usaha pertambangan atau perkebunan sawit untuk menambah pemasukan. Jika dilihat lebih detail, ada 67,88 persen Muslim yang merasa dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan 70,29 persen Muslim yang dekat dengan Muhammadiyah setuju pesantren atau ormas keagamaan mengelola tambang.

Ini tentu saja memperkuat argumen Ulil Abshar Abdalla, Ahmad Suaedy, dan lainnya yang pada beberapa kesempatan sering mengatakan bahwa keinginan mengelola tambang berasal dari akar rumput.

Namun, di saat yang sama, masyarakat Muslim Indonesia juga setuju bahwa aktivitas ekonomi seperti pertambangan dan perkebunan menjadi dalang bagi kerusakan lingkungan. Paling tidak ada 59,82 persen Muslim Indonesia yang menyetujui ini. Lebih jauh, dari yang setuju, ada 69,91 persen Muslim Muhammadiyah dan 67,91 persen Muslim NU setuju bahwa perubahan iklim terjadi karena aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit.

Temuan yang kedua ini memperkuat argumen mereka yang melawan Ulil.

Ekonomi atau Lingkungan?

Lantas, bagaimana kita harus menyikapi temuan yang ambivalen tersebut? Barangkali, memang seperti itulah hidup sebagai umat Islam di tengah era antroposen atau era neokapitalistik yang berpegang teguh pada idealisme pembangunan (developmentalism).

Jika membelah Bumi menjadi Kutub Utara (Global North) dan Kutub Selatan (Global South), kita akan menemukan tren bahwa pertumbuhan ekonomi selalu menjadi concern utama

**Oleh: Endi Aulia Garadian
Peneliti PPIM UIN Jakarta
Mahasiswa Doktoral di Bidang
Sejarah, Northern Illinois
University**

masyarakat Global South. Terutama semenjak Perang Dunia Kedua selesai, berbagai negara yang baru merdeka di wilayah ini berlomba-lomba memacu ketertinggalan mereka. Mereka, dalam banyak kesempatan dengan intervensi

orang-orang Global North, mengekstraksi semaksimal mungkin sumber daya alam yang ada di bawah kakinya.

Pada perkembangannya, upaya ekstraktif ini berbenturan dengan persoalan degradasi lingkungan. Makin ke sini, benturan ini semakin intensif. Hal ini terutama karena perubahan iklim semakin terasa dampaknya. Sehingga, perlu adanya rekonsiliasi antara manfaat pertumbuhan dan dampak lingkungan.

Umat Islam Indonesia, termasuk NU di dalamnya, pernah agresif memperjuangkan perbaikan lingkungan. Berkaca pada masa lalu, Kiai Ali Yafie sudah mengelaborasi kajian fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah) sejak awal tahun 2000-an. Muhammadiyah juga punya upaya serupa terkait ini. Fikih Air yang terbit pada 2014 mencakup kegiatan konsumsi, distribusi, konservasi, dan komersialisasi air sesuai nilai-nilai agama Islam.

Gerakan-gerakan lingkungan, baik yang umum maupun berbasis keagamaan, pun tidak berkurang dari tahun ke tahun. Jumlahnya semakin banyak. Namun, gerakan-gerakan ini sering kali kalah oleh gempuran industrialisasi.

Sebuah Tawaran Solusi

Mungkin saatnya kita mempertimbangkan kolaborasi antara dua kutub ekstrem yang tengah berpolemik. Di satu sisi, kita harus mengakui bahwa aktivitas pertambangan, perkebunan sawit, dan industri ekstraktif lainnya merugikan kita semua. Merusak Bumi kita. Merenggut masa depan anak bangsa. Dan tentu saja mengancam eksistensi berbagai flora dan fauna.

Namun, di sisi lain, kita juga perlu mengakui bahwa kesejahteraan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini. Saya tidak perlu menggarisbawahi bahwa kekayaan orang terkaya di Indonesia setara dengan 100 juta orang Indonesia. Atau perlu mengingatkan bahwa 50 orang terkaya di Indonesia adalah para taipan pemilik perusahaan tambang.

Untuk itu, perkawinan antarormas keagamaan dan lembaga-lembaga lingkungan mungkin harus dilakukan. Terutama,



kolaborasi dalam mengelola kekayaan alam Indonesia secara lebih arif dan bijaksana.

Selama ini, berbagai gerakan peduli lingkungan kerap berapriori terhadap kegiatan tambang berlandaskan wawasan lingkungan (green mining). Menafikan kemungkinan bahwa pertambangan semacam itu bisa dilakukan.

Pengetahuan terus berkembang. Manusia terus berevolusi untuk bisa bertahan dari perubahan alam. Termasuk mengotak-atik upaya "mengeksplorasi" Ibu Bumi tanpa memberi luka yang serius terhadapnya. Maka dari itu, sebuah studi dari Jon Blundy bersama para koleganya dari Departemen Ilmu Bumi, Universitas Oxford, mungkin perlu saya utarakan sedikit di sini.

Dalam sebuah artikel berjudul "The Economic Potential of Metalliferous Sub-Volcanic Brines" (2021), Blundy dan kawan-kawannya mendemonstrasikan proses ekstraksi berbagai logam berharga (valuable metals) dari cairan asin

Sebagai catatan, artikel mereka terbit di jurnal Royal Society Open Science. Dengan H-index jurnal sebesar 83, dan H-Index Blundy sendiri sebesar 85, jelas publikasinya bukan kelas kaleng-kaleng. Sebagai informasi, H-index atau Hirsch Index, H-Indeks merupakan indeks yang mencoba mengukur, baik dari segi produktivitas maupun dampak (impact) dari karya yang diterbitkan oleh seseorang. Angka 80 di kalangan akademisi adalah nilai yang luar biasa (remarkable). Maka rasanya aneh apabila kita meragukan temuan para ilmuwan dari Oxford itu.

Saya percaya bahwa keadilan ekonomi (economic justice) harus berjalan berdampingan dengan keadilan lingkungan (eco-justice). Hal ini tercantum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 Ayat 3. Di situ jelas termaktub tentang pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tentu saja, "kemakmuran rakyat" bisa menjadi bahasan pan-



panas (brines) yang terperangkap dalam batuan berpori di kedalaman sekitar 2 kilometer di bawah gunung berapi yang tidak aktif. Mereka melakukannya dengan kerusakan yang sangat minim.

Mereka mengatakan upaya tersebut sebagai green mining. Sebab, upaya penambangan seperti itu dapat menyediakan logam-logam penting (tembaga, emas, seng, perak, dan litium) untuk masa depan umat manusia di satu sisi, tetapi juga tetap menjaga skor nol emisi (net zero emission) dengan penambangan yang berkelanjutan. Ini jelas temuan abad ini.

jang tersendiri. Namun, saya ingin menghindari perdebatan itu. Faktanya, saat ini pasal tersebut belum dijalankan sama sekali. Kekayaan alam hilang entah ke mana, lingkungan rusak tidak karuan, tetapi rakyat tidak merasakan kemakmuran.

Maka dari itu, mari kita kembalikan semangat membela lingkungan sebagai entitas yang tidak terpisah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Saya percaya, kolaborasi ormas dan gerakan-gerakan hijau adalah kunci untuk bisa mencapai titik ekuilibrium itu. Ketika negara tidak berhasil, masyarakat sipil (civil society) yang seharusnya menjadi inisiator pembangunan. •



PERTUMBUHAN EKONOMI SOLID DAN TERJAGA

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dinilai cukup stabil dalam menghadapi perekonomian global dan nasional. Kondisi yang terjaga dan solid membuat Sumatera Selatan mendapat berbagai apresiasi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI) Airlangga Hartarto memuji kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel yang solid dengan inflasi yang terjaga sehingga dia berharap kondisi positif ini terus dipertahankan.

"Pertumbuhan ekonomi provinsi Sumsel konsisten pada kisaran 5% (yoy), pada triwulan 1-2024, kinerja ekonomi Sumsel tumbuh sebesar 5,06% (yoy) tertinggi di Pulau Sumatera, inflasi juga terkendali dengan tren deflasi bulanan seiring dengan penurunan harga komoditas pangan. Kondisi ini perlu terus dipertahankan," katanya dalam Rapat Koordinasi Daerah Perekonomian dan Pengendalian Inflasi.

Menko Perekonomian juga menyam-

paikan pesan khusus kepada PJ Gubernur Sumsel untuk mempercepat penyelesaian Project Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sumsel seperti pembangunan jalan tol Betung-Tempino, bendungan tiga dihaji, serta pembangunan irigasi Lempuing dan juga daerah irigasi Lematang.

"Kami titip Bapak PJ Gubernur, agar Proyek Strategis Nasional jangan sampai lambat, seperti pembangunan jalan tol Betung-Simpang Tempino agar pada tahun ini selesai, dan betul-betul Trans Sumatera itu tersambung. Jangan sampai putusnya di Sumsel, kemudian pembangunan bendungan diharapkan saluran primer, sekunder, dan tersiernya itu tersambung jadi dengan demikian tentu investasi ini bisa produktif," tuturnya.

Menko Airlangga juga meminta agar

kebutuhan fiskal juga bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih inovatif, termasuk bekerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan, maupun lembaga pembiayaan pemerintah. APBD Provinsi Sumsel baik itu pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota cenderung seimbang antara pendapatan dan belanja daerah.

"Perekonomian Sumsel ditopang utamanya oleh sektor pertambangan, industri, dan perdagangan, sehingga dapat sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, hilirisasi menjadi strategi peningkatan nilai tambah yang berkelanjutan," tambahnya.

Airlangga juga mengingatkan, Presiden Joko Widodo telah memberikan lima arahan kepada TPIP dan TPID pada rakornas pengendalian inflasi 2024, se-

bagai strategi pengamanan produksi dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan.

"Antara lain memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian dan mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian," tambahnya

Pj Gubernur Elen Setiadi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Menko Perekonomian RI yang telah memberikan update perekonomian serta tantangannya.

Salurkan Dana KUR dan CSR

Dalam kunjungannya ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada seluruh pelaku usaha wanita, penyandang disabilitas, masyarakat, serta perkebunan di Sumsel.

Penyerahan dana KUR dan CSR di Sumsel ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Selain KUR dan CSR dalam kesempatan Airlangga Hartarto juga menyerahkan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dimana dana ini diberikan bertujuan untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.

Dalam arahnya Airlangga menyebutkan Sumsel merupakan salah satu daerah penerima dana KUR terbesar di Pulau Sumatera.

"Hari ini kita salurkan dana KUR dan dana PSR, ini diharapkan terus ditingkatkan dan di Sumatera salah satu penerima terbesarnya yakni Sumsel," katanya.

Untuk dana PSR diberikan di Sumsel sebanyak Rp 2 Triliun. Dengan replanting sawit anggaran Rp 30 juta per hektar akan meningkat menjadi 60 juta per hektarnya.

"Untuk replanting sawit ini anggarannya per hektar 30 juta, ini segera ditingkatkan jadi Rp 60 juta selanjutnya jumlah PSR yang diberikan di Sumsel itu hampir 2 triliun untuk 28.686 pekebun dengan

yaluran dari pusat PIP mengenai kredit untuk pembiayaan ultra mikro. Insyaallah ini akan kita tindak lanjuti karena ini sangat diperlukan masyarakat dalam menambah akses pembiayaan selain



luasan kebun 70 hektar," jelasnya.

Sementara Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan, MoU ini dilakukan untuk mempermudah penyaluran PIP bagi Usaha Mikro guna menambah akses pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sumsel.

"Kita menandatangani MoU bersama Bupati, Walikota se Sumsel dengan Pusat Investasi Pemerintah mengenai pen-

yang disediakan oleh Perbankan," kata Elen.

Untuk di Sumsel sendiri realisasi KUR sebesar Rp 4,34 triliun. Guna mengoptimalkan dan mengakselerasi penyaluran KUR di semester ke II pemerintah akan mendorong semua stakeholder dan pemerintah daerah untuk mengupayakan akselerasi penyerahan KUR di daerah. ●

LAKUKAN PERGANTIAN PENJABAT KEPALA DAERAH DAN SEKDA

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, melantik dan pengambilan sumpah jabatan Pj Bupati Lahat, Pj Bupati Banyuasin, Pj Bupati Muara Enim serta Pj Bupati OKI. Elen Setiadi juga melantik Edward Candra sebagai Sekda Sumsel definitif.

Dengan dilantikannya Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dalam menjalankan peran strategis pemerintahan daerah, dengan tugas fungsi (tupoksi) sebagai komunikator, koordinator, dinamisator, dan fasilitator dalam menjembatani

dan membantu kepala.

"Alhamdulillah tadi sudah dilantik, dengan demikian Provinsi Sumsel sejak Pak Sekdanya pensiun sudah terisi secara definitif sehingga tidak ada hambatan lagi secara administratif di Provinsi Sumsel," kata Elen Setiadi.

Elen mengharapkan setelah dilantik

sebagai definitif, Edward Candra dapat bekerja maksimal dalam menjalankan agenda besar kedepan agar lebih baik lagi.

"Hari ini pak Edward akan bekerja terutama untuk menyambut 17 Agustus dan banyak rangkaian acaranya, termasuk akan menyelesaikan perubahan APBD dan RAPBD 2025, Insya Allah ini kita akan selesaikan," ungkapnya.

Pj Gubernur Sumsel mengharapkan agar Sekda Sumsel dapat bekerja dengan maksimal dan sebaik-baiknya.

"Dengan demikian kita harap pejabat definitif akan bisa bekerja lebih cepat, lebih efektif dan efisien," tutupnya.

Sementara itu, Sekda Sumsel Edward Candra menegaskan komitmennya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.

"Saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat termasuk bagaimana kedepan Sumsel semakin maju," tuturnya.

Lantik M Iqbal Alisyahbana Jadi Pj Bupati OKU

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi juga melantik Muhammad Iqbal Alisyahbana menjadi Pj Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), menggantikan Pj Bupati OKU sebelumnya Teddy Meilwansyah.

Pelantikan Pj Bupati OKU dilanjutkan dengan Pelantikan Pj Ketua Tim Penggerak PKK OKU, Vina Aprilia Iqbal oleh Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel, Melza Elen Setiadi.

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan hendaknya Pj OKU yang baru untuk memberikan yang terbaik dan bermanfaat, serta melaksanakan semua tugas-tugas yang telah dipercayakan dalam waktu yang singkat.



Ke depan, masih ada tugas-tugas yang perlu mendapatkan perhatian khusus, salah satunya yakni menghadapi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak. Bukan hanya persiapan saja yang harus diperhatikan, namun pada hari pelaksanaannya juga harus dapat diantisipasi jika terdapat hal-hal yang mengganggu jalannya pesta demokrasi.

Dalam kondisi seperti ini kerja sama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam membentuk jalinan komunikasi yang baik antar instansi maupun masyarakat.

Perlu diingat bahwa, sesuai amanat pemerintah yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa seluruh ASN harus menjaga netralitasnya dan juga dilarang menjadi salah satu anggota tim pemenang ataupun ikut serta berkampanye terhadap pasangan calon tertentu khususnya mengajak masyarakat untuk tidak memilih pasangan calon lainnya.

Begitupun TNI/POLRI dilarang untuk terlibat dalam politik praktis dan harus tetap fokus untuk menjaga stabilitas politik, karena tingginya tensi politik dapat menjadikan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kampanye hitam (black campaign).

Elen mengatakan semua tentu berharap pelaksanaan pesta demokrasi di tahun ini dapat berjalan dengan tertib, damai, dan sukses hingga pada saat pelantikan kepala daerah definitif. Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan dari semua pihak agar tercipta Pilkada di tahun ini dapat menjunjung tinggi nilai kejujuran, bersih, transparan dan adil.

"Untuk itu, mari bersama-sama kita wujudkan Sumatera Selatan berada dalam zero conflict, dan pastikan tidak ada kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya potensi konflik," harapnya.

Elen Setiadi juga mengajak semua elemen masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu agar dapat saling membantu untuk kemajuan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan semakin tangguh sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu.

Kepada Pj Bupati yang baru saja dilantik Elen juga mengucapkan sela-

mat bertugas dan laksanakan amanah yang mulia ini dengan penuh tanggungjawab.

"Tetap fokus pada skala prioritas, yaitu pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, penanggulangan bencana, serta persiapan pelaksanaan dalam menghadapi Pilkada Serentak," tegasnya.

Selain hal-hal di atas, Elen juga meng-

nasikan dengan Forkopimda di Kabupaten OKU.

la juga memastikan akan fokus menjalankan program prioritas yang menjadi perhatian Pj Gubernur seperti pengendalian inflasi, pengentasan angka kemiskinan, pengentasan stunting, pencegahan Karhutla dan Pilkada Serentak.

"Dan tentu karena ini masih masa puncak musim kemarau kita akan



ingatkan beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini, di sejumlah tempat telah mengalami banjir yang cukup menyita perhatian nasional dan ini merupakan gambaran bagi semua pihak untuk selalu tetap waspada dalam menjaga lingkungan, dan diharapkan kejadian ini jangan sampai kembali terulang.

Sementara itu Pj Bupati OKU yang baru dilantik M. Iqbal Alisyahbana mengatakan akan segera berkoordinasi

berupaya mewujudkan zero Karhutla di OKU," tutupnya.

Sebelumnya juga dilakukan pelantikan tiga penjabat kepala daerah yakni Pj Bupati Lahat Imam Pasli menggantikan Pj yang lama M Farid. Sedangkan M Farid dilantik menggantikan Pj Bupati Banyuasin menggantikan Hani Syopiar Rustam. Sementara Pj Bupati Muara Enim yang baru Hengky Putrawan menggantikan Ahmad Rizali yang mengundurkan diri. ●

SIAP DAN SIAGA TANGGULANGI KARHUTLA

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan kesiapsiagaannya mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumsel tahun 2024. Berbagai persiapan telah dilakukan seperti pelatihan penanggulangan Karhutla.

Melalui pelatihan ini Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi berharap semakin meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan semua elemen dalam menghadapi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumsel.

"Mereka inilah yang akan menjadi motor penggerak utama melakukan pencegahan dan pemadaman jika ada

pun di musim kemarau masih akan terdapat hujan dengan adanya hujan menyebabkan kondisi lahan menjadi basah dan potensi kebakaran akan menjadi berkurang.

"Ini secara teori tetapi faktanya beberapa hari kemarin kita mendapatkan informasi di beberapa titik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah terjadi kebakaran lahan yang cukup mengkhawatirkan seperti terjadi di Kabupaten

yang kering.

Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan ekosistem, kerugian ekonomi, hingga gangguan kesehatan masyarakat akibat asap yang ditimbulkan.

Kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak juga pada kerusakan lingkungan seperti terjadinya perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, kelangkaan biodiversitas dan sumberdaya air yang



titik api atau hot spot baru. Mereka akan turun mencegah perluasan kebakaran," jelasnya.

Elen menjelaskan, musim kemarau tahun 2024 ini dipengaruhi La Nina sebagaimana yang disampaikan Badan Meteorologi & Klimatologi, kondisi ini sebenarnya merupakan kabar baik bagi. Sebab dengan pengaruh La Nina walau-

Ogan Ilir, PALI, OKI dan Kabupaten Musi Banyuasin," ujarnya.

Untuk itulah upaya mitigasi perlu ditingkatkan seperti sosialisasi, patroli dan pemadaman dini. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah secara dini kebakaran hutan dan lahan, kalau tidak bisa ditangani secara dini potensi penyebaran luas kebakaran dengan kondisi lahan

saat ini menjadi salah satu isu penting internasional.

"Untuk itu perlu ditegaskan agar kita dapat mengendalikan dan menjaga hutan dan lahan kita dari kebakaran hutan dan lahan," tambahnya.

Elen menjelaskan, bahwa latihan ini diselenggarakan dengan beberapa tujuan salah satunya untuk meningkatkan

kapasitas dan kesiapsiagaannya dalam menghadapi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Melalui pelatihan ini, diharapkan mampu memahami penyebab dan karakteristik kebakaran hutan dan lahan. Menguasai teknik pencegahan dan pemadaman kebakaran yang efektif.

Meningkatkan kemampuan koordinasi dan komunikasi dalam penanganan karhutla, dan dapat mengetahui aspek hukum dan regulasi terkait pengendalian Karhutla

Sementara itu Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rachmad Wibowo menjelaskan pelatihan ini diikuti 250 personel yang terdiri dari 200 personel Polri dan 50 personel dari TNI. Mereka akan mengikuti pelatihan selama dua hari kedepan. Mereka ini dilatih tim ahli Manggala Agni di bawah Kementerian KLHK.

Untuk peralatan, para personel ini sudah dilengkapi dengan bantuan Gubernur ada alat pelindung diri dan pompa. Setelah menjalani latihan, kekuatan personel ini juga akan mendapatkan tambahan kekuatan sebanyak 240 personel dari Manggala Agni.

Ia juga mengungkapkan kalau Sumsel merupakan penyumbang CO2 nomor 2 di Indonesia setelah Kalimantan Tengah, dimana Kabupaten OKI merupakan penyumbang tertinggi Karhutla di Sumsel.

Sedangkan Danrem 044 Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir memaparkan, Karhutla sebagian besar terjadi karena faktor kelalaian manusia baik disengaja maupun tidak sengaja. Selain itu juga kebakaran dilakukan untuk pembukaan lahan baru.

Diungkapkan Thohir pihaknya telah melaksanakan sinergitas dengan baik, serta telah melakukan penetapan status siaga dan pembentukan posko Karhutla.

"Sebagian puncak kemarau terjadi di bulan Agustus. Hingga saat ini 722 hotspot sudah terdeteksi, sebagian besar di wilayah lahan gambut dan sebagian di lahan kering. Adapun potensi kerawanan karhutla yaitu di wilayah OKI, OI, Muba, Banyuasin, Muratara (masuk skala merah). Sedangkan untuk personil satgas Provinsi Sumsel sebanyak 9664," bebernya

Gelar **Simulasi** Karhutla

Guna memastikan kesiapsiagaan pen-

anggulangan Karhutla, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bahkan memimpin Apel dan Simulasi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel Tahun 2024 langsung.

Melalui simulasi dan apel ini diharap-

serta pertambangan," ungkapnya.

Menurut Airlangga, kekayaan ini perlu dikelola secara baik untuk kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat.

"Kondisi geografis ini juga membawa tantangan alam seperti ancaman ban-



kan semakin meningkatkan kesiapsiagaan personil dan peralatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumsel.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam arahannya mengatakan, wilayah Sumsel memiliki topografi yang beragam dengan dataran tinggi di Barat Bukit Barisan dataran rendah di Timur serta ekosistem mangrove dan lahan gambut yang luas.

"Ini menjadikan Sumsel subur untuk produk perkebunan pertanian perikanan

jir tanah longsor saat musim hujan kering serta kebakaran hutan saat musim kemarau terutama di lahan gambut yang mudah terbakar," imbuhnya.

Dia merinci kerugian ekonomi yg timbul akibat Karhutla di Sumsel tahun 2022 mencapai Rp42,7 miliar dengan kerugian terbesar di Kabupaten OKI mencapai Rp11,4 miliar.

"Ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan langkah-langkah urgensi agar penanganan secara efektif bisa berkelanjutan," tambahnya. ●

KOMITMEN TEKAN KEMISKINAN

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi tetap berkomitmen menekan tingkat kemiskinan. Berbagai upaya dilakukan Pemprov Sumsel untuk itu.

fenomena kemiskinan ekstrim merupakan persoalan multidimensi. Mereka terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar yaitu pendidikan yang rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif dan berpendapatan rendah.

Elen Setiadi menjelaskan konsep kemiskinan yang digunakan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), kemiskinan didefinisikan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan nonmakanan).

"Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin nasional pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023. Sedangkan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan berada di peringkat ke-6 tertinggi sebesar 984,24 ribu pada tahun 2024," kata Elen.

Sedangkan jumlah penduduk miskin

lanjut Elen mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2024 yaitu turun 61,4 ribu orang terhadap Maret 2023.

Tren tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan dari per Maret 2019 sebesar 12,71 persen menjadi 10,97 persen pada per Maret 2024.

Kemudian seluruh 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari Maret 2023 ke Maret 2024.

"Ada 7 kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya di bawah 1 digit yaitu OKU Selatan, PALI, Muara Enim, Palembang, OKU Timur, Banyuasin dan Pagar Alam. Hanya kota Pagar Alam yang tingkat kemiskinannya lebih baik dari capaian nasional dan provinsi yaitu 8,18 persen", ungkap Elen.

Tren tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan, per Maret 2024 mencapai 0,59 persen turun 4,72 persen poin dari 5,31 persen Maret 2020.

Tingkat kemiskinan ekstrem provinsi Sumatera Selatan per Maret 2024 sudah lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang sebesar 0,83 persen. Terdapat 14 kabupaten/kota yang angka tingkat kemiskinan ekstrem sudah berada di kisaran 0 persen di Maret 2024.

Sementara tingkat kemiskinan ekstrem per kabupaten/kota pada tahun 2024 yang berada di atas capaian tingkat kemiskinan ekstrim provinsi ada 5 kabupaten/kota (Lahat, Musi Rawas, OKU Selatan, Ogan Ilir dan Empat Lawang), dan 12 kabupaten/kota yang berada di bawah capaian tingkat kemiskinan ekstrem provinsi.

Merujuk Inpres Nomor 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menekankan pada beberapa hal, yaitu target 0% kemiskinan ekstrem tahun 2024. Keterpaduan dan sinergi 3 strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tepat sasaran dengan penggunaan data dan instrumen. Kolaboratif melibatkan kerjasama pemerintah pusat, pemda, dan para pe-



mangku kepentingan, juga masyarakat.

Upaya 3 strategi kemiskinan ekstrem Provinsi Sumatera Selatan dapat dilakukan dengan, pertama menurunkan beban pengeluaran, seperti pengendalian harga bahan pokok (inflasi), Gerakan Pangan Murah (GPM), Universal Health Coverage (UHC), bantuan pendidikan melalui pembiayaan operasional pendidikan.

Kedua adalah meningkatkan pendapatan bantuan usaha ekonomi produktif bagi warga miskin, pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah, dan pelatihan pemberdayaan masyarakat.

"Selanjutnya yang ketiga pengurangan kantong-kantong kemiskinan, yang dapat dilakukan dengan optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar (akses air minum dan sanitasi layak), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak, Gerakan Bedah Rumah Serentak dan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni," urai Elen.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh Wahyu Yulianto menyampaikan BPS telah menghitung kemiskinan makro dari bulan Maret hingga September 2024. Penghitungan ini secara periodik sudah dilakukan, dengan pendekatan ekonomi.

"Ada pula kemiskinan mikro menggunakan konsep multi dimensi dan pendekatan non moneter dalam perhitungan datanya", ujar Wahyu.

Inflasi Masih Terkendali

Sementara berdasarkan data dari BPS, inflasi di Sumsel masih terkendali dengan baik. Dimana pada Juli 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,11.

Inflasi tertinggi terjadi di Kota Palembang sebesar 2,09 persen dengan IHK sebesar 105,82 dan terendah terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 1,04 persen dengan IHK sebesar 106,69.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,02 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan

bakar rumah tangga sebesar 2,17 persen. Kelompok kesehatan sebesar 1,92 persen. Kelompok transportasi sebesar 2,04 persen.

Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,61 persen. Kelompok pendidikan sebesar 2,86 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,59 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,45 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki

Sumsel mengalami deflasi dan Inflasi masih 2 persen lebih. Sumber-sumber deflasi sifatnya ada yang situasional karena pasokannya berlimpah seperti cabai merah, bawang merah, tomat dan menjadi sumber deflasi.

Begitupun sumber inflasi dikatakan Elen juga bersifat situasional tahunan seperti pendidikan. Namun ada juga yang cukup surprise, yakni emas yang mengalami kenaikan secara terus menerus.

"Karena itu emas menjadi salah satu penyumbang inflasi beberapa bulan



sebesar 1,40 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,86 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,28 persen.

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Selatan bulan Juli 2024 sebesar 0,29 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,35 persen.

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan Sumsel bahwa pada Juli ini

belakangan. Satu lagi yang surprise lagi adalah peralatan skincare dan rekreasi," jelasnya.

Terkait komoditas beras yang menjadi salah satu sumber inflasi, menurut Elen sudah menjadi perhatian pihaknya. Pemprov Sumsel bahkan sudah menyiapkan beberapa strategi dengan mengundang beberapa perusahaan dan Bulog untuk mendetailkan bagaimana mengendalikan inflasi yang bersumber dari beras. ●

TOL KAPAL BETUNG, TARGETNYA 2024 TERSAMBUNG SEMUA

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi berkomitmen mempercepat kelanjutan pembangunan Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (Kapal Betung). Dengan begitu kemacetan di Sumatera Selatan khususnya di wilayah jalur tol ini bisa teratasi.

Menurut Elen Pemprov Sumsel berkomitmen mempercepat kelanjutan pembangunan di ruas KAPB Tahap -2 STA 42+500 S/D 111+690. Dengan menyelesaikan ruas itu. Bahkan ia optimis tahun ini tol tersebut dapat segera difungsikan atau dioperasikan sehingga dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di Betung.

Saat ini kata Elen, beberapa progres pembangunan jalan tol ini ada yang belum bisa dilanjutkan karena berbagai kendala. Seperti persoalan lahan berkaitan dengan masyarakat yang masih keberatan, kemudian juga ada persoalan interchange di Pangkalan Balai berkaitan dengan Pertagas seperti pipa dan sebagainya.

Terkait kendala-kendala itu menurut Elen pihaknya sudah minta bantuan hukumnya ke Kajati bahkan jika ada persoalan sosial pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polda untuk mengantisipasi kerawanan sosial.

Sementara itu untuk exit change Pangkalan Balai menurut Elen juga akan segera diselesaikan agar dapat mempercepat kelanjutan dari titik 96 ke titik 111. Terkait penyelesaian tanahnya ini Elen optimis dapat segera berkoordinasi dengan Pemkab Banyuasin dan berharap mudah-mudahan bisa diselesaikan tanpa jembatan terlebih dahulu.

"Kalau selesai semua sekitar 70 Km, dan itu exitnya di Betung sudah melewati simpang Y (tugu Polwan). Simpang Y itu sumber kemacetan kalau sudah dioperasikan nanti setelah sampai ke exitnya,

interchange nya Betung. InshaAllah ini akan lancar dan akan sangat membantu masyarakat untuk mengurangi macet jalan yang ada saat ini," jelasnya saat meninjau langsung Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (Kapal Betung), tepatnya di KM-64.

Untuk merealisasikan target tersebut saat ini Pemprov akan berupaya mendorong HK, PUPR, ATR, KLHK dan para pihak terkait agar kendala yang ada dapat diselesaikan pada tahun 2024.

"Kita akan cek lagi nanti dari Betung ke Bayung Lencir kami akan segera kita koordinasikan lagi, kondisi saat ini. besok akan dilakukan rapat lagi untuk Penlok baru, karena ada perubahan trasenya," jelas Elen.

Pj Gubernur Sumsel mengatakan trase ini secara hukum sudah kuat sehingga akan dilakukan pengecekan ulang. Ia juga mengaku akan berkoordinasi dengan

Pj Mubas
sehingga dapat dibangun dan dilakukan

pembebasan lahan.

"Di Jambi sudah selesai, dan kita sudah sangat ditunggu oleh Jambi agar bisa tersambung," jelasnya.

Secara persentase teknis, pembangunan ini menurut Elen sudah sesuai arahan target Presiden mencapai 75 persen.

"Kita akan lakukan secepatnya, targetnya di tahun 2024 disambung semua, kalau bisa dilakukan percepatan 2024 di segmen-segmen tertentu kita bisa selesaikan sesuai arahan Presiden," jelas Elen.

Elen mengatakan operasionalnya nanti sudah permanen sebagai pengurai kemacetan dan bukan untuk waktu tertentu saja sesuai dengan standar keselamatan dan sertifikat kelayakan jalan dari PUPR.

Tak hanya meninjau progres jalan di KM 64 Tol Kapal Betung, namun Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi juga meninjau progres pembangunan Jalan Tol Kapal Betung pekerjaan Jembatan Musi (STA 49+681 S/D STA 51+365).



Percepatan Penyelesaian Pembangunan

Guna mewujudkan target tersebut Pj Gubernur Elen Setiadi menggelar rapat percepatan penyelesaian pembangunan tol ruas Kayu Agung - Palembang - Betung dan Ruas Betung - Tempino - Jambi. Rapat ini merupakan tidak lanjut dari hasil tinjauannya dilapangan beberapa pekan sebelumnya.

Elen mengatakan, sengketa lahan yang terjadi di Ruas Tol Palembang Betung tidak mengganggu pembangunan konstruksi jalan tol sesuai keberlakuan Undang-Undang yang sudah ada.

"Hari ini kita menindaklanjuti hasil dari kunjungan minggu lalu, kita bahas penyelesaian jalan tol yang pertama dari Gandus sampai ke Betung terutama masalah lahan sampai ke musi tandas namun permasalahan ini tidak mengganggu konstruksi pembangunan, ini akan terus kita dorong jika memang memerlukan pengamanan dari aparat penegak hukum kita akan lakukan," kata Elen.

la menyebut permasalahan lahan yang terjadi akan segera diselesaikan terutama dari Gandus Betung, sedangkan untuk pembangunan jembatan Musi 5 akan terus dikerjakan sesuai ketentuan.

"Yang kita utamakan dari Gandus ke Betung, sedangkan untuk jembatan Musi 5 akan kita lakukan upaya percepatan. Pemprov akan terus memberikan dukungan. Insyaallah kita lakukan fungsionalkan dahulu lalu operasionalnya tinggal menunggu PUPR," tambahnya.

Elen berharap ruas Tol Palembang Betung segera selesai dan dapat difungsionalkan mengingat ruas Tol Batang Lincir- Tempino sudah rampung diharapkan semua akan tersambung.

"Karena ruas Bayung Lincir Tempino sudah selesai Pemprov Jambi menunggu ini akan segera disambungkan," harapnya.

Sementara itu dari pihak Hutama Karya mengatakan bahwa progres pembangunan sudah mencapai 70 dan 75 persen untuk prioritas 1 dan prioritas II.

"Progres sekitar 70 persen untuk yang prioritas II dan untuk yang prioritas 75 persen untuk prioritas I pangkalan balai sampai betung masih tahap pembebasan lahan," ujarnya. •





LAKUKAN PEMBENAHAN TOTAL, KEJAR TARGET MENUJU MUSI 2024

Geliat pembangunan terus dilakukan Pemerintah Kota Palembang. Pemkot Palembang tidak hanya terfokus pada sentral kota saja tapi melakukan pembenahan secara total. Pembenahan dan pembangunan dilakukan mulai dari kanal, drainase, jalan hingga kampung kumuh. Sehingga ke depannya Kota Palembang akan semakin cantik dan indah.

Pj Walikota Palembang, A Damenta menyampaikan, pembenahan kota akan segera dilakukan oleh Pemerintah kota Palembang, mulai dari sampah mengatasi kemacetan lalu lintas hingga banjir.

"Bahkan tim SDA kita setiap hari dan jalan terus, maka dari itu pasukan kuning harus kita apresiasi," kata Damenta.

Damenta juga mengungkapkan, dirinya terus mendapatkan laporan terkait kinerja setiap OPD, tak terkecuali terkait penerangan lampu jalan.

"Yang pasti target kita yakni menuju Musi 2024. Musi 2024 itu poinnya adalah disiplin, bersih, sehat, indah, rapi dan pastinya Begawe (bekerja) bukan Apo Gawe (Ngerjain Apa)," tuturnya.

Sementara Kepala Dinas PUPR Kota

Palembang, Ahmad Bastari juga menyampaikan, mereka pihaknya bersama seluruh OPD juga telah meminta langsung arahan dari Pj Walikota Palembang terkait hal tersebut.

"Tadi Pak Walikota telah meminta untuk menghidupkan kembali transportasi sungai dihidupkan lagi. Disamping transportasi sungai juga sekaligus untuk pengendalian banjir, sekaligus tempat wisata," ujarnya.

Fokus pembangunan sendiri berdasarkan survei telaah strategis pembangunan infrastruktur PUPR di kawasan Perkotaan Patung Raya Agung (Palembang-Betung-Indralaya-Kayu Agung) dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

at (PUPR) dan BPPW Sumsel,

"Alhamdulillah Pak Wali juga mengapresiasi sekali. Setelah studi ini selesai, Pak Wali juga akan membawa ke Kementerian PU untuk dipaparkan dan di ekspos di Kementerian PU," tambahnya.

Revitalisasi Pasar 16 Ilir Berlanjut

Salah satu program pembenahan total yang dilakukan A Damenta yakni melanjutkan revitalisasi Pasar 16 Ilir. Guna memuluskan tersebut Pemkot Palembang berencana melakukan relokasi pedagang dalam waktu dekat ini.

Berbagai aspek menjadi sorotan Pj Walikota A Damenta terhadap Pasar 16 Ilir ini, mulai dari kerapian tata letak para pedagang hingga saluran air.

"Saluran air drainase yang sekarang ini mengakibatkan banjir Kota Palembang yang sebagian besar ada di dalam itu (Pasar 16), semua sudah tertutup oleh lapak-lapak. Ditutup secara paksa itu tidak boleh, dengan adanya revitalisasi saluran air itu terpaksa kita bongkar dan kita benahi," ucap A Damenta saat mengunjungi lokasi.

Dimana hasil kunjungannya tersebut,



Sehingga kalau ada batu atau semen yang jatuh tidak menimpa pedagang kita.

Pj Walikota menemukan adanya gudang minyak goreng yang terletak di bawah (kolong) Pasar 16 dengan kondisi yang dinilai membahayakan.

"Minyak itu kalau tersulut menimbulkan potensi bisa terbakar, kalau meledak habis kita. Kita mohon sekali para pemilik lapak komunikasi dengan kami, kita sangat komunikatif intinya kita akan melakukan revitalisasi segera untuk kenyamanan semuanya," ujar dia.

Nantinya lapak- lapak di pinggir jalan pasar tumpah akan direlokasi, dengan memanfaatkan lahan parkir di sekitar Warung Makwo (dekat JCO Dermaga Point).

"Sehingga kalau ada batu atau semen yang jatuh tidak menimpa pedagang kita," bebernya.

Damenta menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengganggu pedagang, pihaknya hanya menata kembali posisi pedagang berjualan dengan baik.

"Pemerintah melakukan pembenahan ayo kita benahi bersama agar semua nyaman. Terkait kesepakatan harga tentu disesuaikan, beberapa kali sudah kita lakukan pertemuan sampai ke tingkat moderat," bebernya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Palembang Jaya Abdul Rizal mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali mengadakan rapat terkait revitalisasi dan relokasi pedagang di Pasar 16 Ilir.

"Sesuai komitmen bapak Pj Walikota, revitalisasi harus segera kita laksanakan, kalau tidak dilaksanakan pasti resikonya di pedagang sendiri, PAD dan lain seba-

gainya," kata dia.

Rizal mengatakan bahwa tahap pertama Minggu depan, pihaknya akan berkomunikasi lagi dengan para pedagang dalam persiapan relokasi dan pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

"Jumlah petak kita itu semuanya 1050, kemudian yang berdagang cuma 439 pedagang. Sisanya itu ada satu orang punya lebih dari satu petak. Jadi rencana kita buat TPS itu sekitar 700 lebih di lapangan ini (parkir)," katanya.

Pedagang dalam maupun pedagang kaki lima (PKL) di depan semuanya akan dipindahkan sementara di lokasi lahan parkir yang sudah disiapkan.

"Kemudian jalan di arah kuto itu kita aspal semua jadi bagus dan revitalisasi tidak ada gangguan lagi, Insyaallah Minggu depan sudah clear paling tidak akhir Agustus sudah operasional," tuturnya. ●





POSISI STRATEGIS KALTARA PINTU MASUK IKN

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, bersama 37 gubernur lainnya dari seluruh Indonesia berkumpul di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo, 13 Agustus 2024.

Kehadiran para gubernur ini terkait dengan rapat koordinasi persiapan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang akan digelar pada 17 Agustus mendatang di IKN. Presiden Jokowi tidak hanya mengundang para gubernur, tetapi juga bupati dan wali kota se-Indonesia untuk turut hadir dalam rakor tersebut.

Zainal memanfaatkan kesempatan ini untuk memaparkan posisi strategis Kaltara sebagai provinsi yang terdekat dengan Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, Kaltara telah menjadi bagian integral dari pengembangan IKN karena di wilayah ini terdapat proyek strategis

nasional (PSN) berupa kawasan industri dan pelabuhan internasional, yang dikenal juga sebagai Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).

Zainal mengatakan, Pemprov Kaltara telah menetapkan sejumlah program strategis untuk mempersiapkan provinsi tersebut sebagai pintu masuk dan garda terdepan IKN. Salah satu fokus utama adalah peningkatan produktivitas pangan lokal. Sejak tahun 2021, Pemprov Kaltara telah ditugaskan untuk mendukung penyediaan komoditas pangan, terutama beras, jagung, dan kedelai, bagi kebutuhan IKN. Upaya pengembangan luas tanam dan pengurangan

alih fungsi lahan terus dilakukan untuk mencapai tujuan ini.

"Kami sedang fokus pada pembenahan berbagai aspek untuk memastikan Kaltara dapat berfungsi optimal sebagai pintu masuk IKN," ujar Zainal.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Diana Risawaty, mengatakan, saat ini Pemprov Kaltara tengah fokus berbenah, khususnya dalam peningkatan produksi tanaman pangan.

"Kami berbenah untuk meningkatkan produktivitas pangan di Kaltara. Ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga untuk mendukung ke-



tahanan pangan nasional,” kata Diana, Jumat, 19 Juli 2024.

Diana mengungkapkan, pada lahan pertanian di Kaltara, sering terjadi alih fungsi dari pertanian menjadi perkebunan. Contohnya, Desa Karang Agung dan Desa Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara, yang sebelumnya sangat potensial untuk pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Bulungan, kini telah mengalami penurunan luas tanam karena konversi menjadi kebun kelapa sawit dan lahan ternak kambing serta sapi.

Diana menjelaskan bahwa fenomena ini tidak bisa sepenuhnya dihindari karena petani mencari kehidupan yang lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini, baik Kementerian Pertanian, APBD Kaltara, maupun dinas pertanian kabupaten/kota, bersama-sama memberikan bantuan berupa bibit benih padi unggul, pupuk bersubsidi, dan alat pendukung pertanian lainnya.

“Kami memiliki target untuk meningkatkan luas tanam dengan harapan ada peningkatan produksi. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Peluang pasar untuk pangan masih ada,” jelas Diana.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memberikan bantuan berupa benih unggul dan DPKP Kaltara juga mengadakan Sekolah Lapang Padi setiap musim tanam. Melalui sekolah lapang ini, petani dilatih tentang cara budidaya padi, penanganan hama penyakit, dan pembuatan pupuk organik sendiri.

Diana juga menekankan pentingnya inisiatif ini karena tingginya harga pupuk yang menyulitkan petani. Bantuan ini diharapkan dapat menutupi kekurangan tersebut.

Pemprov Kaltara juga telah menerima bantuan dari Bank Indonesia untuk mengadakan demplot (demonstration plot) guna penanganan intensif budidaya pangan. Dengan insentif ini, diharapkan hasil produksi, khususnya padi sawah dan padi ladang, bisa meningkat dan mendukung ketahanan pangan nasional serta IKN.

“Potensi besar untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung ada di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan. Daerah-daerah ini memiliki potensi besar untuk pengembangan tanaman pangan,” kata Diana.

Pemprov Kaltara juga terus menjalin

kerja sama dengan Kalimantan Timur untuk mendukung kelangsungan pembangunan IKN. Pada awal Januari lalu, Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengungkapkan, sumber energi yang diterima Kaltim hingga kawasan IKN, berasal dari Kaltara.

“Penyuplai sumber energi untuk IKN ada di Kaltara. Apalagi di Provinsi Kaltara sedang dibangun PLTA terbesar di Indonesia. Begitu juga smelter banyak di Kaltara, sehingga kolaborasi pasti dilakukan. Terlebih Kaltara juga merupakan pemekaran dari Kaltim. Artinya, Kaltim tidak mungkin melepaskan kolaborasi. Juga, tidak akan membatasi persoalan administratif untuk mendukung IKN,” katanya.

“Jadi, kedua provinsi ini sudah sejak lama membangun komunikasi. Perhatian bersama adalah bagaimana komunikasi tetap terbangun,” sambungnya.

Akmal mengatakan, saat ini sumber pangan di Kaltim dan IKN masih disuplai dari Pulau Sulawesi, sehingga kebutuhan pangan ini menjadi potensi besar bagi Kaltara untuk mengambil peran sebagai pemasok.

“Tinggal teknisnya bagaimana, tentu harus ada komunikasi yang baik antara Pemprov Kaltim dan Kaltara,” ujarnya. •



BERKAH IKN UNTUK KALTIM

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar rapat koordinasi semua kementerian di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dilaksanakan rutin setiap minggu.



Menurut Akmal, jika saat ini terdapat 34 kementerian di pusat, maka dalam satu tahun akan ada 34 kali rakor di IKN. Rakor juga mengundang para kepala dinas dan pejabat instansi terkait dari seluruh Indonesia.

Bila rencana ini bisa diwujudkan, maka setidaknya Kaltim akan mendapat banyak keuntungan. Sebagian tamu akan bermalam di Samarinda atau Balikpapan. Mereka juga akan mengguna-

kan jasa transportasi dan membeli oleh-oleh khas Kaltim. UMKM pun akan ikut terdampak.

Presiden Jokowi lantas mengatakan sangat layak ekonomi Kaltim tumbuh 7,2 persen. Sebab, selain suntikan APBN melalui pembangunan IKN, mereka juga memiliki Penjabat Gubernur yang menurutnya sangat piawai mengundang uang datang ke daerah ini.

Akmal pun mengaku sangat gembira karena Presiden Jokowi sangat men-

dukung ide yang ia kemukakan. Namun, bagi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, yang terpenting lagi adalah menunaikan seluruh arahan Presiden Jokowi dari pertemuan para gubernur se-Indonesia di Istana Garuda, IKN.

Akmal menguraikan pesan pertama Presiden Jokowi agar para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mampu menyinkronkan seluruh kegiatan pusat di daerah.

"Selain itu, memastikan kabupaten dan kota fokus pada program unggulan/prioritas mereka," ungkap Akmal.

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, para gubernur juga harus mampu mendorong agar semua daerah memiliki spesifikasi terkait rencana masa depan mereka. Dia menjelaskan, Presiden Jokowi sangat berharap terbangun kolaborasi dan sinergi yang baik antara pusat dan daerah dalam menentukan program prioritas pembangunan ke depan.

"Para gubernur diharapkan mampu menjadi orkestrator pembangunan di daerah," lanjut Akmal.

Sebagai informasi, sebelum rapat khusus dengan para gubernur, bertempat di Istana Negara IKN, Presiden Jokowi juga mengundang seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia. Mereka dikumpulkan bersama para gubernur.

"Itulah tadi, mengapa para gubernur dan wali kota/bupati disatukan. Sebagai wakil pusat di daerah, gubernur harus memastikan semua program daerah itu sinkron," ujar Akmal.

Di sisi lain, Akmal mengaku optimistis IKN bakal meningkatkan wisatawan domestik di Kaltim. Namun, untuk mewujudkan itu, Akmal berharap para kepala daerah untuk menjadi duta dengan mempromosikan IKN di wilayahnya.

"Hari ini ada rakor, 514 bupati dan wali kota hadir di IKN, kami ingin mereka



yang hadir itu menjadi duta daerah untuk mempromosikan IKN,” ujar Akmal.

Dia menilai walaupun rakor ini tidak berkaitan dengan rangkaian 17 Agustus, tapi secara umum Presiden Jokowi ingin memperlihatkan kepada seluruh kepala daerah bahwasanya IKN itu siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan 17 Agustus.

“Jadi ini sekaligus menginformasikan kepada seluruh kepala daerah baik bupati maupun wali kota terkait IKN serta menunjukkan IKN itu siap menyelenggarakan peringatan 17 Agustus,” ujar Akmal.

Akmal menambahkan, Kaltim menikmati banyak momentum positif dari kehadiran IKN yang berada di Penajam Paser Utara. Peletakan batu pertama beberapa pembangunan kantor swastakan menguatkan aura positif IKN bagi Kalimantan Timur.

“Bagi kami (Kaltim), IKN ini berkah,” kata Akmal, Senin, 12 Agustus 2024.

Pada hari itu, peresmian pembangunan IKN diawali dari Istana Wakil Presiden oleh Wapres Ma'ruf Amin. Ini merupakan pertama kalinya Wapres Ma'ruf Amin hadir ke IKN dan memimpin dimulainya pembangunan Istana Wakil Presiden di atas lahan 14,8 hektare dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,45 triliun dan lama waktu pengerjaan 450 hari (Mei 2024 hingga Agustus 2025).

Siang harinya, usai memimpin rapat kabinet di Istana Garuda, Presiden Jokowi kemudian melanjutkan dengan meresmikan dimulainya pembangunan kantor PT Intiland, PT BCA, PT Swiss-bell Hotel dan PT RGE di sekitar IKN. Presiden juga meresmikan Taman Kusuma Bangsa.

Akmal pun mengaku sangat sependapat dengan pernyataan Presiden

biasa dari sisi pertumbuhan ekonomi sejak kehadiran IKN Nusantara.

“Sampai hari ini, PDRB per kapita kita lebih besar dari sektor jasa. Mereka yang berkunjung ke Kaltim paling tidak mampir ke Samarinda, tidur di Balikpapan, beli oleh-oleh di PPU,” kata Akmal.

Hal senada disampaikan Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang menyebut peresmian pembangunan Istana



Jokowi agar para pengusaha tidak ragu untuk berinvestasi ke IKN.

“Pemerintah akan membangun semua infrastruktur dasar dan penunjang lainnya bagi investor. Beliau (Presiden Jokowi) mengajak investor masuk dan pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastrukturnya,” beber Akmal.

Kaltim sendiri menerima efek yang luar

Wakil Presiden kian menguatkan tekad pemerintah untuk mewujudkan IKN di Benua Etam.

“Pembangunan Istana Wapres ini lebih meyakinkan kita, bahwa roda ekonomi Kaltim sebagai mitra strategis IKN akan terus berputar, akan semakin memicu pergerakan ekonomi Kaltim,” kata Sri Wahyuni. •



Anggota Bawaslu RI, Puadi PERJUANGAN GURU JADI PENYELENGGARA PEMILU

Perjuangan dari bawah ditempuh Puadi sebagai salah satu bagian dari penyelenggara pemilihan umum di Tanah Air. Memulai karir sebagai guru, kini ia duduk sebagai salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Redaksi INFO INDONESIA berkesempatan mewawancarai Puadi, anggota Bawaslu RI yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Rabu, 31 Juli 2024. INFO INDONESIA mencoba menggali lebih dalam perjuangan yang telah dilaluinya, sehingga bisa duduk di kursi kepemimpinan di Bawaslu RI.

Dari ruang kerjanya, Puadi mengisahkan masa kecilnya mengejar impian, meski dengan banyak ujian. Sedari duduk di sekolah dasar (SD), ia mengaku cukup aktif di organisasi, seperti Pramuka. Saat di sekolah menengah pertama (SMP), ia bahkan ditunjuk sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah (OSIS).

N a -

mun, aktifnya di organisasi membuat nilainya tidak terlalu baik. Nilai EBTANAS Murni atau NEM kala itu yang didapaknya hanya 2,0. Bisa dibayangkan itu adalah nilai paling jelek menurut penilaian Puadi dan membuatnya sulit untuk masuk ke sekolah menengah atas (SMA) negeri yang favorite.

Benar saja, ketika Puadi mendaftarkan diri ke beberapa SMA, ia ditolak karena nilainya terlalu rendah. Salah satu SMA menolak adalah SMA Sukatani di Bekasi. Padahal, SMA tersebut lokasinya tidak jauh dari tempat tinggalnya saat itu. Kira-kira sekitar dua menit berjalan kaki.

"(NEM) 2,0 itu bisa dibilang NEM paling bodoh kali ya, sampai



saya masuk SMA itu nggak diterima, karena NEM-nya kecil,” ujar Puadi diiringi tawanya.

Tidak diterima masuk SMA membuat hatinya rapuh. Puadi memiliki keinginan yang begitu kuat untuk melanjutkan pendidikannya.

Dia menceritakan, biasanya orang tua yang berasal Betawi akan mendaftarkan anaknya ke sekolah pesantren setelah lulus SMP. “Akhirnya saya menangis ingin sekolah. Babeh Almarhum (orang tua Puadi), (memikirkan) bagaimana caranya agar saya harus sekolah,” ungkap Puadi.

Orang tuanya ketika itu berjuang sangat keras agar Puadi bisa bersekolah. Suatu hari, orang tuanya berkonsultasi dengan seorang camat agar bisa berbicara dengan kepala sekolah di Jakarta agar bisa membuka kelas khusus bagi siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah.

“Sehingga dibukalah kelas baru, namanya kelas 1-7. Ini kelas buangan lah, orang bodoh (isinya), karena NEM saya kecil,” kata Puadi.

Setelah bisa bersekolah, Puadi memiliki tekad yang kuat untuk membalas perjuangan orang tuanya dengan beberapa prestasi ketika SMA. Ia mengaku selalu mendapatkan ranking di kelasnya. “Saya buktikan, saya ranking umum, kelas 1, 2, 3, saya ranking terus,” ungkap Puadi.

Setelah lulus SMA sebagai murid berprestasi, pada 1993, Puadi berkuliah di Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta/UNJ). “Allah kasih saya jalan. Saya masuk perguruan tinggi lewat PMDK. Sehingga, saya diterima di IKIP Jakarta tahun 1993,” imbuh Puadi.

Di IKIP Jakarta, Puadi ingin mengambil jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Ketika ‘ngampus’ di IKIP Jakarta, orang tuanya tidak lagi membiayai, karena tidak lagi memiliki uang. Puadi cerita, dirinya merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di sana. Apalagi, Puadi aktif di beberapa organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa

Islam (HMI).

Ibarat rejeki nomplok, Puadi akhirnya memperoleh beasiswa supersemar. Ia mendapatkan uang saku sebesar Rp50 ribu per bulan. Dengan uang itu, ia bisa membayar kuliah dan membiayai kehidupannya sehari-hari.

“Jadi per 6 bulan itu saya dapat uang kalau tidak salah Rp50 ribu (dari supersemar), berarti per 6 bulan Rp300 ribu. 150 kantongin, 150 bayar SPP waktu itu. SPP saya waktu itu Rp150 ribu per 6 bulan,” jelas Puadi.

dari IKIP Jakarta. Karena ketika mahasiswa masih di HMI, ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya membentuk organisasi non pemerintah (NGO) bernama Masyarakat Indonesia Baru.

“Untuk mengaspirasikan keinginan reformasi pada saat itu,” ungkap Puadi.

Selepas itu, Puadi mendapat informasi, IKIP Jakarta mengadakan praktek mengajar. Saat itu, ia praktek mengajar di Labschool Rawamangun. Karena terlalu dekat, ia ditempatkan di SMA 28 Pasar Minggu. Kemudian di penghujung



Setelah berkuliah kurang lebih 5 tahun, tepatnya pada 1998, muncul gerakan demo yang ingin menurunkan rezim Orde Baru. Di satu sisi, Puadi harus menyelesaikan skripsinya. Karena solidaritasnya tinggi, Puadi juga turut ke lapangan untuk berdemo bergabung dengan para mahasiswa yang lainnya untuk menurunkan rezim Orde Baru yang dianggap otoriter.

“Malam kita nyusun skripsi, siangnya disuruh demo,” ungkapnya.

Di akhir 1998, Puadi dinyatakan lulus

1999, Puadi mengajar di SMA 24 yang lokasinya di belakang MPR RI.

“Pertama kali tahun 1999 masuk honor ngajar,” ujar Puadi.

Puadi mengatakan, sebelum mengajar di SMA 24, kepala sekolahnya menyampaikan bahwa honor yang akan diterimanya sebesar Rp100 ribu. Selain itu, kepala sekolah itu juga meminta agar Puadi menjaga para siswa agar tidak terlibat tawuran. Karena tugasnya itu, Puadi mendapat honor tambahan sebesar Rp15 ribu.

• INFO PROFIL

"Jadi sebulan gaji Rp115 ribu. Rp15 ribu itu suruh jagain anak-anak biar nggak tawuran," beber Puadi.

Karena kecintaannya dengan dunia pendidikan, ia tidak mempermasalahkan honor yang didapatkan saat itu. Puadi menjalani tugas sebagai pengajar di SMA 24 dengan penuh riang gembira. Apalagi, ia diminta untuk mengajar PPKn, mata pelajaran yang ia sangat inginkan.

"PPKn kan mengajarkan kedisiplinan, demokrasi, dan sebagaimana. Saya mengajar di SMA 24 itu hampir 2 tahun," jelas Puadi.

Dalam perjalanannya, jam mengajar bagi guru honorer akhirnya dibatasi.

dibandingkan dengan SMA 24.

"Tetap saya jalani," tegas Puadi.

Puadi menjelaskan, ia mengajar di SMA 37 Tebet selama 3 hari dalam seminggu. Karena masih ada waktu kosong, ia mengajar juga di SMA 30 Rawasari selama 3 hari.

"Jadi ngajar lagi tuh, jadi 3 hari di 37 Tebet, 3 hari di SMA 30 Rawasari. Dulu kan Sabtu sempat masuk sampai tahun 2003," imbuh Puadi.

Kemudian, Puadi juga mencoba peruntungan baru dengan mencari lowongan pekerjaan di Koran Pos Kota. Pada saat itu, ada lowongan pekerjaan menjadi tentor di Primagama. Ia pun melamar

liki. "Saya bilang siap," kata Puadi.

Setelah menerima tawaran untuk membuka sekolah musik, Puadi berkoordinasi dengan Purwacaraka. Keduanya bertemu di Taman Budaya Dago, Bandung pada 2003. Di sana sudah dibangun sekolah musik Purwacaraka. Akhirnya, Puadi memutuskan untuk membangun sekolah musik Purwacaraka di Kelapa Gading dan menjadi pimpinan di sana.

Purwacaraka yang ia pimpin berkembang begitu pesat, akhirnya Puadi memutuskan untuk membuka cabang di Buaran dan Cinere, Depok. Atas prestasinya itu, Puadi mendapatkan kesempatan pergi ke Hongkong. Ia mengaku



Puadi pun berhenti dari pekerjaannya karena jam mengajar yang terbatas akibat banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di sana.

Puadi menceritakan, para murid yang mengetahui bahwa dirinya akan keluar dari sekolah melayangkan protes kepada sekolah. "Sempat anak-anak mau demo, saking nggak terimanya," kata Puadi.

Puadi mengatakan, dirinya sempat menemani guru olahraga bernama Fery Sitepuh untuk melatih fisik di sepak bola. Tidak lama kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk mengajar di SMA 37 Tebet. Honor yang ia dapatkan ketika itu sebesar Rp80 ribu. Nilainya lebih kecil

pekerjaan dan diterima untuk mengajar di Primagama Rawamangun. Lagi-lagi, Puadi dipercaya untuk mengajar mata pelajaran PPKn.

"Kan kalau di Primagama boleh ngajar apa aja, saya ngajar PPKn," ujar Puadi.

Selama tiga bulan mengajar di Primagama, Puadi ditawarkan untuk menjadi kepala cabang Primagama Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tidak berselang lama, Puadi mendapatkan tawaran dari investor Primagama untuk membuka sekolah musik "Purwacaraka".

Awalnya, investor menanyakan kesiapannya untuk membuka sekolah musik tersebut. Puadi pun menyanggupinya dengan bekal pengalaman yang ia mi-

tidak memiliki kemampuan dalam bernyanyi apalagi bermain alat musik.

"Mau tidak mau kita harus bisa," terang Puadi.

Kemudian, pada 2012, sedang merintis sekolah musik Purwacaraka, salah satu seniornya menghubunginya untuk mengikuti seleksi panitia pengawas (Panwas). Perintah seniornya itu tidak langsung diindahkan. Puadi merasa tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut. Namun, atas keyakinan yang diberikan seniornya itu, Puadi memberanikan diri untuk menjadi Panwas.

"Akhirnya ikut seleksi 2013 untuk Pemilu 2014," kata Puadi.

Keberuntungan pun tidak selesai

disini, Puadi dinyatakan lolos seleksi sebagai Panwas di Jakarta Barat. Saat itu, Panwas masih ad hoc. Puadi mengaku, seleksi yang dijalaninya begitu ketat. Apalagi, banyak cibiran yang ia terima saat itu dari peserta lainnya.

"Banyak orang yang negatif campaign. Itu orang musk mana bisa jadi pengawas Pemilu. Singkat cerita saya lolos (jadi Panwas) untuk Pemilu 2014," kata Puadi.

Pada saat itu, pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) masih terpisah belum serentak. Setelah Pileg selesai dilanjutkan dengan tahapan Pilpres. Ketika selesai bertugas menjadi Panwas di 2014, Puadi kembali menjalani profesinya sebagai pengajar. Setahun berselang, tepatnya di akhir 2015, Puadi kembali mengikuti seleksi Panwas Kabupaten/Kota Jakarta Barat untuk persiapan Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya ikut tes lagi ternyata lolos," jelas Puadi.

Puadi pun dipercaya untuk menjadi Ketua Panwas Kota Jakarta Barat untuk 2016-2017 pada Pilkada DKI Jakarta. Dalam bertugas, Puadi selalu mengedepankan profesionalitasnya sebagai penyelenggara. Ia pun tidak segan-segan menindak tegas jika ada pelanggaran Pemilu.

"Karena waktu itu divisi yang diampu itu divisi penindakan, waktu itu bukan penanganan tapi penindakan pelanggaran," terang Puadi.

Puadi menceritakan, dirinya pernah menyita sembako yang diangkut 6 truk di Kalideres, 3 truk di Kebun Jeruk, dan 3 truk di Palmerah. Kemudian di 2017 akhir atau awal 2018, Puadi mengikuti seleksi Bawaslu DKI Jakarta periode 2017-2018.

Bermodal pengalaman dan kinerjanya selama menjadi Panwas, ia memberanikan diri untuk maju di tingkat provinsi. Apalagi saat menjadi Panwas, Puadi pernah mendapatkan penghargaan Bawaslu Award.

"Disitulah menjadi modal saya untuk berani menuju ajang di tingkat provinsi," jelas Puadi.

Puadi mengatakan, seleksi yang ia jalani kala itu begitu ketat. Namun, ia tetap percaya bahwa bisa lolos. Alhasil, Puadi dinyatakan lolos sebagai pimpi-

nan Bawaslu DKI Jakarta. Kala itu, pimpinan Bawaslu DKI Jakarta hanya tiga orang, yang terpilih di antaranya Jupri, Siti Khofifah, dan dirinya.

Seiring berjalannya waktu, Puadi mengikuti seleksi Anggota Bawaslu RI. Ia mengakui seleksinya lebih ketat daripada di tingkat provinsi. Karena buah hasil kinerjanya selama menjadi penyelenggara, Puadi dinyatakan lolos sebagai Anggota Bawaslu RI.

"Alhamdulillah Allah memberi jalan, sehingga saya sampai di tingkat Bawa-

kan, seorang pasangan suami-istri harus saling memahami dan memberi support satu sama lain.

"Istri saya paham sekali apa yang dikerjakan suaminya. Begitupun juga suami, harus memahami istrinya sebagai seorang guru, setengah 6 sudah harus jalan," ujar Puadi.

Puadi mengatakan, kesuksesannya selama ini tidak lepas dari peranan dan kehadiran seorang istri. Maka dari itu, Puadi akan selalu menyempatkan waktu luang untuk bersama keluarga.



slu Republik Indonesia," kata Puadi.

Puadi mengaku, mengemban tugas berat sebagai Anggota Bawaslu RI membuatnya sibuk dengan pekerjaan. Terkadang harus bertolak ke daerah untuk melakukan supervisi. Namun, dia mendapatkan dukungan penuh dari keluarga selama ini.

Sebagai pimpinan Bawaslu dan juga kepala keluarga membuat Puadi harus pintar-pintar dalam membagi waktu. Menurut Puadi, kuncinya adalah komunikasi dan perhatian. Puadi mengata-

"Saya begini ini tidak lepas dari doa istri saya tersayang," imbuh Puadi.

Selain itu, Puadi menanggapi isu bahwa dirinya akan kembali maju sebagai Anggota Bawaslu RI pada periodenya berikutnya. Puadi mengatakan, saat ini, ia hanya ingin fokus bekerja dan belum memikirkan hal tersebut.

"Manusia kan hanya merencanakan yang menentukan Allah SWT, kita yang penting punya kemauan yang kuat, Insyaallah nanti ada jalan. Where There is Will, There is Well," tutup Puadi. •

Aprizal Hasyim

JABAT SEKDA, WUJUDKAN PALEMBANG BERSIH, RAPI, INDAH

Aprizal Hasyim kini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang mengisi kekosongan posisi jabatan yang ditinggalkan Ratu Dewa yang memasuki masa purnabakti.

Sebelumnya Aprizal Hasyim menjabat sebagai Kepala Dishub Palembang. Bahkan, ia pernah menjabat Camat dua kali.

Aprizal Hasyim lahir di Tanjung Dayang, 15 April 1974, saat ini memiliki pangkat atau golongan kerja terakhir ruang Pembina Utama Muda / (IV.c) TMT: 01 Oktober 2019, Jabatan Kepala Dinas Perhubungan.

Aprizal Hasyim mulai belajar di SD Negeri 1 Tanjung Dayang 1986 Ogan Komering Ilir, SMP Negeri Meranjat 1989 Ogan Komering Ilir, SMA Negeri 3 Palembang 1993, lanjut S1 Universitas Sjahyakti Palembang 2003, kemudian S2 Universitas Tridianti Palembang 2006.

Riwayat kerja Aprizal Hasyim pernah menjabat sebagai Sekretaris Camat Tanjung Raja Ogan Ilir (2005-2006), Sekretaris Camat Indralaya Utara (2006-2008), bahkan menjabat Camat Rambang Kuang (2008-2010), dan Camat Indralaya Utara (2010-2012).

Selanjutnya, Kepala Bagian Umum dan Protokol Ogan Ilir (2012-2014)- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ogan Ilir (2014-2016)- Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Ogan Ilir (2016-2018)- Kepala Dinas Perikanan Palembang (2018-2021)- Kepala Dinas Perhubungan Palembang-

bang (2021-2024).

Setelah dilantik sebagai Pj Sekda, Aprizal Hasyim berjanji untuk melanjutkan dan menyelesaikan sejumlah program kerja di Palembang yang belum terealisasi.

Ia menyebutkan, masalah utama kota yang harus segera dituntaskan untuk mewujudkan Palembang yang bersih, rapi, dan indah.

"Semua persoalan akan diupayakan selesai. Seluruh pekerjaan rumah Kota Palembang yang belum tuntas, termasuk persoalan banjir, infrastruktur jalan, kemacetan, kemiskinan, dan persampahan," katanya.

Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah kota menurut Aprizal adalah membentuk kolaborasi yang melibatkan seluruh organisasi dan melakukan koordinasi bersama, termasuk dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).

"Kita akan berkoor-

dinasi dengan semua OPD dan mengamankan persepsi untuk mewujudkan Palembang 'Begawe', Palembang Cerdas, dan lain-lain," tutupnya.

Aprizal berjanji melanjutkan dan menyelesaikan sejumlah program kerja di Palembang yang belum terealisasi. Dirinya menyebut empat persoalan kota harus segera dituntaskan untuk mewujudkan Palembang bersih rapi dan indah.

"Semua (persoalan) akan diupayakan selesai. Seluruh PR Kota Palembang yang belum tuntas.

Termasuk persoalan banjir, infrastruktur jalan, kemacetan, kemiskinan dan persampahan," kata dia.

Diketahui, pelantikan Aprizal Hasyim dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Palembang Ukok Abdulrauf Damentayang ber-



tempat di ruang parameswara Pemkot Palembang Kamis (01/08/2024).

PJ Walikota Palembang Ucok Abdulrauf Damenta menjelaskan bahwa pelantikan ini sebagai salah satu mekanisme pengisian kekosongan sementara dalam penyelenggaraan pemerintahan agar pelayanan publik tidak terhambat sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan open bidding jabatan Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Untuk itu, Ucok berharap Kepada Pj Sekda agar secepatnya bergerak cepat dalam bekerja dan menyesuaikan dengan ruang lingkup baru. Ini tugas berat dan pekerjaan rumah untuk membenahi berbagai permasalahan Kota Palembang.

"Tidak akan mungkin dapat kita selesaikan sendiri Oleh karena itu, bangun kolaborasi dan bersinergi bersama jajaran OPD Kota Palembang dari strata bawah hingga pratama maupun madya serta perkuat hubungan dengan forkopimda, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam memberikan yang terbaik kepada Masyarakat Kota Palembang menuju Palembang Begawe, Palembang Disiplin, Palembang Cerdas, Palembang Sehat, Palembang Bersih, dan Palembang Indah," jelasnya.

Dijelaskannya masa jabatan sampai akhir pemilihan kepala daerah mendatang dan telah terpilih Walikota definitif hasil Pilkada Kota Palembang.

"Hal ini juga sampai dengan laporan pertanggung jawaban saya bekerja, sehingga pekerjaannya bisa terus dilanjutkan dan tidak terputus, termasuk bersama dengan Pj Sekda," ulasnya.



"Saya berharap dengan Pj Sekda yang baru dilantik ini ada segera turun kelapang

menyelesaikan semua pekerjaan yang sudah menanti," harapnya. • RY

BIODATA

Nama : APRIZAL HASYIM
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Dayang, 15 April 1974
Pangkat/Golongan kerja terakhir: ruang Pembina Utama Muda / (IV.c) TMT: 01 Oktober 2019 5 Jabatan Kepala Dinas Perhubungan

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri 1 Tanjung Dayang 1986 Ogan Komering Ilir
- SMP Negeri Meranjat 1989 Ogan Komering Ilir
- SMA Negeri 3 Palembang 1993
- S1 Universitas Sjakhyakirti Palembang 2003
- S2 Universitas Tridinanti Palembang 2006

RIWAYAT KERJA

- Sekretaris Camat Tanjung Raja Ogan Ilir (2005-2006)
- Sekretaris Camat Indralaya Utara (2006-2008)
- Camat Rambang Kuang (2008-2010)
- Camat Indralaya Utara (2010-2012)
- Kepala Bagian Umum dan Protokol Ogan Ilir (2012-2014)
- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ogan Ilir (2014-2016)
- Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Ogan Ilir (2016-2018)
- Kepala Dinas Perikanan Palembang (2018-2021)
- Kepala Dinas Perhubungan Palembang (2021-2024)

Alpian Maskoni PEMIMPIN MERAKYAT, JADIKAN PAGAR ALAM KOTA MAJU

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pagar Alam mengejutkan dengan bakal Calon Wali Kota H Alpian Maskoni mengumumkan menggandeng H Safrudin sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota.

Alpian Maskoni adalah tokoh yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan di Kota Pagar Alam.

Dengan dedikasi yang kuat dan visi untuk memajukan kotanya, Alpian Maskoni kembali mencalonkan diri sebagai Walikota Pagar Alam pada pemilihan tahun 2024.

Pria kelahiran 25 Agustus 1970 ini

Universitas Sriwijaya ini mengumumkan secara resmi siapa kandidat yang menjadi pasangannya maju ke Pilkada ini.

Pasangan yang dipilih H Alpian Maskoni yaitu birokrat sejati, mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Pagar Alam selama tujuh tahun yaitu H Safrudin.

"Pemilihan kak Safrudin ini setelah melalui banyak proses dan serta

masukannya dari masyarakat Pagar Alam, saya memutuskan untuk menggandeng kak Safrudin menjadi pasangan saya atau Calon Wakil Wali Kota saya di Pilkada Pagar Alam tahun 2024-2029," katanya.

Sejak awal kariernya, Alpian Maskoni menunjukkan komitmen tinggi dalam pelayanan publik.

Latar belakang pendidikan dan pengalamannya dalam berbagai posisi strategis di pemerintahan membuatnya paham betul akan dinamika dan kebutuhan masyarakat Pagar Alam.

Ia memiliki visi untuk menjadikan Pagar Alam sebagai kota yang lebih maju, dengan infrastruktur yang memadai, pelayanan publik yang efisien, serta kesejahteraan masyarakat yang meningkat.

Dalam kesehariannya, Alpian Maskoni dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan mudah bergaul. Sikapnya yang rendah hati membuatnya

dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, selalu mendengarkan aspirasi warganya, dan berusaha memberikan solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang ada.

Sebelumnya, Pilkada Pagar Alam diramaikan rumor bahwa Alpian Maskoni digadangkan berpasangan dengan M Danu Mirwando atau Yuliansi, dua sosok cukup diperhitungkan di Pilkada 2024.

Menggoyahkan kontestan Pilkada Pagar Alam 2024 lainnya, lulusan S1 Fakultas Hukum



dekat dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga masyarakat umum.

Ia sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa setiap program yang direncanakan berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat nyata bagi warga Pagar Alam.

Selain pejabat publik, Alpien juga Ketua Umum Pengprov IMI Sumsel dan sekaligus pelaku racing. Bahkan pula, seri perdana Kejurda Road Race 2023 IMI Sumsel atas dukungan penuh dirinya hingga digelar di Pagar Alam.

Alpien juga pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (1992-1994), Ketua Gema Kosgoro Palembang (1993), Ketua KNPI Kota Pagar Alam (2010-2013), Ketua DPC Pemuda Pancasila Kota Pagar Alam (2017-sekarang) dan Ketua DPC PKB Kota Pagar Alam.

Alpien Maskoni juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Ia percaya bahwa pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang pembangunan moral dan spiritual masyarakat.

Oleh karena itu, ia selalu mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan berbagai program unggulan yang telah disiapkan, Alpien Maskoni optimis dapat membawa perubahan positif bagi Kota Pagar Alam.

Ia berkomitmen untuk terus bekerja keras dan berkolaborasi dengan

semua pihak demi mewujudkan Pagar Alam yang lebih baik, adil, dan sejahtera.

Dengan dirinya menggandeng H Sa-

orang birokrat yang berpengalaman.

"Saya politisi dan kak Safrudin seorang birokrat sejati yang sudah menjabat tujuh tahun sebagai Sekda Kota



frudin, maka Alpien Maskoni menjadi pasangan yang ideal. Pasalnya dirinya yang merupakan politisi memilih se-

Pagar Alam. Jadi tidak diragukan lagi pengalamannya di birokrasi," ujarnya.

• IRY

BIODATA

Nama : Alpien Maskoni
Tempat Tanggal Lahir : Pagar Alam, 25 Agustus 1970
Istri : Rachma Hareni Noor
Anak : 2
Parpol : NasDem

PENDIDIKAN

- Lulus SD Negeri 24 Jambatan Akar, Pagar Alam (1977-1983)
- Lulus SMP Xaverius Pagar Alam (1983-1986)
- Lulus SMA Methodist Palembang (1986-1989)
- Lulus S-1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (1990-1995)

ORGANISASI

- Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (1992-1994)
- Ketua Gema Kosgoro Palembang (1993)
- Ketua KNPI Kota Pagar Alam (2010-2013)
- Ketua DPC Pemuda Pancasila Kota Pagar Alam (2017-sekarang)
- Ketua DPC PKB Kota Pagar Alam (-2021)

KARIER

- Pengacara di YLBHI Lampung (1997-2001)
- Justice for the Poor di Bank Dunia (2003-2008)
- Anggota DPRD Kota Pagaralam (2009-2014, 2014-2018)
- Wali Kota Pagar Alam (2018-sekarang)

M Iqbal Alisyahbana PJ BUPATI OKU, BERPRESTASI DAN BERTANGGUNG JAWAB

M Iqbal Alisyahbana resmi menjabat Pj Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) menggantikan H Teddy Meilwansyah, dilantik langsung oleh Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

Pelantikan Pj Bupati OKU M Iqbal Alisyahbana berlangsung di Griya Agung Palembang pada Minggu 11 Agustus 2024.

Diketahui, sebelum dilantik menjadi Pj Bupati OKU, M Iqbal Alisyahbana menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Sumsel.

Selain pernah menjabat sebagai

2007, Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat.

Bahkan, melanjutkan Pasca Sarjana - Universitas Tridinanti Palembang 2010, Magister Manajemen.

Keseharian Iqbal bertugas menjadi Kalaksa BPBD Sumsel menjalani tugasnya penuh tanggung jawab dan serius.

Bahkan, Iqbal Alisyahbana tak per-

08 Mei 1985 ini sangat menghargai rekan kerja maupun bawahannya, dan juga sangat terbuka dengan wartawan.

Iqbal mengenyam pendidikan di SDN 8 Sekayu dan melanjutkan ke SLTP Muhammadiyah Sekayu hingga Madrasah Aliyah Negeri Sekayu.

Iqbal merupakan lulusan Diploma IV - Institut Pemerintahan Dalam Negeri - 2007 - Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pasca Sarjana - Universitas Tridinanti Palembang - 2010 - Magister Manajemen.

Tak hanya itu, Iqbal Alisyahbana ramah terhadap awak media. Ia menyempatkan waktunya kapan pun untuk wawancara. Bahkan, saat di telepon saja, ia menyempatkan untuk mengangkatnya demi memberi informasi.

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi saat melantik Iqbal Alisyahbana memberikan beberapa pesan atau amanat yang



Kepala Pelaksana BPBD Sumsel. Bahkan, Iqbal Alisyahbana juga pernah menjadi bawahan Teddy Meilwansyah di Biro Humas Protokol setda Provinsi Sumsel.

Berdasarkan informasi, tepatnya di zaman Gubernur Alex Noerdin periode kedua, yang mana Teddy saat itu masih menjabat Karo Humas Protokol.

Diketahui, Iqbal Alisyahbana seorang putra daerah asal Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dari SD hingga SMA ia sekolah di Sekayu.

Meski dari Sekayu, ia berhasil melanjutkan pendidikan Diploma IV - Institut Pemerintahan Dalam Negeri

nah absen dalam satu kegiatan apapun atau program mengenai BPBD.

Selain itu, sosok pria kelahiran Palembang,



harus dijalankan.

"Saya pesankan kepada Iqbal Alisyahbana untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya, tantangan saudara Iqbal mewujudkan capaian Kabupaten OKU lebih baik lagi," katanya.

Dijelaskan Elen Setiadi, capaian OKU berhasil menekan angka stunting, tingkat kemiskinan ekstrem dibawah Sumsel.

"Begitu juga inflasi serta pertumbuhan ekonomi lebih baik. Terima kasih Pak Teddy. Semoga saudara Iqbal dapat menjalankan lebih baik dari sebelumnya," jelasnya.

Kendati itu, Elen Setiadi juga berpesan kepada Iqbal Alisyahbana agar menyukseskan pesta demokrasi mendatang.

"Para ASN harap menjaga netralitasnya, tidak ikut serta berkampanye. Bagi TNI dan POLRI juga diharapkan netralitas dan menjaga pesta demokrasi berjalan tertib, aman, dan sukses," tutupnya.

Sementara, Iqbal Alisyahbana mengatakan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas yang diberikan dalam menjabat Pj Bupati Ogan Komering Ulu (OKU).

"Seperti menjaga inflasi, menekan kemiskinan ekstrem, dan lainnya sesuai yang dipesankan tadi. Tentu



program yang berjalan akan saya maksimalkan," jelasnya.

Awal menjabat sebagai Pj Bupati OKU, M Iqbal Alisyahbana akan melakukan beberapa hal prioritas.

M Iqbal Alisyahbana mengatakan bahwa pertama ia akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda Kabupaten OKU.

"Tentunya saya akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda terlebih dahulu," katanya.

Lanjut Iqbal, selain itu program yang berjalan akan dipertajam lagi.

"Tentunya melanjutkan program yang sudah berjalan. Untuk program apa yang menjadi kendala, saya akan pertajam lagi," tutupnya. •

BIODATA

Nama : Muhammad Iqbal Alisyahbana
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 08 Mei 1985
Istri : Vina Aprilia Sera'i

PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar - SDN 8 Sekayu
- Sekolah Menengah Pertama - SLTP Muhammadiyah Sekayu
- Sekolah Menengah Atas - Madrasah Aliyah Negeri Sekayu
- Diploma IV - Institut Pemerintahan Dalam Negeri - 2007 - Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat

- Pasca Sarjana - Universitas Tridinanti Palembang - 2010 - Magister Manajemen

KARIER

- Pemkab Musi Banyuasin
- Pemda Muba
- Staf Biro Pemerintahan di Pemprov Sumatera Selatan
- Staf di Biro Humas & Protokol Pemprov Sumatera Selatan
- Biro Kesra Setda Prov Sumatera Selatan
- Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Selatan
- Pj Bupati Ogan Komering Ulu (OKU)

Baharudin

AKTIVIS 98 TERJUN KE POLITIK DEMI SEJAHTERAKAN UMAT

Bakal calon Wakil Wali Kota (Bacawawako) Palembang Pilkada 2024, Ir H Baharudin MM adalah aktivis 98 sejak kuliah sengaja terjun ke dunia politik agar bisa menjadi pemimpin yang mampu mensejahterakan umat.

Akrab disapa Kak Bahar lahir di Palembang 27 Maret 1968, awalnya mahasiswa di Taman Siswa salah satu aktor atau aktivis 98 yang ikut berperan merobohkan rezim Soeharto tepatnya pada 21 Mei 1998 silam. Dari sana Baharudin tertarik terjun ke dunia politik karena bercita-cita kelak ingin menjadi pemimpin yang nantinya bisa amanah

sebagai Ketua DPC PK Ilir Timur I masa jabatan 1999 sampai 2000 dan menjabat Ketua Bidang Organisasi DPW PKS Sumsel tahun 2001.

Loyalitas Baharudin kepada partai sangat tinggi sampai PK berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada tahun 2002, ia tetap tidak berganti perahu ke partai lainnya.

Bahkan di era itu, Baharudin sempat

bagai Ketua Bidang Generasi Muda dan Profesi DPW PKS Sumsel 2005-2010, Ketua Bidang Equintek DPW PKS Sumsel 2006-2020 dan sekarang menjabat sebagai Ketua DPD PKS Palembang 2020-2025.

"Saya menjadi anggota DPRD Sumsel tahun 2004 sampai 2008 itu pertama dan terakhir. Selanjutnya saya konsen mengurus partai mengutamakan kader terlebih lagi setelah menjadi Ketua DPD PKS



untuk umat.

Langkah pertama karir di dunia politik awalnya Baharudin bergabung dalam sebuah organisasi politik bernama Partai Keadilan atau PK tepat organisasi itu dilahirkan tanggal 20 Juli 1998. Di era itu para aktivis atau mahasiswa memang banyak masuk ke PK untuk berjuang demi tetap bisa menghembuskan nafas demokrasi di Indonesia.

Lalu tahun 1999 Baharudin langsung dipercaya oleh kader menjabat

menjadi anggota DPRD Sumsel periode 2004-2009 dari fraksi PKS. Dia pun menjabat seba-



Palembang,”kata Baharuddin.

Alhasil karena dirinya tidak memikirkan kepentingan pribadi dengan mencalonkan lagi sebagai calon legislatif (caleg) di Pilkada 2024. Dia pun dilirik sebagai calon ideal untuk Wali Kota Palembang atau Wakil Wali Kota Palembang 2024 yang akan diusung oleh PKS.

“Kemudian ada keputusan Musda kader PKS harus jadi kepala daerah mau Wali Kota atau Wakil Wali Kota. Dari 5 tokoh di PKS mengerucut jadi 1 orang terpilih lah saya sekarang dari PKS maju sebagai calon Wakil Wali Kota Palembang bersama Yudha calon Wali Kota Palembang yang diusung partai Demokrat,”ungkapnya.

Uniknya Baharudin sempat dilarang sang istri Tri Sinarti SE M Si dan kelima anaknya maju sebagai calon Wakil Wali Kota Palembang yang diusung PKS. Dia bercerita keluarganya meminta agar dirinya menolak secara sopan keinginan partai mengusungnya maju di Pilwakot 2024.

Karena rasa cinta dan rasa sayang keluarga yang khawatir sang ayah akan bernasib sama seperti pejabat-pejabat keinginan masuk ke dalam hotel pro-deo. Lantaran keluarga sering melihat di media banyak kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi berakhir naas mendekam dalam sel tahanan.

“Kata anak saya Abi lihat sekarang banyak kepala daerah masuk penjara. Jadi saya jelaskan politik itu tergantung orangnya kalau politik bersih pasti aman. Akhirnya istri dan kelima anak saya sekarang memberikan dukungan. Cita-cita saya mau menjadi pemimpin

yang bisa sejahterakan umat seperti visi dan misi PKS,”jelasnya.

Dia bersama Ketua DPC Demokrat Yudha Pratomo Mahyudin maju di Pilwakot 2024 meminta doa restu agar YudhaBahar menang.

YudhaBahar mengusung tagline Era Baru Palembang Maju demi kesejahteraan semua masyarakat Palembang. Visi dan misi YudhaBahar mengatasi masalah ekonomi, pengangguran, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan.

Bagaimana membuat Palembang maju dan menjadi kota modern? Bahar menjawab akan mengatasi persoalan itu untuk mewujudkannya.

“Wujudkan Palembang modern kita akan membuat transportasi khusus sungai

terhubung dengan jalur darat. Baik itu kapal tipe bus angkutan sungai membuat arus lalu lintas di darat lancar tidak menumpuk tidak lagi ada macet di Palembang. Banjir juga kita akan atasi semua itu kami jamin bisa diwujudkan. Bahkan di tengah kota akan kita buat kereta api warga tidak usah lagi pakai kendaraan jalurnya berputar-putar di tengah kota biar lalu lintas benar-benar lancar,” tuturnya.

Dari semua visi dan misi serta era baru Palembang maju dengan konsep modern itu disebutkannya bisa dicapai 3 tahun. Namun dia berharap warga Palembang memberikan kepercayaan kepada YudhaBahar.

“Pilih YudhaBahar kita akan wujudkan Era Baru Palembang Maju,” pungkasnya. •



BIODATA

Nama : Ir H Baharudin MM
TTL : Palembang 27 Maret 1968
Agama : Islam
Hobi : Memasak, Mancing dan Tenis Meja
Istri : Tri Sinarti SE M Si
Anak 5 : Aliyah Nafilah SAB
M Syahid Kholid SH
Rumaisa Salsabila
Qisti Fatiyyah
M. Zidan Al-Farisi

PENDIDIKAN

- SD Negeri Pangkalan Balai
- SMP Negeri 1 Pangkalan Balai 1985
- STM Negeri 2 Palembang 1988
- S1 Universitas Taman Siswa 1993
- S2 Universitas Bina Darma 2006

KARIER

- Anggota DPRD Sumsel periode 2004-2009
- Ketua Bidang Generasi Muda dan Profesi DPW PKS Sumsel 2005-2010
- Ketua Bidang Equintek DPW PKS Sumsel 2006-2020
- Ketua DPD PKS Palembang 2020-2025

Yudha Pratomo Mahyuddin USUNG PERUBAHAN ERA BARU PALEMBANG MAJU

Bakal calon Wali Kota Palembang Yudha Pratomo Mahyuddin S.T, M.Sc. Ph D atau YPM mengusung perubahan untuk era baru Palembang maju di Pilwakt Kot Palembang 2024.

Pria kelahiran Palembang 20 April 1979 ini, notabene bukan dari pemerintahan atau petahana seperti dua calon lawannya, yakni Ratu Dewa sebagai mantan Pj Wali Kota Palembang dan Fitrianti Agustinda atau Finda dua periode menjabat sebagai Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang.

Dengan alasan itulah YPM melihat dan menilai banyak kekurangan yang belum dilakukan pemerintahan selama ini, khususnya kesejahteraan warga Palembang padahal ibu kota Sumsel tetapi masih memperhatikan banyak penduduknya berada dibawah garis kemiskinan.

Pria dikenal dermawan,

sopan dan murah senyum ini mengusung perubahan ingin melihat warga Palembang lebih sejahtera dibandingkan apa yang dia lihat selama ini.

Ketua



DPC Partai Demokrat Palembang ini, berharap perekonomian masyarakat membaik dengan rela maju sebagai bakal calon wali kota Palembang. YPM pun akhirnya memenuhi syarat minimal dukungan kursi DPRD Palembang 10 kursi dan maju Pilwalkot Palembang 2024.

Dengan bergabungnya PKS yang memiliki 5 kursi ditambah Partai Demokrat yang meraih kursi 6 di DPRD Palembang maka dia telah mengumpulkan 11 kursi.

YPM didampingi Baharudin Ketua DPD PKS maju dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang dalam Pilkada 2024 mengusung tagline Era Baru Palembang Maju. Pasangan YudhaBahar satu-satunya kontestan di Pilwakot Palembang pertama menggelar deklarasi di bawah Jembatan Ampera 27 Juli 2024.

"Kenapa saya tidak deklarasi di hotel saja, kenapa harus di bawah jembatan Ampera? Jawabannya karena di sini tempat roda perekonomian Palembang berputar. Saya ingin deklarasi disini agar kedepannya bisa sejahterakan kehidupan masyarakat di era Baru Palembang Maju,"kata dia.

YPM menyebutkan Jembatan Ampera bukan hanya ikon kota Palembang juga melambangkan potret warga Palembang baik dari sudut ekonomi dan banyak warga miskin pun berjuang untuk hidup mencari rezeki di bawah Jembatan Ampera.

"Visi dan misi kedepannya ingin menjamin kesejahteraan masyarakat Palembang baik dari sektor entrepreneur, UMK dan lainnya" ucap Fektor Universitas Sumatera Selatan ini.

CEO PT Jaring Maya Sriwijaya (JAMAS) mengaku sebenarnya tidak ingin maju! Tetapi banyaknya dukungan mendorongnya maju terlebih inisiator komunitas Palembang MAJU didirikannya pada tahun 2017 sampai sekarang agar visi misinya dapat terwujud.

Lalu keinginan melihat Palembang maju itulah membuat YPM rela untuk bertarung di Pilkada 2024. Dia pun menyebutkan bahkan rela mengeluarkan kocek sendiri tanpa menggunakan dana lain. Dia sengaja melakukan itu tidak ingin menggunakan dana umat berujung dosa besar. Disebutnya sep-

erti kontestan lain menaikan elektabilitas dengan fasilitas negara sebagai petahana.

"Semoga apa yang saya lakukan akan berkah untuk kita semua,"tuturnya

Yudha Pratomo adalah putra kedua dari Prof dr H Mahyuddin Ns SpOG(K) dan Hj. Halipah Amin, SpTHT, MM. Pendiri komunitas Palembang MAJU, sebuah komunitas yang bertujuan menggalang partisipasi masyarakat untuk membangun kota Palembang.

Yudha juga merupakan putra kedua mantan Wakil Gubernur Sumsel, Mahyuddin yang menjabat pada periode 2003-2008. Pada 7 Juli 2008, Mahyuddin menjabat sebagai Gubernur Sumsel menggantikan Syahril Oesman yang tersandung kasus hukum hingga jabatan berakhir pada 7 November 2008 lalu.

Istrinya seorang dokter di rumah sakit umum bernama dr. Ariesti Karmila, Sp.A, M.Kes., Ph.D. Lulusan Pendidikan



• INFO PROFIL

S3 melalui beasiswa Fulbright di Michigan State University Amerika Serikat. Istrinya juga mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Mereka memiliki tiga anak Aliyah Zafira Pratomo, Arjuna Makhdar Pratomo, dan Ardho Panji Pratomo.

Sedangkan untuk pengalaman berorganisasi bukan hanya didapatkan saat menjadi kader Demokrat. YPM memiliki rentetan pengalaman organisasi berjibun banyaknya semenjak berseragam putih abu-abu.

2002 - 2003, Ketua Bidang dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Sumsel, 2006 - 2011.

Kemudian Wakil Ketua, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumsel, 2008 - 2011, Koordinator Wilayah Sumbagsel, Asosiasi Pengusaha Jasa Penyelenggara Internet Indonesia (APJII), 2008 - 2011, Ketua Umum, Karang Taruna Provinsi Sumsel, 2008 - 2013, Ketua Umum, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumsel, 2013 - 2016 dan Inisiator Komunitas Palembang

- Mawadi Yahya. Herman, Dodi Reza Alex - Giri Ramandha Kiemas, Ishak Mekki - Yudha Pratomo Mahyudin dan Aswari Rivai - Muhammad Irvansyah.

Tidak hanya urusan politik di dunia pendidikan YPM diantara kontestan lain memiliki jenjang paling tinggi. YPM bersekolah di SMA Taruna Nusantara di Magelang dan dilanjutkan S1 jurusan Teknik Elektro ITB Bandung mendapatkan gelar ST. Bahkan dia mengejar ilmu sampai ke luar negeri untuk S2 YPM kuliah di University of Surrey di



YPM di SMA Taruna Nusantara Magelang menjabat sebagai ketua OSIS tahun 1996 - 1997, Anggota Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) ITB, 1997 - 2002 dan setelah tamat menjadi Presiden Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (IKASTARA) tahun 1999 - 2001.

Selanjutnya Asisten Laboratorium Komponen dan Elektronika, Jurusan Elektro ITB, 2000 - 2001, Kepala Riset Divisi Workshop Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro ITB, 2000 - 2001, Wakil Ketua Perhimpunan Mahasiswa Bumi Sriwijaya - ITB, 2001 - 2002, Wakil Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) - Guildford, United Kingdom,

MAJU (2017 - sekarang).

Bahkan untuk urusan politik YPM pernah maju ke gelanggang pertempuran Pilgub Sumsel saat itu pasangan Ishak Mekki - Yudha Pratomo Mahyudin mendeklarasikan diri untuk maju dalam perhelatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Sumsel tahun 2018. Mereka merupakan pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke KPU Sumsel dengan diusung tiga partai, yaitu Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Saat itu ada empat kontestan di Pilgub Sumsel 2018 yaitu, Herman Deru

Inggris mendapatkan gelar MSc dan S3 menempuhnya di University Teknologi Malaysia di Johor.

Dengan rentetan pendidikan tinggi itu YPM bukan hanya politisi biasa dia juga dikenal sebagai seorang konsultan, dosen, rektor dan tokoh penggiat teknologi.

YPM pun memiliki rentetan pekerjaan lain di luar kesibukannya di parpol sebagai Dosen Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya, Chairman & CEO PT. ELNUS yang bergerak di bidang teknologi informasi, CEO PT. Jaring Maya Sriwijaya (JAMAS) yang bergerak di bidang riset

dan konsultan dan Rektor Universitas Sumatera Selatan.

Walaupun Diremehkan! YPM Optimis Bisa Menang di Pilwakot Palembang 2024

Maju di Pilwakot Palembang YPM menyadari banyak sekali keraguan yang juga didapatkan oleh pasangan YudhaBahar. Hal itu efek dari elektabilitas yang dibawah dari kontestan lain.

Terlebih lagi dia berpasangan dengan Baharudin juga tidak terlalu populer dari para calon wakil wali kota lawannya seperti nama Prima Salam wakil dari Ratu Dewa dan Nandriani Octarina wakil dari Fitrianti Agustinda.

Elektabilitasnya pun kalah tersohor dari dua pertahan yang menjadi lawannya Ratu Dewa Pj Wali Kota Palembang dan Fitrianti Agustinda mantan Wawako Palembang dua periode.

"Saya tahu elektabilitas kita jauh dari lawan lainnya. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin politik itu dinamis cenderung berubah-berubah kedepannya,"ucapnya

YPM optimis dengan kekuatan mesin partai Demokrat dan PKS akan berdampak pasangan YudhaBahar menang di Pilwakot Palembang 2024 walaupun di pandang sebelah mata dari hasil survei elektabilitas.

"Elektabilitas kita dibawah tetapi saya tetap optimis bisa memenangkan Pilwakot Palembang 2024. Terpenting kami berusaha maksimal dan mempercayakan juga kepada masyarakat Palembang,"pungkasnya. •IRY



BIODATA

Nama : Yudha Pratomo
Mahyuddin S.T, M.Sc.Ph D
Tempat Tanggal Lahir : Palembang 20 April 1979
Agama : Islam
Istri : dr. Ariesti Karmila, Sp.A, M.Kes, Ph.D.
Anak : Aliyah Zafira Pratomo
Arjuna Makhdar Pratomo
Ardho Panji Pratomo

PENDIDIKAN

- SD Negeri 77 Palembang
- SMP Negeri 1 Palembang
- SMA Taruna Nusantara, Magelang
- S-1 (S.T.) Teknik Elektro ITB, Bandung
- S-2 (M.Sc.) University of Surrey, Inggris

- S-3 (Ph.D.) Universiti Teknologi Malaysia, Johor

KARIER

- Dosen Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya
- Chairman & CEO PT. ELNUS yang bergerak di bidang teknologi informasi
- CEO PT. Jaring Maya Sriwijaya (JAMAS) yang bergerak di bidang riset dan konsultan
- Rektor Universitas Sumatera Selatan
- Perjalanan politik
- Calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan (mendampingi Ishak Mekki di Pilkada Sumatera Selatan 2018)
- Ketua DPC Demokrat Palembang periode 2022 - 2027
- Calon Walikota Palembang 2024

Alfi Novtriansyah Rustam

PRIHATIN DENGAN BANYUASIN, RELA MENGABDIKAN DIRI

Bakal calon Wakil Bupati Banyuasin Alfi Novtriansyah Rustam sangat prihatin melihat kondisi Banyuasin membuatnya rela mengabdikan dirinya untuk masyarakat.

"Karena sangat prihatin dengan kondisi Banyuasin. Kalau saya secara pribadi melihat Banyuasin itu seperti daerah tertinggal,"kata Alfi Rustam

Dirinya mengaku kecewa melihat kondisi Banyuasin tidak jauh dari kota Palembang tetapi malah bisa menjadi

Banyuasin di Pilkada Banyuasin 2024. Alfi Rustam berjanji apabila terpilih akan mengabdikan dirinya kepada masyarakat Banyuasin.

"Pilih kami Slamet Somosentono dan Alfi Rustam disingkat SELFIE apabila menang akan kita ubah Banyuasin tidak lagi menjadi seperti itu,"tegasnya.

Alfi Rustam menceritakan sekilas kehidupannya bisa terjun ke dunia politik. Dia asli warga Palembang dan tinggal di Bandung karena kuliah di Universitas Katolik Parahyangan. Dia kemudian terlibat dalam sebuah organisasi Jaringan Nusantara (JN) menjadi pengurus pada tahun 2004.

"Karena JN bergerak di teknologi kami jadi masuk ke pemerintahan untuk bisnis. Sebab IT saat itu sulit diterima makanya kami masuk ke pengambil kebijakan baik bertemu kementerian dan dirjen,"ucapnya.

Dari sana Alfi Rustam sempat menjadi tim sukses SBY setelah menang dijadikan staf ahli di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di era SBY. Dilanjutkannya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal itu untuk meningkatkan kapasitas daerah untuk lepas dari status tertinggal.

"Itu sudah 15 tahun lalu sekitar tahun 2009 dari sana saya banyak pa-

daerah tertinggal. Dia melihat seakan-akan Banyuasin seperti kawasan pelosok.

"Banyuasin yang dekat dengan kota Palembang tidak ada air jalan banyak rusak coba kok bisa seperti itu,"ucapnya kesal.

Berangkat dari alasan itu membuatnya bersedia maju mendampingi Slamet Somosentono bakal calon Bupati





ham bagaimana meningkatkan kapasitas daerah tertinggal. Datang ke daerah pelosok bertemu Bupati disana dan mereka meminta bantuan program dan diskusi,"tuturnya.

Rupanya Alfi ini merupakan adik kandung dari Penjabat Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam SH dan sebelumnya sudah menjajal politik Sumsel melalui DPR RI dapil II.

Saat itu Alfi maju dalam Pileg DPR RI melalui Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan (dapil) Sumsel II yaitu Kabupaten Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir periode 2019 - 2024, namun semua itu juga belum berhasil.

Kemudian maju kembali dalam Pileg DPR RI Dapil II 2024 - 2029 melalui Partai Demokrat akan tetapi kembali gagal bersaing dengan kandidat partai Demokrat lainnya seperti Wahyu Sanjaya.

Alfi Rustam menyebutkan tagline SELF I adalah Banyuasin Maju Berkilau akan dipersembahkannya kepada masyarakat Banyuasin apabila terpilih. Dia akan membawa Banyuasin mulai dari proses bangkit dari kondisi daerah

tertinggal, maju dan menjadi Banyuasin Maju Berkilau.

"Saya janji akan membawa Banyuasin Maju Berkilau,"tuturnya.

Proses bangkit SELF I akan membangun infrastruktur agar masyarakat bisa menikmati air bersih dan jalan tidak rusak. Selanjutnya proses maju berkilau SELF I akan membuat beragam destinasi agar Banyuasin dilirik wisatawan

Banyuasin punya segudang potensi. Dengan seperti itu kita bisa mewujudkan Banyuasin Maju Berkilau,"jelasnya

Untuk kendaraan politik SELF I telah mendapat koalisi besar enam partai terdiri dari Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, NasDem dan PKB. Dengan kendaraan besar itu Alfi Rustam optimis bisa memenangkan pertarungan di Pilkada Banyuasin 2024.



baik dari Palembang atau dari luar Sumsel.

"Banyak destinasi akan kita buat seperti destinasi makanan, hobi dan wisata keluarga. Biar perlu kita buat lapangan golf yang tidak bisa dibuat di Palembang agar orang-orang disana datang ke Banyuasin. Karena sebenarnya

"Kami sebut koalisi ini adalah koalisi KIM Plus! Karena ada koalisi besar pemenang Pilpres bergabung dengan koalisi Pilpres lain. Maknanya dengan itu kita optimis bisa memenangkan pertarungan terpenting dukung dari masyarakat Banyuasin," pungkasnya.

• IRY



PANAS PILKADA JATENG, PERTARUNGAN JENDERAL VS JENDERAL

Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) kian "memanas", perebutan kursi orang nomor satu tersebut melibatkan dua jenderal besar.

Munculnya nama dua jenderal tersebut adalah Komjen Pol Ahmad Luthfi dan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

Siapa yang tidak mengenal kedua jenderal tersebut, bukan hanya karier mereka yang cemerlang di bidang kepolisian dan militer, tetapi juga karena potensi mereka untuk membawa perubahan dalam pemerintahan daerah.

Ahmad Luthfi sendiri sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia untuk maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jateng 2024.

Sedangkan Andika Perkasa akan diusung PDIP, meski masih ada bayang-bayang nama Hendrar Prihadi atau Hendi yang disebut bakal maju.

Peluang Ahmad Luthfi bahkan sudah terbuka lebar akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), juga diusung oleh Partai Gerindra. Sedangkan untuk calon pendamping masih dalam proses komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Dikatakan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam politik banyak kemungkinan yang terjadi, meski saat ini PKB masih mendorong Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jateng Yusuf Chodlori atau Gus Yusuf.

Hanya saja, dia mengaku tidak memperlakukan jika ada partai lain yang akan mendukung calon berbeda.

"Dalam politik banyak kemungkinan dan opsi yang akan terbuka, tentunya harus ada





pembicaraan secara bersama-sama," katanya.

Termasuk KIM yang kemungkinan akan menyandingkan Ahmad Luthfi dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

"Untuk Jawa Tengah Gus Yusuf tetap kita dorong untuk maju gubernur di Jawa Tengah. (Kalau KIM mengusung Ahmad Luthfi-Kaesang), enggak ada masalah, enggak ada masalah," ucapnya.

Dalam pengambilan keputusan, diakui Jazilul pihaknya akan melihat dinamika dan perkembangan lebih lanjut. Terlebih lagi, PKB memberikan tugas kepada Gus Yusuf untuk berkoordinasi dengan partai-partai politik lain. PKB juga terus membuka komunikasi dengan partai-partai politik lainnya.

"Sampai terbentuknya atau diputuskannya siapa calon gubernur atau wakil gubernur. Atau setidaknya sampai DPP haqqul yaqin bahwa Gus Yusuf enggak bisa maju," jelasnya.

Sedangkan PDIP saat ini masih mempertimbangkan akan mengusung mantan Panglima TNI, Andika Perkasa sebagai Cagub Jateng 2024. Menurut Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, ada peluang Andika Perkasa untuk melawan Ahmad Luthfi.

"Saya kira iya," katanya.

Namun, Ganjar menegaskan dalam pertimbangan untuk mengusung Andika Perkasa maju Pilgub Jateng 2024 bukan untuk menandingi latar belakang Ahmad Luthfi sebagai sesama



Dalam politik banyak kemungkinan dan opsi yang akan terbuka, tentunya harus ada pembicaraan secara bersama-sama.

aparatus penegak hukum.

"Bukan karena ada background itu yang menjadi pertimbangan utama, karena Pak Andika adalah kader PDIP," tegasnya.

Meski demikian, Ganjar tetap memberikan peluang bagi Andika untuk menentukan karier politiknya di PDIP. Meski dia mengakui dengan Andika

Maju di Pilgub Jateng 2024 akan menjadi pertarungan yang menarik.

"Nanti partai memutuskan, Pak Andika oke mendapatkan penugasan itu. Mungkin akan sangat menarik, tapi kita belum tahu apakah nantinya keputusan akan mengarah kesana," ulasnya.

Munculnya nama Andika perkasa disambut positif dari Ketua Pemenangan Pemilu DPP Golkar Wilayah Jawa Tengah-DIY, Iqbal Wibisono.

"Artinya Pak Ahmad Luthfi punya pesaing, kita akan lebih melaksanakan kebersamaan dalam memenangkan Pilkada itu," tegasnya.

Potensi Ahmad Luthfi, lanjut Iqbal melawan Andika Perkasa bisa saja terjadi dan bisa tidak mengingat calon pasti belum resmi diusung.

Untuk Pilkada Jateng, kata dia, masih ada kesempatan untuk sosok-sosok yang punya potensi untuk mengabdikan diri dan harus disambut dengan baik.

Golkar sendiri tidak menutup bila calonnya hanya satu, terlebih setiap partai politik minimal harus mengusulkan dan mendukung satu pasangan.

"Kalau Pak Ahmad Luthfi dan partai pengusung sekarang memang sedang membicarakan siapa calon wakil yang akan mendampingi Misal Gus Yasin, Mas Kaesang dan juga tokoh-tokoh lain," tutupnya. •

PETAHANA TAK MUNDUR, LAWAN KUAT BOBBY NASUTION

Setelah sempat diprediksi akan melawan kotak kosong, Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution nyatanya harus menghadapi petahana Edy Rahmayadi.

Meskipun Koalisi Indonesia Maju (KIM) merapat ke Bobby Nasution, tidak membuat Edy Rahmayadi mundur.

Edy menjadi satu-satunya kandidat kuat lawan menantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Bahkan, baru-baru ini Edy resmi mendapat dukungan dari PDIP untuk bertarung lagi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2024 lawan Bobby Nasution.

Bahkan, dari hasil survey keduanya masih saling kejar untuk menduduki kursi nomor satu di Sumut tersebut.

Menilik hasil survey dari LSI, hanya Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi yang menjadi pesaing ketat dalam Pilgub Sumut 2024. Dalam pernyataan top of mind, Bobby Nasution memiliki tingkat elektabilitas sebesar 34,2 persen.

Sementara itu, Edy Rahmayadi menempati posisi kedua dengan elektabilitas 15,1 persen.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, dalam rilis bertajuk 'Peta Pilkada Menjelang Pendaftaran: Siapa Unggul di Sumatera Utara', secara daring pada Minggu 28 Juli 2024.

"Dimulai dari pertan-

yaan top of mind, di sini kita lihat untuk sementara yang unggul adalah Bobby Nasution dengan 34 persen, disusul oleh Edy Rahmayadi 15,1 persen," ungkap Djayadi.

Djayadi menyebut nama-nama lain masih memiliki tingkat elektabilitas di bawah 10 persen.

Misalnya Musa Rajekshah (4,0 persen), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (3,3 persen), Darma Wijaya (1,1 persen), dan Nikson Nababan (1,0 persen).

"Jadi, kalau kita lihat dari top of mindnya ada dua nama yang memuncaki pertarungan yaitu Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi," ujar Djayadi.

Sementara itu, dalam pertanyaan simulasi semi terbuka 23 nama, nama Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi masih menempati posisi teratas.

Bobby meraih elektabilitas sebesar 41,2 persen, dan Edy mendapatkan 21,1 persen.

"Kalau kita lihat di semi terbuka 23 nama, kondisinya hampir sama, dua nama teratas Bobby Afif Nasution dan Edy Rahmayadi. Jarak antara Bobby dan Edy juga mirip. Kalau di sini sekitar 20 persen, di semi terbuka juga 20 persen, jadi sama-sama naik 6 persen," ujar Djayadi.

Sementara itu, nama Ahok dalam simulasi semi terbuka 23 nama, Ahok meraih elektabilitas 7,3 persen.

"Demikian juga Musa Rajekshah yang



menjadi wakil gubernur di masa Edy Rahmayadi itu masih di bawah 10 persen,” ucapnya.

“Jadi sama dengan top of mind didominasi oleh dua nama Bobby Nasution dan Eddy Rahmayadi,” pungkasnya.

Adapun jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia dilaksanakan pada 7-17 Juli 2024. Sebanyak 800 re-

Edy mengaku pihaknya belum mendapatkan tekanan menjelang pendaftaran Cagub Sumut 2024.

Hanya saja, lanjut Edy, jika mendapat tekanan artinya tidak mencintai bangsa Indonesia.

“Tidak ada tekanan. Berjalan, berjalan, demokrasi. Tapi kalau ada tekanan, ada intimidasi, berarti dia tidak mencin-

ganggu proses demokrasi.

“Mau ada tekanan atau tidak ada tekanan, ini adalah demokrasi. Demokrasi harus berjalan dengan baik. Yang mengganggu demokrasi, adalah pengkhianat bangsa,” jelasnya.

Karena itu, eks Pangkostrad tersebut meminta masyarakat untuk memilih secara terbuka siapa yang dianggap



sponden yang tinggal di Sumatra Utara terlibat dalam survei ini melalui metode wawancara.

Metode yang digunakan dalam survei ini yakni simple random sampling, dengan margin of error survei sebanyak 3,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Teraru, Edy Rahmayadi mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk maju dalam Pilkada Sumut 2024.

Edy Rahmayadi akan berkompetisi dengan Bobby Nasution yang didukung koalisi gemuk PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, dan PPP.

Meski akan menghadapi Bobby Nasution yang telah mendapatkan dukungan dari banyak Partai Politik,

tai bangsa ini,” kata Edy.

la mengatakan siapa pun yang mengganggu demokrasi merupakan pengkhianat bangsa. Tidak ada boleh satu pihak pun yang berupaya meng-



Jadi, kalau kita lihat dari top of mind-nya ada dua nama yang memuncaki pertarungan yaitu Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi

layak menjadi pemimpin di Pilkada Sumut 2024.

“Namanya demokrasi, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Itulah demokrasi. Sehingga, silakan rakyat berpesta, tinggal memilih mana yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin,” pungkasnya.

Edy Rahmayadi saat ini sudah mengantongi tiket untuk maju Pilkada Sumut 2024 setelah PDIP memberikan surat rekomendasi kepadanya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, nama Edy Rahmayadi sudah diputuskan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI (Purn) Edy Rahmayadi,” kata Hasto. •

PANGGUNG PILWAKOT PALEMBANG MASIH MENUNGGU RATU DEWA

Dua kontestan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwakot) Palembang yakni pasangan Yudha Pratomo Mahyuddin-Baharudin atau YudhaBahar dan Fitrianti Agustinda-Nandriani Octarina tinggal mendaftarkan diri ke KPU Palembang.

Namun panggung Pilwakot Palembang masih menunggu kehadiran kontestan lain yakni pasangan Ratu Dewa-Prima Salam atau RDPS. Pertandingan dipastikan akan berlangsung hangat dengan kompetensi tiga kontestan nantinya.

YudhaBahar didukung koalisi Demokrat dan PKS. Sedangkan Duo Srikandi didukung koalisi NasDem, PAN dan PKB.

Hanya RDPS salah satu calon kontestan Pilwalkot Palembang 2024 belum cukup kuota, Ratu Dewa hanya diusung oleh partai Gerindra.

Mantan Pj Wali Kota Palembang itu, baru mendapatkan 8 kursi dari Gerindra masih kurang 2 kursi untuk maju Pilkada Palembang yang mensyaratkan calon maju harus memiliki 10 kursi atau 20 persen.

Di sisi lain dua partai PDI Perjuangan dan Golkar masih senyap seakan akan sebagai penentu nasib Ratu Dewa mendaftarkan ger-

bong atau gagal mencalonkan diri karena kurang kuota kursi.

Kedua partai masih menjalankan survei dan rapat pleno hingga belum memberikan rekomendasi Pilwakot Palembang 2024.

Namun Pengamat Politik Sumatera Selatan (Sumsel) Ade Indra Chaniago memberikan prediksi kalau Ratu Dewa segera mendapatkan rekomendasi dari partai PDI Perjuangan.

"Kalau saya memberikan prediksi dipastikan Ratu Dewa mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan," kata dia.

Dengan faktor elektabilitas yang tinggi dan statusnya sebagai petahana, tidak mungkin partai politik tak ingin menang dalam pertarungan di Pilwakot Palembang 2024.

"Banyak isu yang tidak jelas kalau saya tetap yakin Ratu Dewa tetap akan melanjutkan perjalanan sampai ke petarung Pilwalkot Palembang tidak mungkin tidak mendapatkan gerbong," ucapnya.

Menurutnya, Ratu Dewa sudah mendapatkan dukungan dari Gerindra dengan Prima Salam sebagai pendampingnya. Lalu dua

partai penentu Ratu Dewa yang menambahkan jumlah kursi bisa mencalonkan diri dari PDI Perjuangan dan Golkar dinilainya masih melakukan konsolidasi.

Dikatakan Ade Indra Chaniago, apabila konsolidasi antara Ratu Dewa dan partai politik sudah ketemu tentunya perjalanan akan menjadi mulus.

"Dalam politik ini ada bargaining (penawaran) Ratu Dewa non partai apabila mau menjadi kader bisa saja salah satu partai akan memberikan dukungan," jelasnya.

Isu yang berkembang belum bergabungnya dua partai penentu Golkar dan PDI Perjuangan dihem-

buskan keinginan keduanya ikut mencalonkan kader dan wakilnya.



Dari Golkar mempunyai keinginan maju Muhammad Hidayat dan PDI Perjuangan dikabarkan menjadi partai merekomendasikan Charma Afrianto.

Namun bisa saja tanpa mencalonkan diri para partai penentu Golkar dan PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepada Ratu Dewa dengan syarat harus menjadi kader. Lantaran sampai sekarang Ratu Dewa berstatus non partai walaupun sudah resmi tidak lagi sebagai ASN.

Sedangkan kedua partai PDI Perjuangan dan Golkar tidak memberikan bocoran terkait rekomendasi di Pilwalkot Palembang. Hal itu dikarenakan kebijakan memberikan rekomendasi ada di pusat.



Kalau saya memberikan prediksi dipastikan Ratu Dewa mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan

Di sisi lain Golkar yang belum menentukan rekomendasi membuat peluang kontestan lain bisa merebutnya. Namun Ratu Dewa dan Fitrianti Agustinda diprediksi berpeluang besar mendapatkan suara dari Partai Golkar di Pilwalkot Palembang 2024.

Pengamat Politik Sumatera Selatan (Sumsel) Dr Muhammad Husni Thamrin mengatakan, sampai sekarang Golkar belum menentukan arah suara di Pilwalkot Palembang 2024.

"Kalau saya tebak dari tiga kontestan di Pilwalkot Palembang 2024 Ratu Dewa dan Fitrianti Agustinda yang berpeluang dapat suara Golkar," kata dia

Dilanjutkannya, kalau Yudha Pratom Mahyuddin mengusung jargon perubahan jelas bukan dari DNA petahana atau incumbent. Ratu Dewa dan Fitrianti Agustinda dua DNA petahana yang lebih diminati Golkar.

"Kita lihat saja Partai Golkar di pusat selalu mendukung petahana. Partai yang menempel dengan pemerintah. Jadi tidak akan memilih calon

yang mengusung perubahan di luar dari incumbent," ucapnya.

Dia mengukur rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh DPP Golkar pastinya lebih condong kepada nama Ratu Dewa dan Fitrianti Agustinda.

Menurutnya peluang Finda nama sapaan akrab Fitrianti Agustinda ikut

bagai calon Wali Kota Palembang 2024 menimbulkan isu baru.

Dari sana pun tersebar isu Muhammad Hidayat sebagai kader yang akan mendapatkan rekomendasi Golkar dengan membuat poros baru. Dikabarkan Golkar juga menurunkan kader dari pusat untuk menjadi pasangan



terbuka pasca Airlangga Hartarto mundur yang bisa berdampak kebijakan bertemu dengan Ratu Dewa ikut berubah.

"Apa lagi Finda belum lama ini adalah mantan Wakil Wali Kota Palembang dua periode bersama Harjojo berpeluang dilirik oleh Golkar pusat," terangnya.

Selain belum turunnya rekomedasi dari Golkar, munculnya nama Muhammad Hidayat yang merupakan Ketua DPD Golkar Palembang gencar menyebutkan ingin mencalonkan diri se-

baik sebagai wali kota atau wakil wali kota dari Muhammad Hidayat nantinya.

"Apakah Golkar mampu membuat poros baru? Sebab kalau keduanya dari kader mereka harus disetujui oleh partai koalisi. Selanjutnya waktu sudah mepet, mampukah Golkar menarik salah satu partai telah bergabung mendukungnya. membentuk poros baru. Kalau kata saya sulit. Lebih logis itu Golkar bergabung bersama partai koalisi yang mendukung Ratu Dewa atau Finda," pungkasnya. •

HEAD TO HEAD HDCU VS MATAHATI DI PILKADA SUMSEL

Jelang perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2024 tiba-tiba muncul kejutan.

Pilgub Sumsel 2024 seakan sakral untuk kontestan lain hanya ajang pertarungan dua petahana atau incumbent antara mantan Gubernur Sumsel Herman Deru versus mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya.

Awalnya pasangan duo srikandi Sumsel Holda-Mei Mustika atau HOME menyatakan mundur dan bubar dari kompetisi Pilgub 2024.

Publik kemudian dikejutkan kembali mundur dan bubarnya pasangan Heri Ama-

lindo-Popo Ali atau HAPAL dari gelanggang kompetisi.

Alhasil hanya tinggal dua pasangan bertarung Herman Deru-Cik Ujang atau HDCU dan Mawardi Yahya-Anita Noeringhati atau MATAHATI. Sebelumnya pun ada beberapa nama beken juga tidak lagi terdengar seperti Harnojoyo sempat menjadi pasangan Mawardi Yahya atau MAHAR juga bubar. Selanjutnya pasangan lainnya Eddy Santana Putra (ESP)-Andi Asmara tiba-tiba tidak lagi terdengar.



HAPAL Mundur, Dua Petahana Bertarung di Pilgub Sumsel

Mundurinya Heri Amalindo-Popo Ali dalam kontestasi Pemilihan kepada daerah Sumatera Selatan (Pilkada Sumsel) 2024, membuat peta persaingan berubah.

Hal itu lantaran Pilgub Sumsel hanya akan diisi dua pasangan saja di mana mereka adalah petahana, yakni Herman Daru (mantan Gubernur Sumsel) vs Mawardi Yahya (Mantan Wakil Gubernur Sumsel).

Pengamat politik Sumsel Ade Indra Chaniago mengatakan, dua petahana yang bertarung itu membuat masyarakat Sumsel tidak memiliki pilihan baru.

"Mau bagaimana lagi sekarang

masyarakat harus memilih petahana yang dahulunya sudah menjalankan pemerintahan," kata dia

Menelisik pertarungan dua petahana antara pasangan HDCU vs MATAHATI siapa yang lebih kuat? Ade Indra menilai mundurnya pasangan Heri Amalindo atau HAPAL menguntungkan satu kontestan.

"Kalau kata saya yang akan lebih untung ke depannya MATAHATI," ucapnya.

Menurutnya, MATAHATI diuntungkan dari segi suara. Sebab adanya Anita Noeringhati kelahiran Klaten, Jawa Tengah membuat suara pendukungnya menjadi bulat.

"Hanya bertarung *head to head* keduanya MATAHATI diuntungkan

suara pulau Jawa dari Anita. Suara masyarakat di pulau Jawa itu sangat besar di Sumsel," jelasnya.

Selanjutnya pertarungan kedua disinyalir akan mencari atau memperebutkan partai HAPAL yang akan ditinggalkan. HAPAL sendiri sudah mendapatkan dukungan dari PAN, PKB dan Hanura memiliki 15 kursi.

"Pastinya partai akan melanjutkan berkompetisi dan memberikan dukungan ke kontestan lainnya ke depan," ulasnya.

HAPAL Mundur Warga Sumsel Sedih

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Heri Amalindo-Popo Ali (HAPAL) mundur dalam per-



• INFO PILKADA

saingan Pilgub Sumsel 2024. Hal itu pun membuat semua publik Sumsel terkejut.

Ade Indra Chaniago mengatakan, semua warga Sumsel merasa kecewa dan sedih mendengar kabar tersebut.

"Saya pribadi juga merasakan sedih dan kecewa kenapa harus kalah sebelum berperang," kata dia.

Menurut dosen ilmu hukum dari STI-SIPOL Candradimuka ini, alasan kena-

kolah gratis dan kesehatan gratis. Tetapi program itu sekarang tidak akan ada lagi di Pilkada Sumsel karena mundurnya HAPAL," ucapnya.

Motif mundurnya HAPAL diprediksikan Ade Indra Chaniago murni karena cost politik yang besar. Apalagi berlaga di panggung politik memang harus dilengkapi dengan elektabilitas, popularitas dan isi tas.

"Mereka berpikir dengan keter-

Sementara itu, mundurnya HAPAL disampaikan oleh Kuasa Hukum Heri Amalindo, Firdaus Hasbullah, SH., MH.

"Saya mewakili Bapak Heri Amalindo mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama lebih dari setahun terakhir ini, yang telah berkontribusi besar dalam perjuangan Heri Amalindo," kata dia.

Firdaus Hasbullah menjelaskan HAPAL selama perjalanannya terakhir



pa warga Sumsel sedih karena merindukan program Gubernur Sumsel terdahulu Alex Noerdin yang akan diu-
sung kembali oleh HAPAL. Program sekolah gratis dan kesehatan gratis sangat dirindukan warga Sumsel.

"HAPAL membawa program yang dirindukan oleh warga Sumsel se-

batasan sulit untuk menang makanya mundur. Bicara politik memang harus punya elektabilitas, popularitas dan isi tas. Tetapi kalau orang berduit menang biasa saja, seharusnya dengan segala keterbatasan itu tetap berjuang dan menang itu baru luar biasa," ungkapnya.

mendapatkan dukungan dari partai politik seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hanura.

Dilanjutkannya, di jelang pendaftaran tanggal 27-29 Agustus 2024 HAPAL telah bulat memutuskan untuk mengambil sikap politik yang terhor-

mat dan bermartabat.

Mundurinya HAPAL menimbulkan fenomena Dramaturgi diduga tengah diperankan keduanya di panggung politik Pilgub Sumsel 2024.

Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar mengatakan HAPAL lagi akting Dramaturgi dengan bermain peran dua panggung di depan dan belakang yang berbeda.

"HAPAL lagi dramaturgi dimana



panggung depan dan panggung belakang berbeda. Didepan maju Pilkada 2024 dan di belakang tiba-tiba ada cerita mundur," kata dia

Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) ini, menduga pernyataan mundurnya Heri Amalindo ini seperti akting Dramaturgi.

"Bisa saja ini bagian dari cara dia (HAPAL) untuk menguji dan mengukur simpati masyarakat," ucapnya.

Dia juga merasa aneh karena mundurnya HAPAL hanya diumumkan melalui perwakilan Kuasa Hukum Heri Amalindo, Firdaus Hasbullah.

Menurutnya, apabila benar-benar mundur seharusnya diumumkan secara resmi Heri Amalindo muncul bersama Popo Ali serta menyebutkan alasan jelasnya.

"Dia harus muncul secara resmi dengan Popo Ali dan para partai pengusung. Kalau hanya perwakilan saja sangat aneh," jelasnya lagi.

HAPAL sendiri sudah mendapatkan dukungan dari PAN, PKB dan Hanura memiliki 15 kursi. Sedangkan syarat untuk maju harus mengantongi 15 kursi hanya kurang 1 kursi disebut.

Ade Indra Chania-go juga menyebutkan adanya keanehan dari mundurnya HAPAL. Dia aneh karena elektabilitas HAPAL dan hasil surveinya tengah naik ke papan kedua mengusur pasangan MATAHATI.

"Anehnya itu pasangan Mawardi-Anita (MATAHATI) surveinya ada di bawah HAPAL. Kenapa tiba-tiba mundur," ucapnya.

Dia juga menyebutkan apabila kursi HAPAL kurang 1 bisa menarik partai-partai lain mempunyai 1 kursi seperti Perindo. Motif tingginya biaya politik bisa saja menjadi penyebab.

"Ada dugaan besar juga dugaan dramaturgi bisa saja terjadi. Di depan panggung dan belakang panggung berbeda. Di belakang panggung ada saja kontestan menyuruh mundur dan mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan," ucapnya.

Dilanjutkannya bertarung dengan

tiga kontestan bisa membuat salah satu kontestan terganggu khawatir kalah.

"Bisa juga karena adanya HAPAL dia (yang menyuruh mundur) akan kalah! Makanya di belakang panggung ada cerita berbeda ini. Mungkin efeknya kalau hanya dua peserta mereka optimis bisa menang," pungkasnya.

Dramaturgi adalah teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia, termasuk di pentas politik.

Dramaturgi dicetuskan oleh Erving Goffman pada tahun 1959 dengan judul *Presentation of Self in Everyday Life*. •



PUTUSAN MK UBAH PETA PERSAINGAN PILGUB JAKARTA

Deklarasi 12 partai politik mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pemilihan Gubernur Jakarta sudah berlangsung. Toh Mahkamah Konstitusi membuka peluang PDI Perjuangan mencalonkan pasangan lawan tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain.

Sebanyak 12 partai politik sudah menandatangani piagam dukungan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono sebagai bakal pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024. Partai-partai itu dikenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Maju

Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan.

"Pada hari ini, Senin 19 Agustus 2024, kami partai politik yang terga-

pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta periode 2024—2029."

Sejumlah pimpinan partai politik yang hadir, antara lain, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta



Plus (KIM Plus).

KIM adalah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pemenang Pilpres 2024. Plusnya, partai-partai politik lain yang mengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pesaing Prabowo-Gibran.

Partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera,

bung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju menyatakan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Suswono sebagai calon wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Khusus Jakarta 2024," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memimpin deklarasi di Hotel Sultan, Jakarta.

Selanjutnya, kata Ahmad Muzani, partai-partai itu "Siap memenangkan

Ahmad Riza Patria, Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jakarta Eko Hendro Purnomo, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta Mujiono, dan Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Jakarta Elva Farhi Qolbina.

Dari Partai Keadilan Sejahtera hadir anggota DPRD Provinsi Jakarta Karyatin Subiyantoro, Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jakarta Gusti Arief Yulifard, dan Ketua DPW Partai Kebangkitan Na-

sional Jakarta Hasbiallah Ilyas.

Dengan deklarasi itu, Lebih dari 60 persen representasi kursi DPRD DKI Jakarta sudah bergabung untuk mengusung pasangan Ridwan Kamil - Suswono (Rido). Sisa suara lainnya milik PDIP 14,01 persen dan partai-partai lain. PDIP yang tak bergabung dalam KIM Plus pun kesulitan mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur untuk maju di Pilgub Jakarta karena terkendala oleh aturan ambang batas (threshold) 20 persen suara atau jumlah kursi di DPRD

Namun, sehari setelah deklarasi pasangan Rido, peluang PDIP terbuka dengan putusan Mahkamah Konstitusi



Putusan ini harus dipandang positif sebab memastikan hadirnya lebih dari 1 pasang calon dalam pilkada.

(MK) yang mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas 20 persen itu.

Nah, putusan MK itu mengubah aturan ambang batas melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Dalam putusannya, MK mengubah threshold pencalonan kepala daerah yang sebelumnya sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada

sebagai berikut:

- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 2 juta jiwa harus didukung partai politik/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 10 persen.
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 2-6 juta jiwa harus didukung partai politik/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 8,5 persen.
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 6-12 juta jiwa harus didukung

olehan suara 20 persen pada Pileg DPRD DKI Jakarta, kini terbuka pula peluangnya menjajaki periode keduanya. Selain itu, PDIP, satu-satunya partai politik di DPRD Jakarta yang belum mendeklarasikan calon gubernurnya, juga dapat mengajukan calonnya.

Karuan saja PDIP menyambut baik putusan MK itu. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengungkapkan, putusan MK ini memungkinkan lebih banyak partai politik mengajukan calon sendiri di Pilkada Serentak 2024.

"Soal putusan MK harus dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki



partai politik/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 7,5 persen.

- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa harus didukung partai politik/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 6,5 persen.

Melalui perubahan ini, lebih banyak partai politik dapat mengusung calon gubernur dengan modal suara yang lebih rendah, membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Berdasarkan putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pemilihan legislatif sebelumnya.

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan, yang sebelumnya kehabisan partai politik dengan per-

partai politik yang hendak membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan strategi kotak kosong," kata Deddy dalam keterangan resmi Selasa, 20 Agustus 2024.

Menurut dia, putusan ini kemenangan bagi rakyat dan kekalahan bagi partai politik oligarki yang antidemokrasi. "Putusan ini harus dipandang positif sebab memastikan hadirnya lebih dari 1 pasang calon dalam pilkada. Semakin banyak calon tentu makin banyak pilihan calon pemimpin yang bisa dipertimbangkan oleh rakyat," tandasnya.

Namun bagaimana peta persaingan sesungguhnya dalam Pilgub Jakarta, semuanya akan lebih jelas setelah pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum. Jadwalnya antara 27-29 Agustus 2024. Kita lihat bersama-sama. ●



97 PEMDA TERLAMBAT CAIRKAN ANGGARAN PILKADA

Presiden Joko Widodo meminta semua kepala daerah untuk segera mencairkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab, dari 541 pemda, masih ada 97 pemda yang terlambat mencairkan seluruh anggaran pilkada dari tenggat maksimal 5 bulan sebelum pemungutan suara.

"Saya minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk pilkada," ujar Presiden Joko Widodo saat Pengarahan Presiden kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Selasa, 13 Agustus 2024.

Dalam pengarahan tersebut, turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

Adapun pengarahan kepala daerah pertama di IKN itu diikuti 552 kepala daerah ataupun penjabat kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga meminta kepala daerah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan keamanan penyelenggaraan Pilkada 2024. Sebab, pengamanan di Pilkada Serentak cenderung berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya yang di-

lakukan secara bertahap.

Pada pilkada sebelumnya, personel keamanan bisa dibantu dari daerah lain yang tidak menyelenggarakan pilkada. Sementara di pilkada serentak, semua personel keamanan harus mengawal daerahnya masing-masing.

"Kalau ragu-ragu dan memerlukan tambahan kekuatan agar disampaikan ke Kapolda atau kalau provinsi sampaikan ke Kapolri langsung. Karena ini menyangkut keamanan dan ketertiban nanti di dalam kegiatan pilkada yang kita akan lakukan di bulan November," ucap Jokowi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melaporkan ada 552 kepala daerah yang hadir dalam pengarahan presiden dengan rincian 416 bupati, 98 wali kota dan 38 gubernur.

Dari jumlah tersebut, Tito menginformasikan sebanyak 237 kepada daerah berstatus sebagai penjabat. Mereka terdiri dari 28 penjabat gubernur dan 209 penjabat wali kota dan bupati. Mantan Kapolri itu juga melaporkan ada 35 kepala daerah yang berhalangan hadir.

Menurut Tito, terdapat 35 kepala daerah yang berhalangan hadir, karena sakit, harus mengikuti sidang paripurna DPRD hingga tidak kebagian tiket pesawat.

"Semua gubernur sudah tiba sejak tadi malam menginap di Hotel Nusantara. Bupati dan wali kota semua menginap di Balikpapan dan tadi jam 6 dari Balikpapan," ujar Tito.

Secara terpisah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Yulianto Sudrajat, menuturkan, belum semua pemda mencairkan 100 persen anggaran pilkada. Data per 31 Juli menunjukkan, dari 541 pemda yang menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pilkada, baru 444 pemda yang mencairkan anggaran 100 persen.

Adapun 97 pemda belum mencairkan 100 persen anggaran pilkada yang telah disepakati. Rinciannya, sebanyak 31 pemda baru mencairkan anggaran sebanyak 60 persen hingga 99 persen. Sementara, 66 pemda baru mencairkan anggaran kurang dari 60 persen. Total anggaran pilkada yang disepakati sebanyak Rp28,73 triliun.

Menurut Yulianto, KPU terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat pencairan seluruh anggaran pilkada.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun telah menerbitkan surat edaran tentang pendanaan Pilkada 2024 ke semua kepala daerah sejak 24 Januari 2023.

Dalam surat edaran itu disebutkan, pencairan dana hibah untuk pilkada dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, pencairan anggaran sebanyak 40 persen dari tahun anggaran 2023. Pencairannya dilakukan paling lama 14 hari setelah penandatanganan NPHD.

Sementara, sisanya sebanyak 60 persen berasal dari tahun anggaran 2024. Pencairannya dilakukan maksimal lima bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan demikian, seluruh anggaran pilkada semestinya sudah dicairkan paling lambat 27 Juni 2024.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong daerah-daerah yang pencairannya belum 100 persen, karena sudah mendekati tahapan yang memerlukan banyak anggaran," ucap Yulianto.

Menurut dia, saat ini, 97 KPU yang anggarannya belum turun 100 persen masih

bisa tetap melaksanakan tahapan pilkada. Namun, dana tersebut mesti segera dicairkan seluruhnya karena tahapan pilkada mulai masuk ke tahap-tahap krusial yang membutuhkan anggaran cukup besar.

Pada 27-29 Agustus mendatang, KPU mulai menerima pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah. Sebelum tahapan pendaftaran dimulai, KPU perlu anggaran untuk melaksanakan bimbingan teknis tentang pencalonan kepala daerah. Disusul dengan pembentukan badan ad hoc, kampanye, dan pengadaan logistik.

Ia khawatir, keterlambatan pencairan anggaran pilkada dapat berdampak pada tahapan pilkada. Seperti pengadaan logistik, harus dilakukan lelang beberapa bulan sebelum tahapan pemungutan suara. Begitu pula kebutuhan untuk fasilitasi kampanye,

yak pemda mengulur-ulur pencairan anggaran ke penyelenggara pemilu. Salah satu faktornya adalah tidak ikutnya petahana dalam pilkada yang akan diselenggarakan.

Bagi daerah-daerah yang petahana ikut berkontestasi, pencairan anggaran cenderung lancar. Sementara daerah yang tidak ada petahana maju lagi, seringkali pencairannya terhambat. Apalagi, jika kepala daerah ataupun pejabat kepala daerah tidak memiliki perhatian untuk penyelenggaraan pilkada.

Padahal, dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pilkada juga berasal dari pemerintah pusat. Mestinya, dana tersebut langsung dialokasikan untuk pilkada melalui skema dana alokasi khusus. Dengan demikian, penyelenggaraan pilkada tidak lagi dibayangi kekurangan anggaran.

"Kan, pilkada dilakukan secara peri-



di antaranya pembuatan alat peraga kampanye dan debat pasangan calon kepala daerah.

"Beberapa tahapan yang membutuhkan anggaran besar itu sudah semakin dekat. Jangan sampai ada tahapan yang terganggu karena anggaran belum 100 persen cair," tuturnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai, sudah saatnya pembentuk undang-undang mengevaluasi model pendanaan pilkada. Sebab, keterlambatan pencairan anggaran pilkada selalu berulang tiap pilkada.

Menurut dia, metode penganggaran pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak efektif. Ban-

odik sehingga mestinya pemda sudah mempersiapkan anggarannya," ucap Ninis.

Ninis menambahkan, keterlambatan pencairan anggaran pilkada kemungkinan tidak akan membuat tahapan pilkada terhenti. Namun, pelaksanaannya akan terhambat karena sebagian kegiatan tidak bisa dibiayai secara utuh. KPU mesti menghemat anggaran yang tersisa, bahkan tidak menutup kemungkinan honor untuk badan ad hoc tidak dibayarkan.

Oleh karena itu, pencairan anggaran mesti dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian, tahapan pilkada tidak akan terganggu sehingga KPU bisa melaksanakan seluruh tahapan dengan optimal. ●

KONTRIBUSI EKONOMI KREATIF MAKIN KOMPETITIF

Sektor ekonomi kreatif Indonesia hingga triwulan I/2024 menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari capaian nilai tambah ekonomi kreatif yang diestimasi mencapai Rp749,58 triliun atau 55,65 persen dari target Rp1.347 triliun.

"Semester kedua mudah-mudahan bisa tercapai dan mungkin bisa lebih syukur. Alhamdulillah,"

kata Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemparekraf, Nia Niscaya, dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2024.

Nia menjelaskan ada tiga sektor unggulan untuk nilai tambah ekonomi kreatif, yaitu kuliner, fesyen, dan kriya. Tiga subsektor ini

diperoleh dari data Dep-
uti Bidang
Kebijakan

Strategi Ke-
men-

parekraf yang telah melakukan survei kepada pelaku sektor ekonomi kreatif.

"Ini yang terkait dengan nilai tambah ekonomi kreatif," kata Nia.

Sedangkan untuk ekspor, pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi kreatif mencapai USD27,53 miliar. Berdasarkan data Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu pada semester I/2024, nilai ekspor ekonomi kreatif sebesar USD12,36 miliar. Nilai ini menunjukkan adanya peningkatan 4,46 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (yoy) sebagai dampak dari peningkatan permintaan ekspor kriya dan fesyen.

"Kalau secara total untuk ekspor ini sudah mencapai 44,89 persen," kata Nia.

Nilai ekspor ekraf berdasarkan komoditas didominasi oleh 4 sektor, yakni fesyen USD6.767,62 juta, kriya USD4.755,79 juta, kuliner USD829,66 juta, dan penerbitan USD6,15 juta.

"Kalau wisnus di dalam negeri lebih banyak untuk kuliner karena masyarakat Indonesia ketika jalan-jalan nomor satu cari makanan yang khas. Nah beda dengan ekspor, nomor satu adalah fesyen kemudian kriya, kuliner, dan penerbitan," kata Nia.

Adapun Top 5 negara tujuan ekspor di antaranya ke Amerika Serikat dengan USD4.078,09 juta, Swiss USD908,47 juta, Jepang USD619,28 juta, Hongkong USD582,63 juta, dan India USD541,78 juta.

"Ini adalah data atau pencapaian yang terkait dengan sektor ekonomi kreatif khususnya dua komponen, yaitu komponen nilai tambah ekonomi kreatif dan komponen ekspor ekonomi kreatif,

dari 9 komponen IKU Kemparekraf," kata Nia.

Sebelumnya,



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menargetkan kontribusi sektor ekonomi kreatif khususnya dari sisi ekspor dapat mencapai USD25-28 miliar pada tahun ini demi mendorong terciptanya peluang usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Nilai tambah ekonomi kreatif (tahun) 2023 telah menembus Rp1.415 triliun, di atas target Rp1.300 triliun. Namun, kita punya PR pada nilai ekspor ekonomi kreatif yakni peluangnya lebih besar sebetulnya," kata Sandi saat membuka kegiatan Kelas Ekspor AKI bertema Pelatihan Manajemen Ekspor Impor Dengan Simulasi di Jakarta, Jumat, 1 Maret 2024.

la mengatakan, peluang peningkatan nilai ekspor itu tidak lepas dari

gangguan, neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2023 secara akumulatif mengalami surplus USD36,93 miliar. Begitu juga dengan neraca perdagangan periode Januari 2024 yang kembali mencatat surplus USD2,02 miliar. Ini memperpanjang catatan surplus sejak Mei 2020 atau surplus selama 45 bulan berturut-turut.

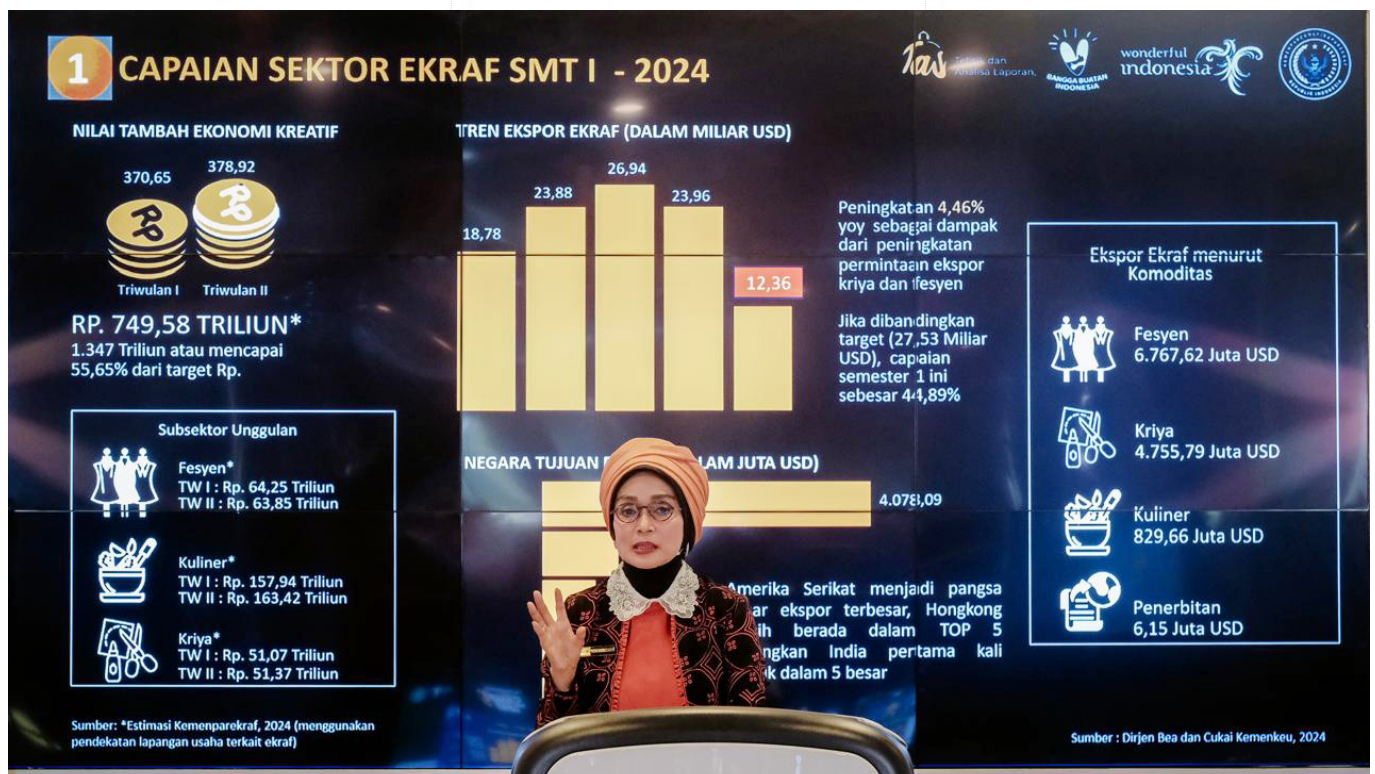
"Indonesia surplus besar sekali, tapi komoditasnya masih hanya yang selama ini mendominasi, belum disentuh dengan produk-produk kita yang lain seperti ekonomi kreatif seperti kuliner, kriya, dan fesyen," kata Sandi.

la berharap dengan meningkatnya nilai ekspor produk ekonomi kreatif akan berdampak pada penguatan

sial secara ekonomi dan prospektif untuk jadi tujuan pasar bagi Indonesia, seperti negara-negara di kawasan Amerika Latin, Eropa Tengah dan Timur, Afrika, Asia Selatan dan Tengah dan Pasifik Selatan.

"Kita harus diversifikasi sehingga pasar-pasar yang belum tersentuh, apalagi Afrika ini pasar yang peluangnya sangat luar biasa sebagai pasar produk ekonomi kreatif," ujar Sandiaga.

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Muhammad Neil El Himam, mengatakan, pihaknya ingin selalu memberikan fasilitasi demi membantu pengembangan usaha para pelaku ekraf, khususnya alumni AKI ke jenjang lebih tinggi yakni memasuki pasar internasional.



menguatnya tingkat daya saing produk-produk ekonomi kreatif pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Tanah Air.

Seperti dicapai para peserta Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) yang merupakan salah satu program unggulan Kemenparekraf. Berdasarkan data yang dihimpun Kemenparekraf, omzet peserta AKI meningkat antara 15-30 persen.

"15-30 persen (peningkatan omzet) ini pasti belum menghitung potensi ekspor," kata Sandi.

Berdasarkan data Kementerian Perda-

ekonomi dan terciptanya lapangan kerja masyarakat.

"Selain ekspor produk ekonomi kreatif, tapi yang terpenting juga adalah lapangan kerja yang kita harus ciptakan sekitar 24-25 juta lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif. Dan merekalah (peserta pelatihan/UMKM) yang akan menciptakan lapangan kerja," kata Sandi.

Terkait negara tujuan ekspor, Sandi berpesan agar nantinya para pelaku ekraf dapat menyasar pasar non tradisional. Yakni negara-negara yang poten-

Penyelenggaraan AKI selama tiga tahun belakangan telah mengumpulkan sebanyak 1.200 pelaku ekraf yang terdaftar sebagai alumni AKI.

"Secara garis besar, kelas ekspor ini adalah investasi berharga bagi pelaku ekraf yang ingin memasuki pasar ekspor atau meningkatkan operasi ekspor mereka. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, pelaku ekraf dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan mencapai sukses dalam usahanya memasuki pasar internasional," ujar Neil. •

JAGA KOMUNIKASI DI MASA TRANSISI

Jelang lengser pada 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo juga membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan dengan melantik Hasan Nasbi yang jadi pimpinannya. Hasan Nasbi merupakan Juru Bicara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Kantor Komunikasi Kepresidenan dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024. Hasan menjelaskan, salah satu fokus utamanya adalah mengorkestrasi informasi hasil capaian dan program-program prioritas pemerintah dengan jelas kepada masyarakat.

Lembaga ini bertugas mendukung presiden di bidang komunikasi, terutama terkait kebijakan strategis dan program prioritas presiden. Selain itu, para juru bicara dalam kantor tersebut bertugas meluruskan berita tidak benar atau hoaks.

"Ini bukan soal menangkal serangan politik. Kami kan harus memberi pengertian kepada masyarakat kalau misalnya ada informasi yang sifatnya disinformatif, kalau ada isu yang sifatnya mungkin ada distorsi dan fit-

nah, ada berita yang tidak benar," kata Hasan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Meski bertugas meluruskan berita, Hasan memastikan pemerintah bakal tetap menjaga kebebasan pers. Menurutnya demokrasi bakal berjalan dengan baik, sesuai kultur yang berkembang di Tanah Air.

"Dan kami berharap iklim demokrasi yang sekarang terbuka. Teman-teman bisa mengkritik, teman-teman juga bisa memberitakan, teman-teman juga bisa menjadi alat kontrol. Jadi menurut saya, tidak perlu ada kekhawatiran soal demokrasi," kata dia.

Hasan menjelaskan sebelumnya presiden sudah memiliki badan yang bertugas dan berfungsi terkait komunikasi, yakni Deputi Empat Kantor Staf Presiden. Nantinya, beberapa fungsi dan tugas dari deputi tersebut akan



dipindahkan ke Kantor Komunikasi Kepresidenan, namun tidak menjelaskan berapa orang juru bicara yang akan dipakai kantor tersebut.

"Jadi jumlahnya tidak ditentukan, sesuai dengan kebutuhan presiden nanti. Apakah butuh lima, empat, enam, dan sebagainya, itu tergantung kepada kebutuhan presiden," katanya.

Di sisi lain, Hasan juga menyatakan dirinya sudah tidak lagi bekerja sebagai konsultan politik. Sebelumnya ia adalah pendiri lembaga survei dan konsultan politik Cyrus Network, konsultan Jokowi-Ahok pada Pilkada Jakarta 2012. Sebagai pengamat politik ia memiliki cukup kedekatan dengan Jokowi sejak pemerintahan baru dibentuk.

"Saya sudah pensiun dari konsultan politik pada Februari 2024. Sudah pensiun, sudah pensiun. Selesai. Saya sudah mundur dari jabatan eksekutif maupun jabatan komisaris di perusahaan konsultan politik sejak Februari 2024," katanya.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyebut tugas Kepala Kantor Kepresidenan untuk mengkomunikasikan berbagai diseminasi informasi dan narasi.

"Sehingga tentu kita berharap bahwa akan datang pemerintahan baru itu kantor komunikasi kepresidenan itu akan bisa lebih efektif dalam rangka melakukan desiminasi dan informasi terhadap seluruh kebijakan-kebijakan dan program yang diambil oleh presiden yang akan datang," kata Ngabalin.

Ngabalin mengungkapkan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan juga akan menjadi koordinator juru bicara presiden yang akan membawahi para jubir.

"Jubir di bawah kepala komunikasi kepresidenan, kepala kantor komunikasi kepresidenan sekaligus menjadi koordinator juru bicara presiden. Presiden pun bisa secara langsung menggunakan juru bicara, itu di dalam persnya," ujarnya.

Kepala Lab Humas Universitas Indonesia sekaligus CEO Imajin PR & Research, Jojo S Nugroho, menilai positif kehadiran Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ia berpendapat, arus informasi yang cepat telah menuntut

pemerintah untuk bisa menyampaikan pesan kebijakan secara terkoordinasi, konsisten, dan jelas.

"Pemerintah diharapkan dapat mengelola narasi publik dengan lebih efektif, memastikan isu penting mendapat perhatian yang tepat, dan memfokuskan perhatian masyarakat pada prioritas kebijakan," ujarnya.

Sependapat dengan Jojo, founder dan Principal Consultant NAGARU Communication, Dian Agustine Nuri-man, menekankan pentingnya Kantor Komunikasi Kepresidenan sebagai pusat koordinasi seluruh komunikasi pemerintah, terutama dalam meng-

utama yang jelas untuk semua komunikasi pemerintah, sehingga masyarakat tidak bingung dengan informasi yang beredar.

"Diharapkan semua komunikasi yang keluar, khususnya untuk negara ini memiliki induk, memiliki pusat yang tersentralisasi," ujarnya.

Sementara itu, Partai Demokrat meminta masyarakat tak khawatir dengan Kantor Komunikasi Presiden yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, lembaga baru itu dibuat bukan untuk mengatur komunikasi masyarakat.

"Kalau ada yang khawatir, ini bu-



hadapi berbagai informasi yang kerap simpang siur di berbagai kementerian dan lembaga.

Sementara itu, founder Govcomm Consulting, Ani Natalia, menyebut, pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan dinilai sangat tepat, karena terjadi di masa transisi ke pemerintahan yang baru.

"Banyak program maupun kebijakan pemerintah yang harus dikomunikasikan kepada publik dengan baik," katanya.

Disamping itu, ada beberapa alasan penting yang cukup mendesak di balik pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Di antaranya kompleksitas informasi dan tantangan komunikasi, pengelolaan krisis dan disinformasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, koordinasi antar lembaga, serta perubahan dinamika politik dan sosial.

Seakan merangkum pendapat yang lain, Dian berharap lembaga baru tersebut dapat memberikan rujukan

kan mengatur publik. Ini mengatur bagaimana alur komunikasi di organisasi kepresidenan, dan di kabinet itu sendiri. Sehingga, publik tahu, mau mendengarkan siapa nih. Ini wajar dan biasa sekali," kata Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Menurut Herzaky, Partai Demokrat menyambut positif lembaga tersebut. Menurutnya, lembaga ini bisa menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat soal kebijakan presiden.

"Ini sangat baik dan positif bagaimana komunikasi dianggap sebagai suatu hal yang sangat serius oleh bapak presiden. Karena bagaimanapun kinerja yang kita lakukan hari ini bisa jadi tidak terinformasi dengan baik kepada masyarakat sehingga ada persepsi ada pesan yang tidak utuh yang disampaikan masyarakat," ucapnya.

Jika soal komunikasi tak digarap serius oleh presiden, maka akan timbul berita bohong dan disinformasi. ●

ANGGARAN SUPER JUMBO LEMBAGA BARU UNTUK PRABOWO

Presiden Jokowi membentuk lembaga baru yakni Badan Gizi Nasional untuk melaksanakan program makan bergizi gratis Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Meski baru dibentuk, lembaga ini bakal mengelola anggaran jumbo sebesar Rp71 triliun tahun depan.

dayana sebagai nakhodanya.

Dadan menjelaskan, meski dibentuk pada era Jokowi, lembaganya baru akan beroperasi pada 2025, sesuai nota keuangan yang sudah disampaikan Jokowi. Oleh sebab itu, Peraturan Presiden tentang pembentukan badan harus dikeluarkan di era Jokowi.

"2 Januari, kami langsung melaksanakan program makan bergizi. Insya Allah terkejar," kata Dadan Hindayana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Dadan.

Jika dibandingkan dengan anggaran kementerian/lembaga (K/L) lain dalam RAPBN 2025, uang yang dikelola Badan Gizi sangat besar. Bahkan, badan ini langsung masuk dalam urutan kedelapan K/L penerima anggaran jumbo, menyialip Kementerian Keuangan hingga Kementerian Perhubungan.

Dadan juga menyatakan program ini bakal langsung berjalan di seluruh Indonesia. Hal ini berbeda dengan pernyataan Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rak-



Pembentukan badan baru ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken Presiden Joko Widodo. Beleid ini mulai berlaku pada 15 Agustus 2024.

Untuk memimpin Badan Gizi Nasional, Presiden Jokowi menunjuk Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) pada program studi S2 Entomologi Dadan Hin-

Dadan mengungkap besaran anggaran Rp71 triliun hanya dikelola sendiri oleh Badan Gizi, tidak disebar ke kementerian/lembaga lain untuk penerapan program makan bergizi gratis.

"Iya (Rp71 triliun anggaran Badan Gizi). Enggak (dipecah ke K/L lain), Badan Gizi (mengelola sendiri). Menyangkut seluruhnya. Termasuk seluruhnya (gaji pegawai Badan Gizi)," kata

abuming Raka, bahwa program bakal berlaku di daerah 3T terlebih dahulu. Ia mengatakan, pelaksanaan program akan dimulai pada daerah percontohan selama 8 bulan. Selanjutnya program serupa akan disalin ke seluruh Indonesia.

"Sehingga kami akan mendapatkan kelebihan, kekurangan, termasuk struktur menu di masing-masing daerah.

Nah, itu akan didapatkan jika dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia,” ujar Dadan.

Beberapa hal yang bisa ditetapkan ini misalnya standar gizi, komposisi menu, hingga komposisi kandungan. Namun, menu makan bergizi gratis ini akan berbeda, tergantung daerah masing-masing.

Terkait total penerima manfaat, Dadan bilang mereka menargetkan diterima oleh 82,9 juta orang. Angka yang tertera dalam dokumen visi misi Prabowo-Gibran ini tidak akan langsung tercapai dalam tahun pertama implementasi. Implementasinya bakal dilakukan bertahap, sehingga mereka bisa mendapat saran pelaksanaan program.

Dadan juga menjelaskan belum ada kepastian dimana posisi kantor lembaga ini. Mereka berencana menyusun struktur organisasi terlebih dahulu dan ditargetkan selesai tahun ini. Proses pembentukan struktur ini dimulai dari pengangkatan pejabat tinggi pratama, Inspektorat Jenderal, hingga Deputi. Lalu mereka nakal menyusun Struktural Organisasi dan Tata Kerja atau SOTK, peraturan badan, hingga pelaksanaan program yang terkait dengan APBN.

“Kami harapkan minggu pertama Desember sudah menerima Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau DIPA. Kalau sudah terima DIPA, artinya 2 Januari program ini sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Tak Perlu Lembaga Baru

Sejumlah pengamat ekonomi mengkritisi pembentukan Badan Gizi Nasional untuk menjalankan satu program unggulan Presiden Terpilih Prabowo, yakni makan bergizi gratis.

Mereka menilai tak perlu dibentuk baru untuk menjalankan satu program itu. Makan bergizi gratis dengan alokasi anggaran Rp71 triliun itu bisa ‘dititipkan’ ke instansi yang sudah ada.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menyebut, sudah terlalu banyak badan atau instansi pemerintah. Makan gratis sebaiknya dicantolkan ke instansi eksisting. Kementerian Kesehatan dinilai cocok mengemban amanah tersebut.

Eshter menekankan tugas pokok dan

fungsi Badan Gizi harus benar-benar jelas. Andai punya banyak kesamaan dengan K/L lain, sebaiknya dilebur saja.

“Harus ada key performance indicator (KPI) untuk setiap dana yang dialokasikan,” ujarnya.

Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, melihat pembentukan Badan Gizi Nasional merupakan langkah yang tergesa-gesa. Hal ini juga sangat berlawanan dengan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah.

Seharusnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dilakukan secara terintegrasi dalam format kabinet yang sudah ada, tanpa perlu membentuk lembaga baru.

“Pembentukan lembaga baru adalah mahal, menambah panjang rantai birokrasi, serta berpotensi menimbulkan

garan penanggulangan stunting yang selama ini hanya kisaran Rp30 triliun,” tutur Yusuf.

“Dengan demikian, berbagai program intervensi gizi spesifik yang selama ini masih lemah dapat diperkuat secara tepat sasaran, seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di usia 1.000 hari pertama kehidupan,” sambungnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pelantikan Dadan lebih ke urusan teknokratis.

“Jadi, kalau menteri-menteri tadi memang menguat alasan politisnya kalau saya melihat kepala-kepala badan ini lebih kuat alasan teknokratisnya karena memang Prof Dadan ini kan guru besar di IPB dan track record-nya (rekam je-



kan inefisiensi dari rendahnya koordinasi antar-instansi dan lemahnya sinergi dengan program pemerintah yang telah ada,” kritik Yusuf.

Menurutnya, Kemenkes lebih berhak menerima kepercayaan tersebut. Ada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di Kemenkes yang menaungi Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Yusuf mencontohkan bagaimana peran Kemenkes dalam mengintervensi gizi masyarakat selama ini. Langkah tersebut juga dilakukan dengan semangat memerangi stunting, salah satu musuh utama Republik Indonesia.

“Dengan pelaksanaan program MBG dilakukan oleh Kemenkes, maka anggaran Rp71 triliun dapat dikelola secara lebih efisien. Lebih jauh, anggaran MBG juga dapat disinergikan dengan ang-

jaknya) jelas seperti itu,” ucap Agung.

Menurutnya, ditunjukkannya Dadan ialah untuk merealisasikan janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Nah, ketika ada arahan untuk merealisasikan, ya, makan siang dan bergizi gratis seperti itu, saya kira ini dikerangkai secara konkret oleh Presiden Jokowi maupun Prabowo agar ini bukan sebatas wacana lagi atau janji-janji kampanye, tapi akan dituntaskan akan direalisasikan mungkin secara bertahap, ya, tidak mungkin sekaligus,” ujarnya.

“Sehingga, Prof Dadan ini menjadi dalam tanda petik, ya, sutradara yang akan memegang peranan krusial apakah janji kampanye Prabowo-Gibran besok bisa dituntaskan secara utuh,” terangnya. ●



SUKSES KENDALIKAN INFLASI LEWAT BERBAGAI PROGRAM

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menunjukkan prestasinya dalam pengendalian inflasi daerah. Keberhasilan ini diapresiasi dengan meraih penghargaan insentif fiskal sebesar Rp 5,6 miliar untuk kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama.

Apresiasi tersebut diberikan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian serta diikuti oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Dalam arahnya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menjaga tingkat inflasi daerah.

"Kenaikan harga barang dan jasa menjadi perhatian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan bahan pangan, yang merupakan kebutuhan paling mendasar," ujar Tito.

Tito juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjalankan program pengendalian inflasi dan keberpi-

hakan anggaran.

Semua survei menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa serta lapangan kerja adalah perhatian utama masyarakat.

"Daerah yang bekerja maksimal dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya akan diberikan insentif fiskal sebagai bentuk apresiasi," jelasnya.

Penyerahan insentif fiskal tersebut dilakukan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Pj Bupati Muba, H. Sandi Fahlepi, didampingi Plt Kepala BP-KAD Muba H. Zabidi dan Kepala Disdag-perin Hj. Azizah.

"Saya apresiasi dan akui kerja keras kepala daerah dalam pengendalian inflasi daerah masing-masing melalui program-program yang telah dijalankan," ungkap Tito.

Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi, meny-

takan bahwa upaya pengendalian inflasi merupakan kewajiban yang harus digencarkan untuk menjaga kendali harga pasar baik barang maupun jasa.

"Alhamdulillah, kita mendapatkan penghargaan atas keberhasilan Muba dalam pengendalian inflasi daerah," terangnya.

Sandi menegaskan bahwa capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Muba.

"Pemkab Muba berkomitmen menjalankan amanah pemerintah pusat dalam mengatasi pengendalian inflasi di daerah," tegasnya.

Diantaranya dengan menstabilkan kebutuhan pokok dan mengintervensi langsung setiap persoalan yang ada.

Sandi menyampaikan bahwa program-program yang dijalankan melalui dinas terkait, seperti operasi pasar murah dan pemantauan harga serta stok, akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Program inovasi seperti operasi pasar murah, program tanam cabai serentak, dan program ketahanan pangan akan terus dijalankan.

Program ini, dinilai mampu meminimalisir dan menekan inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Gencarkan Program Operasi Pasar

Salah satu keberhasilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menekan inflasi adalah dengan operasi pasar beras medium bekerjasama dengan Perum Bulog Sumatera Selatan dan Bank Sumsel Babel.

Seperti yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muba tersebut dilaksanakan di Kecamatan Plakat Tinggi yang dibuka secara langsung Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi sekaligus meresmikan Pasar Rakyat Desa Air Putih Ulu dalam Rangka Perayaan Hari Ulang Tahun ke-19 Kecamatan Plakat Tinggi.

Sandi Fahlepi mengatakan operasi pasar ini disamping mendukung program pengendalian inflasi daerah juga untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan menjamin keamanan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok masyarakat.

"Operasi pasar merupakan salah satu upaya konkret Pemkab Muba dalam menekan dan mengendalikan inflasi

daerah," ujarnya didampingi Pj Ketua TP PKK Muba Hj Triana Sandi Fahlepi.

Lanjutnya, Pemkab Muba melalui OPD terkait yang bekerja sama dengan Perum Bulog Divre Sumsel dan Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu melaksanakan operasi pasar agar kebutuhan pokok dapat tersedia dengan harga terjangkau, dan diharapkan menjadi bagian kontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah.

"Semoga kegiatan ini dapat terlaksana juga di kecamatan lain di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin," harapnya.

Kepala Disperindag Azizah SSos MT menjelaskan operasi pasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

"Saat ini harga kebutuhan pokok sudah mulai relatif naik, namun dari data inflasi terakhir di minggu pertama agustus,

alhamdulillah harga beras sudah tidak termasuk dalam komoditas yang mempengaruhi inflasi di kabupaten Muba," tuturnya.

Dikatakan, operasi pasar plakat tinggi ini merupakan kegiatan rutin yang ke 10 dari 20 titik operasi yang akan dilakukan mendatang berdasarkan rencana pada tahun anggaran 2024. Paket sembako berupa beras 5 kg dan minyak goreng 1 liter dapat dibeli masyarakat dengan harga Rp 69.000 yang sebelumnya harga Rp 79.000 sebelum diberikan subsidi.

"Terkait dengan peresmian pasar, semoga para pedagang dapat segera pindah dan menempatnya sehingga perdagangan bisa dilakukan secara optimal dan upaya ini dilaksanakan dalam peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Plakat tinggi," bebernya. ●





SERUAN KEAMANAN SIBER UNTUK BPD DAN NASABAHNYA

Serangan siber memang sudah sampai pelosok. Perbankan di daerah dan nasabahnya perlu sama-sama waspada.

Maka dari Pontianak, Kalimantan Barat, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyerukan kesiagaan kalangan perbankan di daerah untuk memitigasi ancaman kejahatan melalui jalur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) itu.

Dalam seminar nasional bertajuk "Ancaman Cyber Crime di Era Digital Bagi BPD Seluruh Indonesia", Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Yuddy Renaldi mengingatkan pentingnya kesiapan adopsi teknologi berbarengan dengan pelatihan dan kesadaran personel perbankan terhadap keamanan TIK. Dua hal ini, kata dia, akan sangat menentukan keberhasilan BPD dalam menghadapi ancaman serangan siber.

Yuddy, yang juga Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten (BJB) mengemukakan, berdasarkan data terbaru terlihat adan-

ya peningkatan signifikan dalam jumlah serangan siber di sektor keuangan, dengan kerugian global mencapai lebih dari \$4 miliar pada 2023. "Hal ini menegaskan pentingnya memperkuat sistem keamanan digital dan meningkatkan kesadaran akan ancaman ini di kalangan anggota Asbanda," ungkapnya dalam seminar yang berlangsung pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Ia mencontohkan Bank BJB yang telah menerapkan anti-fraud management system dan berbagai macam teknologi keamanan, seperti sistem keamanan berlapis (multilayer security) dan sistem keamanan siber (cyber security) untuk memproteksi keamanan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi digital. Nasabah juga diimbau untuk tidak pernah memberikan informasi data rahasia kepada siapa pun. Data yang dimaksud meliputi nomor PIN, user ID, kode OTP, kode akses, nomor Card Verification Value

(CVV) yakni tiga digit terakhir di bagian belakang kartu kredit atau debit, dan tanggal kadaluarsa (expire date) kepada pihak manapun.

Kemudian, jika menemukan link dan transaksi mencurigakan ataupun pihak yang mengatasnamakan anggota As-banda, termasuk Bank BJB, dapat langsung mengkonfirmasi ke berbagai saluran komunikasi resmi perusahaan. "Era keuangan digital merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi BPD di seluruh Indonesia. Digitalisasi layanan perbankan tidak hanya membantu bisnis bank tumbuh berkelanjutan, tetapi juga mendukung program-program pemerintah daerah," ujar Yuddy.

Menurut dia, BPD harus terus berinovasi untuk tetap relevan di tengah perkembangan teknologi. "BPD adalah kunci penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah di berbagai sektor. Kuatnya hubungan antara bank dengan pemerintah daerah turut menyukseskan transformasi digital yang dilakukan, termasuk memperkuat sistem untuk menangkalkan cybercrime," kata Yuddy.

Dalam seminar itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalbar Yusup Saprudin menyampaikan sejumlah temuan kerawanan serangan siber pada perbankan daerah. Ia mengemukakan, beberapa ancaman utama yang kerap dihadapi BPD, antara lain phishing dan social engineering, malware dan ransomware, hingga cryptojacking.

Yusup mengungkapkan, sejauh ini fokus perbankan lebih banyak pada digitalisasi yang mengikuti pergeseran perilaku nasabah. Padahal, investasi di bidang digital sendiri harusnya berbanding lurus dengan investasi di bidang cyber security. "Ditambah lagi, security awareness tidak merata pada pegawainya, cenderung hanya pada tim IT," ungkap Yusup.

Sebagai latar belakang, survei Gartner, perusahaan konsultan bidang keamanan siber terkemuka, yang dirilis pada Juni 2024 mengemukakan, kurang dari seperempat personel bidang sumber daya manusia saja (24 persen) yang mengakui fungsi SDM organisasi mereka memperoleh nilai maksimum dari teknologi (keamanan siber). Survei Gartner terhadap 85 pemimpin bidang SDM juga menemukan

hanya 35 persen yang yakin pendekatan mereka saat ini terhadap teknologi keamanan siber membantu mencapai tujuan bisnis.

Meski begitu, dua per tiga eksekutif bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan untuk meningkatkan pendekatan SDM terhadap teknologi, efektivitas fungsi mereka akan menurun. "Meskipun para eksekutif SDM percaya bahwa teknologi penting dan berdampak, mereka terus berjuang dengan cara mendapatkan nilai paling besar," kata Mark Whittle, wakil presiden penasihat dalam praktik SDM Gartner. "Tujuannya bukan untuk memaksimalkan nilai teknologi bagi SDM saja, tetapi untuk memaksimalkan nilai bisnis yang dapat dibawa oleh teknologi tersebut ke seluruh organisasi."

Nah, berkaitan dengan itu, Deputi Komisioner Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rizal Ramadhani mengungkapkan, lembaga-

ungkap dia.

Sebelumnya, pada 2021 OJK juga telah menerbitkan panduan manajemen risiko keamanan siber. Dalam panduan itu dijelaskan, sumber risiko keamanan siber dapat berasal dari pihak internal (sumber daya manusia, proses, dan sistem) maupun faktor eksternal Bank. Di bidang SDM, disebutkan antara lain ketidakmampuan SDM dalam melaksanakan tugas terkait pengamanan aset dan informasi Bank atau faktor kurangnya security awareness SDM dalam melaksanakan tugas dan proses kerja sehari-hari serta faktor lain terkait dengan integritas SDM bank.

Dari sisi proses, desain dan implementasi proses bisnis dalam Bank dapat menyebabkan terjadinya risiko siber bagi Bank. Kelemahan dalam proses tersebut antara lain dapat mencakup tidak adanya proses secure channel saat transmisi, audit aspek keamanan tidak dilaksanakan secara berkala, manajemen password yang buruk,



anyang sangat peduli terhadap keamanan data nasabah dari serangan siber. Untuk itu, OJK telah mengeluarkan blueprint transformasi digital untuk Industri Jasa Keuangan (IJK), termasuk perbankan.

"Blueprint ini diturunkan dalam POJK Nomor 11 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Teknologi Bank Umum, dan POJK 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Bank Umum. Ini yang mengatur tingkat kepatuhan bank dalam adopsi teknologi yang dilakukan secara bertanggung jawab,"

penggunaan akses internet publik yang tidak aman.

Sedangkan yang berasal dari sistem, kelemahan pada teknologi informasi dan infrastruktur Bank dapat menjadi sumber risiko siber. Kurangnya pengujian pengamanan, kontrol, dan monitoring ancaman dan kerentanan, kelemahan sistem, seperti tidak tersedianya anti malware/ anti virus, dan sistem yang tidak update menjadi jalan bagi masuknya risiko siber kepada Bank. ●

PUNYA REKENING RP1 MILIAR SIAP-SIAP DIPANTAU DITJEN PAJAK

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini berhak memantau informasi di dalam rekening nasabah bank di atas Rp1 miliar. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, mengatakan, penerbitan aturan tersebut sebagai upaya untuk memastikan validitas data perpajakan di DJP. Pasalnya, validitas data sangat diperlukan untuk kepentingan perpajakan.

"Kita mencoba untuk mengatur, memberikan dan menjaga validitas data yang akan kita dapatkan. Dipertukarkan menjadi lebih valid secara kualitas dan ketepatan" kata Suryo dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu, 14 Agustus 2024.

Kata Suryo, dalam PMK 47/2024 ini diatur tentang due diligence atau audit yang dilakukan oleh pihak perbankan dan lembaga terkait sebelum nasabah membuka rekening. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

"Apabila ada kesepakatan yang dilakukan un-

tuk menghindarkan data dan informasi yang dipertukarkan, kami berhak untuk mengevaluasi," jelas Suryo.

Selain itu, pertukaran data yang diatur dalam PMK ini merupakan hasil kesepakatan internasional. Dimana data yang dipertukarkan bukan hanya dari Indonesia ke luar negeri, tetapi juga sebaliknya.

Suryo menyebut pada Pasal 30A Ayat 3 tertulis bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan maksud dari kesepakatan yang terjadi serta memperoleh informasi keuangan berkaitan dengan kesepakatan, termasuk keterangan dan informasi lainnya.

Batas minimal saldo rekening orang pribadi yang dapat diperiksa oleh Ditjen Pajak sebesar Rp1 miliar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 PMK 19/2018 yang menggantikan ketentuan dalam PMK 70/2017 sebesar Rp200 juta. Sementara bagi entitas tidak terdapat batasan minimum saldo.

PMK itu juga mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan rekening keuangan yang agregat saldo atau nilai rekening keuangannya melebihi USD250.000.

Sebelumnya, PMK Nomor 47/2024 merupakan aturan



pelaksana dari Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan Tahun 2017. Aturan ini merupakan perubahan ketiga dari peraturan pelaksana sebelumnya, yaitu PMK Nomor 70/2017.

Dalam Bab VA aturan tersebut, dijelaskan tentang anti penghindaran yang melarang wajib pajak melakukan kesepakatan atau praktik dengan maksud dan tujuan menghindari kewajiban. Setiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangi informasi dari yang seharusnya disampaikan.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan memang sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan berdasarkan rekening keuangan. Menurutnya rekening keuangan merupakan satu hal yang tidak bisa dibantah oleh wajib pajak.

"Selama ini, data rekening keuangan sulit untuk dibantah oleh Wajib Pajak, dan sedikit sengketa antara petugas pajak dengan Wajib Pajak jika berdasarkan rekening bank," jelas Raden, Senin, 12 Agustus 2024.

Raden menjelaskan, selama ini, meski sudah ada Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan setelah diundangkannya UU 9/2017 tentang pengesahan Perppu 1/2017, pimpinan Ditjen Pajak masih terlalu hati-hati memanfaatkan undang-undang tersebut.

"Selama ini pimpinan Ditjen Pajak masih tidak mau mengubah cara pengawasannya dan untuk mendapatkan rekening bank, tetap harus melalui prosedur yang panjang," ujarnya.

Pada akhirnya, hanya sedikit pemeriksa pajak yang mengajukan permintaan buka rekening. Permohonan buka rekening baru akan dilakukan oleh pemeriksa pajak jika dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan.

"Selain itu juga lebih banyak yang menempuh cara praktis dengan meminta rekening ke Wajib Pajak yang diperiksa. Namun cara ini ada kelemahannya, jika Wajib Pajak memiliki 12 re-

kening, dan yang dilaporkan ke kantor pajak hanya 7 rekening, maka yang 5 tidak akan diberikan kepada kantor pajak walaupun dilakukan pemeriksaan," ungkapinya.

Menurut Raden, pengawasan yang efektif dan berdampak bagi penerimaan pajak yaitu kewenangan yang diberikan oleh UU 9/2017, di mana Ditjen Pajak melakukan pengawasan aliran uang di Indonesia. Model pengawasannya mirip dengan PPATK, namun pengawasan oleh Ditjen Pajak untuk kepentingan pengawasan kepatuhan perpajakan.

"Ditjen Pajak harus mendapatkan



transaksi rekening keuangan dari seluruh lembaga keuangan. Kemudian data-data tersebut dimasukkan ke dalam mesin Compliance Risk Management (CRM). Berdasarkan hasil pengolahan CRM, Wajib Pajak yang memiliki risiko tinggi, wajib diperiksa," jelas Raden.

Sayangnya, hingga saat ini Ditjen Pajak belum memasukkan data rekening keuangan ke dalam mesin CRM. Sehingga memang sudah saatnya melakukan pengawasan berdasarkan rekening keuangan.

"Saya yakin, jika Ditjen Pajak benar-benar mengoptimalkan data rekening keuangan untuk pengawasan, maka

tax ratio akan lebih cepat naik. Masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh lapor pajak," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, menyebut lazim saja kebijakan tersebut dilakukan pemerintah. Ia pun tak merasa keberatan jika rekeningnya diakses pihak DJP.

"Nggak masalah ya, itu sih oke saja. Kan namanya negara ya, itu silahkan aja kalau mau akses, kita (pengusaha hotel dan restoran) nggak ada masalah," kata Hariyadi, Senin, 12 Agustus 2024.

Kendati demikian, Hariyadi mengaku terganggu dan bermasalah jika pihak DJP tidak berlaku adil dan/atau sengaja mencari-cari kesalahan dari pengusaha. Biasanya, pengusaha akan merasa khawatir atau terganggu lantaran pemerintah yang memang sering mencari-cari kesalahan dan berlaku tidak adil.

"Kita nggak ada masalah, kecuali kalau dicari-cari masalah. Nah itu ngajakin berantem namanya. Selama dia fair sih oke saja. Saya rasa pengusaha nggak ada merasa terganggu, yang penting pokoknya (pemerintah) nggak cari-cari masalah. Kan biasanya suka takut nanti gimana apalah, karena (itu khawatir) dicari-cari kesalahan. Sepanjang itu memang untuk kebaikan ya nggak apa-apa," ujarnya.

Dia berharap kepada pemerintah untuk memberikan bimbingan terlebih dulu ketimbang langsung menyalahkan atau memberikan hukuman bagi pengusaha, jika memang di kemudian hari ditemui ada kesalahan.

"Kalau ada sesuatu kesalahan, misalnya di administrasi, ya dibimbing saja gitu kan. Namanya kita di perusahaan kan anak-anak yang ngurusin pajak mungkin kurang teliti apa gitu. Nah, jadi lebih kepada fungsi pembinaan itu lebih bagus banget. Karena saya yakin semangatnya teman-teman di hotel ataupun di restoran pasti juga mereka mau patut mau dengan regulasi pajak gitu. Yakin lah Insya Allah nggak ada yang punya niat jelek," tegasnya. •



JANJI PRABOWO LANJUTKAN IKN

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas Presiden Joko Widodo. Bahkan, Menteri Pertahanan itu mengungkapkan bahwa dirinya merupakan salah satu investor dalam pembangunannya.

"Salah satu investornya saya sendiri sebagai pengusaha," ujar Prabowo setelah mendampingi Presiden Jokowi dalam wawancara dengan media di IKN, Senin, 12 Agustus 2024.

Prabowo pun mengaku ingin jika ia menjadi bagian dari pihak yang bisa menyelesaikan pembangunan Ibu Kota baru Indonesia itu.

"Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan," tambah dia.

Di sebelah Kepala Negara, Prabowo menuturkan, pembangunan IKN tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun demikian, ia meyakini dalam lima tahun ke depan, Ibu Kota baru bakal bisa dinikmati oleh masyarakat.

"Kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar ya, pekerjaan yang lama yang berat,

tapi saya percaya dalam 3,4,5 tahun fungsi daripada ibukota ini sudah bisa berjalan ya," kata Prabowo.

"Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan saya juga banyak membangun, Saya kira kalau kita lihat, optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan," ucapnya.

Untuk melanjutkan pembangunan IKN tahun depan, Presiden Jokowi sendiri hanya mengalokasikan anggaran kepada Prabowo sebesar Rp143,1 miliar. Alokasi dana ini terutang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan angka tersebut hanya acuan dasar baseline. Menurutnya, kelak Prabowo bisa menyesuaikan anggaran itu sesuai prioritas.

"Semuanya di-baseline-kan karena untuk memberikan otoritas kepada



presiden terpilih untuk tentukan, sesuaikan, dengan prioritas dengan kabinetnya,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan Prabowo dan Jokowi sudah bertemu dan keduanya berkomitmen dalam pembangunan IKN. Kendati, Prabowo akan melihat kondisi APBN dan menentukan prioritas.

“Nanti kita akan lihat ada tambahan lokasinya berapa, tapu beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi akan jadi prioritas. Bagaimana dialokasikannya? Melalui PUPR atau OIKN? Itu berdasarkan kesiapan institusinya,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, Prabowo menyatakan telah menyiapkan pos anggaran besar untuk melanjutkan pembangunan IKN selama masa pemerintahannya. Prabowo menjelaskan bahwa anggaran yang disiapkan akan mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan IKN.

“Untuk ini saya juga ingin meyakinkan Otorita (IKN) bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting (dalam pem-

bangunan IKN),” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, IKN.

Namun, dalam pemaparannya, Prabowo tidak mengungkapkan rincian besaran anggaran yang akan disediakan.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta para menteri lainnya yang telah membantu menyiapkan APBN untuk

pemerintahannya.

Dengan persiapan APBN tersebut, Prabowo merasa optimis dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. “Walaupun tantangan global besar tapi kekuatan kita besar. Dan dukungan Pak Presiden sekali lagi saya sampaikan dan semua menteri membuat saya sangat optimistis,” katanya.

Prabowo juga menekankan pentingnya pembangunan gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif di IKN. Menurutnya, prioritas utama



adalah membangun gedung DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA). Jika gedung-gedung ini sudah ada, maka pembangunan substansi IKN dapat dianggap selesai. Oleh karenanya, Prabowo meminta Otorita IKN segera memulai membuat sayembara untuk desain pembangunan gedung DPR-MPR, MA, MK beserta perumahan anggotanya.

nan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan, pemerintah masih memiliki sisa anggaran lainnya dari masing-masing kementerian/lembaga (KL) untuk kelanjutan proyek IKN di 2025.

Anggaran sisa itu berasal dari instansi pemerintah yang bertugas langsung membangun IKN, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan

"Total sekarang yang sudah di IKN Rp82 triliun. Yang sudah terlaksana sekitar Rp70-an triliun. Jadi masih ada anggaran yang belum diselesaikan," terang Suharso.

Suharso menegaskan, pemerintah melalui Kementerian/Bappenas, tidak akan begitu saja melepas tanggung jawab pendanaan terhadap IKN. Sebab, kehadiran IKN sebagai ibu kota baru Indonesia sudah termasuk dalam visi Indonesia Emas 2045.

"Yang penting begini ya, poin saya adalah 2025 bagi kami di Bappenas adalah window of opportunity untuk masuk ke Indonesia Emas 2045. Window-nya kalau dibuka lagi sedikit adalah RPJMN 2025-2029," tegasnya.

"Kita ingin mendorong dengan awalan yang baik. Karena itu, kita mendiskusikannya dengan timnya Pak Prabowo. Sekarang tinggal mau diletakkan di mana, gitu. Tapi pagu indikasinya sudah ada," ujar Suharso.

Kepercayaan Investor

Pengamat ekonomi dari UIN Syarif Hidayatullah, Hendra Kholid, mengapresiasi komitmen Prabowo Subianto memastikan keberlanjutan program pemerintah Presiden Jokowi, di antaranya terkait percepatan pembangunan IKN.

"Tentu apresiasi terhadap keinginan presiden terpilih Pak Prabowo untuk kemudian melanjutkan, karena kalau tidak ada komitmen untuk melanjutkan, maka IKN ini akan terbengkalai, tapi dengan adanya keinginan presiden terpilih untuk melanjutkan ini merupakan apresiasi dan tentu penghargaan dari kita bersama karena kalau tidak nanti akan terbengkalai," ujar Hendra, Rabu, 14 Agustus 2024.

Menurut Hendra, langkah Prabowo itu dinilai bisa menjadi landasan serta menumbuhkan kepercayaan para investor untuk berinvestasi di IKN.

"Ketika Prabowo punya komitmen untuk meneruskan IKN, maka itu merupakan garansi bagi para investor artinya investor punya kepastian dan itu menjadi sebuah garansi," paparnya.

Dikatakan Hendra, transisi kepemimpinan Jokowi ke Prabowo yang



ia menekankan, desain gedung lembaga legislatif dan yudikatif itu tidak boleh bertabrakan dengan pakem desain bangunan di IKN yang sudah ada.

"Jadi MPR, DPR, kemudian yudikatif-nya. Kalau itu sudah selesai sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah beroperasi di sini. Jadi kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Yang lain-lain itu akan menyusul," ujarnya.

Menteri Perencanaan Pambangu-

Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Karena ada yang di-carry over dari KL-KL sebelumnya, seperti menyelesaikan bandara, sanitasi, jalan, untuk digitalisasi," imbuh Suharso.

Sebagai contoh, ia menyebut pemerintah telah mengalokasikan total anggaran Rp82 triliun untuk pembangunan ibu kota baru. Namun, dana tersebut belum terealisasi sepenuhnya.

berjalan mulus dapat meningkatkan kepercayaan dan menjadi magnet para investor menanamkan investasinya dalam pembangunan IKN.

"Karena persoalannya investasi itu kan butuh trust, butuh kepercayaan. Nah, kepercayaan itu tentu bisa kita lihat dari komitmen dan janji presiden terpilih," ucapnya.

Lebih lanjut, Hendra menuturkan, pemerintah perlu segera membangun pusat perekonomian baru di IKN yang diawali dengan memupuk ekosistem ekonomi agar kian subur.

"IKN harus punya daya tarik keuntungan bagaimana caranya, yaitu dengan membangun pusat perekonomian hadir di IKN ini seperti mall, perusahaan asuransi dan lainnya," ucapnya.

"Jadi kenapa sih harus ada daya tarik keuntungan, kalau ada daya tarik keuntungan, maka dengan sendirinya investor akan datang lalu kemudian orang akan pindah ke IKN dan berbagai macamnya, sehingga bagi saya ke depan IKN juga bisa menjadi pusat keuangan Nusantara," imbuhnya.

Selain itu, kata Hendra, untuk menarik minat investor pemerintah diminta untuk memberikan juga kemudahan dalam berinvestasi di IKN.

Sebenarnya, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, Hendra menuturkan sudah cukup tinggal bagaimana pemerintah mengimplementasikannya di lapangan.

"Kedua bagi saya apa sih yang menjadi daya tarik adanya kemudahan, meskipun ada daya tarik tetapi sulit investor tidak akan datang. Kemudahan ini sebenarnya sudah dibuat oleh pemerintah ada banyak sekali kemudahan berinvestasi melalui PP 12 Tahun 2023, itu salah satu kemudahan berinvestasi di bumi Nusantara," bebernya.

Hendra optimis keberlanjutan pembangunan IKN ke depan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, serta memberikan

pemerataan ekonomi bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa.

"Saya yakin dan punya optimisme IKN ini akan berlanjut lalu kemudian memberikan tiga hal kunci yaitu pertama IKN ini akan memberikan pertumbuhan ekonomi, yang kedua dia akan menjadi pemerataan ekonomi dan yang ketiga sustainability keberlanjutan, itulah yang kira-kira kita harapkan ke depan," urainya.

Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, Igor Dirgantara, juga menyatakan hal senada, di mana Prabowo menunjukkan komitmen untuk melanjutkan program Presiden

Selain itu, Prabowo juga mendapatkan penugasan untuk hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait dengan Gaza untuk merespons isu geopolitik internasional.

Di dalam negeri, Prabowo menjadi pengarah dalam koalisi pemerintahan ke depan. Apalagi koalisi Indonesia maju (KIM) makin mesra.

Untuk itu, program-program yang akan dieksekusi ke depan setelah pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah keberlanjutan, baik itu makan siang bergizi, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun hilirisasi.

Dijelaskan Igor, posisi Prabowo san-



Jokowi.

"Itu menunjukkan bahwa komitmen kuat Prabowo ketika menggantikan Jokowi pada bulan Oktober 2024. Dia akan tegas melanjutkan program-program dari pemerintahan Jokowi," kata Igor.

Menurut dia, perlakuan istimewa Jokowi kepada Prabowo yang ditampilkan ke publik merupakan wujud sinkronisasi kepemimpinan untuk keberlanjutan pemerintahan ke depan.

Sejak diumumkan sebagai calon presiden terpilih pada Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi sudah melakukan sinkronisasi kepemimpinan. Salah satunya dengan memperkenalkan Prabowo sebagai calon presiden terpilih di hadapan delegasi KTT Ke-10 World Water Forum di Bali pada bulan lalu.

gat tepat buat pembangunan bangsa ke depan. Prabowo akan menjadi jalan tengah bagi semua pihak, baik itu antara Jokowi dan PDIP maupun Jokowi dan Megawati hingga mengakhiri perpecahan cebong kampret atau cebong kadrun.

Terkait dengan isu keretakan Prabowo dan Jokowi pasca-Pilpres 2024, Igor memastikan hal tersebut tidak akan terjadi karena di awal Prabowo sudah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program pemerintahan Jokowi.

Prabowo, kata Igor, memiliki sikap prajurit patriotik yang memegang teguh komitmennya. Maka, antara Jokowi dan Prabowo tidak akan dipisahkan karena keduanya membawa spirit untuk mewujudkan Indonesia Maju. ●

RAWAN

Gunawan Effendi

Rawan berarti mudah terganggu, rentan. Begitu-
lah maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
telah memetakan wilayah-wilayah rawan dan
menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024.
Tercakup di dalamnya kerawanan Pemilihan Kepala Dae-
rah (Pilkada) Serentak yang pemungutan suaranya terjad-
wal pada 27 November 2024.

Dari sisi pemilahan waktu, kerawanan Pilkada 2024 da-
pat disederhanakan menjadi persiapan penyelenggaraan,
penyelenggaraan, dan pasca atau sesudah penyelengga-
raan. Sedangkan dalam substansi kerawannya, Bawa-
slu berfokus pada empat dimensi atau konteks. Boleh juga
disebut ranah. Berturut-turut, empat dimensi itu adalah
sosial-politik, penyelenggaraannya, kontestasi, dan parti-
sipasi. Dengan empat dimensi ini, kerawanan berarti po-
tensi pelanggaran asas-asas pemilihan demokratis yang
jujur dan adil.

Pada dimensi sosial politik tercakup di dalamnya
antara lain kea-
manan baik
fisik maupun
psikis segenap
p e m a n g k u
kepentingan pe-
milihan. Karena
itu keamanan
dari wabah dan
bencana alam
pun berada
dalam konteks
sosial politik.
Terlebih lagi
soal kekerasan,
intimidasi, atau
perusakan.

Dimensi so-
sial politik juga
mencakup po-
tensi pelangga-
ran kewenangan
penyelenggaraan pemilihan. Indikasinya adalah putusan
sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terha-
dap jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu
di semua tingkatan. Tercakup pula rekomendasi Bawaslu
yang tak ditindaklanjuti oleh KPU. Juga rekomendasi Ba-
waslu tentang perubahan rekapitulasi hasil pemungutan
suara.

Tak kalah penting adalah potensi pelanggaran ke-
wenangan oleh penyelenggara negara terhadap asas
jujur, adil, dan demokratis dalam pemilihan. Sudah jelas
bahwa penyelenggara negara wajib netral terkait dengan

jabatan atau kedudukan yang melekat pada dirinya.

Dari ranah sosial politik itulah maka potensi pelanggaran
asas pemilihan dapat meluas ke dimensi-dimensi lainnya.
Harap maklum otoritas atau kewenangan yang melekat
pada jabatan memang sulit ditolak oleh jajaran di bawahnya.
Jika penyelenggara pemilu dan penyelenggara ne-
gara menyalahgunakan kewenangannya untuk mem-
pengaruhi hasil pemilihan, asas jujur, adil, dan demokratis
serta-merta ternoda dan mengurangi legitimasi (kesahi-
han) hasil pemilihan.

Dalam kenyataannya, pada masa kampanye, para pe-
nyelenggara negara yang juga menjadi pejabat partai poli-
tik yang mengusung calon tertentu biasanya mengambil
cuti untuk ikut berkampanye menggalang suara bagi figur
yang dicalonkan dalam pemilihan. Tetap ada pemisahan
antara penyelenggara negara yang aktif dan dalam kondi-
si cuti. Namun itu dalam konteks penyelenggaraan pemili-
han. Selebihnya, dimensi-dimensi lain dalam kerawanan

pemilu yang
menjadi ranah
pengawasan
Bawaslu ada-
lah aspek
prosedural
pemilihan ter-
masuk politik
uang, logistik
pemilihan, ma-
teri kampanye,
dan juga par-
tisipasi dalam
pemilihan.

Toh yang
terjadi sebe-
lum pemilihan
adalah manu-
ver para pe-
nyelenggara
negara yang
juga politisi tera-

filiasi partai dalam menentukan pasangan calon yang akan
diajukan dalam pemilihan. Pada konteks ini adalah pasan-
gan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak
2024. Dinamikanya masih berada di luar kewenangan
Bawaslu maupun KPU. Maka dinamika itu adalah pentas
politik tersendiri. Sebagai pentas politik, para pemilih juga
dapat menilai sejak awal calon mana yang akan dipilihnya.

Namun, tak perlu kecewa jika calon favorit kita ternyata
tak mendapat dukungan memadai untuk maju seba-
gai pasangan calon. Karena politik adalah seni berbagai
kemungkinan. ●





RAPBN 2025 BERKUTAT DENGAN MIDDLE INCOME TRAP

Setiap 16 Agustus, sehari menjelang peringatan ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia, Presiden menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Kali ini Presiden Joko Widodo menyampaikannya untuk terakhir kali, karena pada 2025, kepala pemerintahan sudah berganti.



Nah, dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di hadapan wakil rakyat pada Jumat, 16 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya peran APBN untuk memperkuat lompatan kemajuan Indonesia. Presiden menegaskan APBN harus digunakan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

"Ke depan, peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkuat lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja," ujar Presiden Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI.

Presiden mengemukakan, RAPBN 2025 disusun dengan berbagai asumsi dasar, termasuk inflasi yang dijaga pada kisaran 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,2 persen. Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih bergantung pada permintaan domestik. "Daya beli masyarakat akan dijaga ketat dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta program bantuan sosial dan subsidi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. "Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan kita," lanjutnya.

Presiden juga menyampaikan proyeksi nilai tukar Rupiah yang diperkirakan berada di sekitar Rp16.100 per dolar AS, dengan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan pada 7,1 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan mencapai 82 Dolar AS per barel, dengan lifting minyak sebesar 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara

minyak per hari.

Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia. Sikap tanggap itu, sambungnya, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas keuangan yang kokoh.

Nah, tentu saja RAPBN 2025 yang disampaikan dalam pidato adalah ringkasan pendek mengenai masalah dan upaya yang akan dilakukan terutama yang terkait dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Rinciannya akan

triliun atau naik 8,66% dibandingkan APBN 2024. Kenaikan belanja negara ini juga akhirnya berdampak pada defisit anggaran yang semakin melebar dari 2,29% (APBN 2024) menjadi 2,53% pada RAPBN 2025 atau dari Rp522,8 triliun menjadi Rp616,2 triliun.

Jokowi mengklaim defisit APBN 2025 yang bakal dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto akan ditopang oleh sumber pembiayaan yang aman. Artinya, akan ada pinjaman atau utang pada anggaran 2025.

"Defisit anggaran tahun 2025 diren-

Dari total pinjaman Rp 133,30 triliun yang dianggarkan, hanya sebesar Rp 5,17 triliun ditarik dari dalam negeri. Kemudian, pemerintah akan menarik pinjaman luar negeri Rp 216,50 triliun (bruto) dan menggunakan Rp 88,37 triliun untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman sehingga pinjaman luar negeri neto mencapai sebesar Rp 128,13 triliun. Selanjutnya sisa penerbitan SBN dan penarikan pinjaman setelah membiayai defisit akan digunakan untuk pembiayaan investasi, pemberian pinjaman dan pembiayaan lainnya.



dibahas lebih dalam lagi bersama wakil rakyat sebelum disahkan menjadi Undang-Undang yang menjadi landasan pemerintah untuk menyelenggarakan negara di bidang ekonomi pada 2025.

Salah satu yang menjadi perhatian yakni target penerimaan pendapatan negara dalam RAPBN 2025 sebesar Rp2.996,9 triliun. Target penerimaan negara itu nantinya terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

Sedangkan belanja negara dalam RAPBN 2025 melonjak sebesar Rp3.613

triliun atau naik 8,66% dibandingkan APBN 2024. Kenaikan belanja negara ini juga akhirnya berdampak pada defisit anggaran yang semakin melebar dari 2,29% (APBN 2024) menjadi 2,53% pada RAPBN 2025 atau dari Rp522,8 triliun menjadi Rp616,2 triliun.

Secara spesifik pemerintah berencana menambal defisit anggaran tersebut lewat penerbitan surat berharga negara (SBN) dan pembiayaan melalui mekanisme pinjaman. Sedangkan besaran surat utang (SBN) yang akan diterbitkan untuk menopang belanja pemerintah tahun depan adalah senilai Rp 642,56 triliun. Sementara dari pinjaman sebesar Rp 133,30 triliun. Artinya total pembiayaan utang tahun pertama Prabowo menjabat sebagai presiden mencapai Rp 775,86 triliun.

Toh Jokowi menegaskan pentingnya optimalisasi pendapatan negara, belanja yang berkualitas, serta pembiayaan yang inovatif sebagai fondasi utama RAPBN 2025. Ia juga mengemukakan optimalisasi rasio perpajakan akan menjadi fokus utama pemerintah untuk memperkuat ruang fiskal.

Langkah ini akan dilaksanakan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif, keberlanjutan dunia usaha, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat. "Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," ujar Presiden.

Sedangkan mengenai pengelolaan tambahan pembiayaan anggaran melalui utang, Jokowi menegaskan pemerintah mengupayakan cara yang paling efisien. "Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan," tambahnya.

Selanjutnya Presiden mengemukakan belanja negara dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Untuk sektor pendidikan, anggaran sebesar

ran, efektif, dan efisien.

Di sektor kesehatan, RAPBN 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan. "Percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis," ucap Presiden.

Dalam hal ketahanan pangan, anggaran sebesar Rp124,4 triliun diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, memperbaiki rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi

kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan antardaerah, serta memperkokoh kerja sama antardaerah. "Peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan akses dan kualitas layanan publik," ujarnya.

Dari sisi, kelanjutan penyelenggaraan negara, pidato terakhir mengenai RAPBN oleh Presiden Jokowi juga menandai berakhirnya 10 tahun masa pemerintahannya. Dalam perjalanan 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, indikator kesejahteraan masyarakat pun semakin meningkat, ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan turun tajam menjadi



Rp722,6 triliun dialokasikan untuk berbagai program strategis.

"Dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset," ungkap Presiden.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun akan difokuskan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasa-

petani.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu prioritas utama dengan anggaran sebesar Rp400,3 triliun. "Terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," ungkap Presiden.

Terakhir, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran. Anggaran transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun diharapkan dapat meningkatkan harmonisasi

9,03 persen di tahun 2024 dan angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83 persen pada 2024. Pada tahun yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen.

Ekonomi Indonesia mampu selalu terjaga di kisaran 5 persen, bahkan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen. Lapangan kerja pun bertambah sebanyak 21,3 juta dalam kurun waktu 2015-2024.

Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70 persen, mencapai 259 miliar dolar AS pada 2023. Nilai ekspor Indonesia pada Juli 2024 mencapai 22,21 miliar

dolar AS atau naik 6,55 persen dibanding ekspor pada Juni 2024. Sementara jika dibandingkan dengan Juli 2023, nilai ekspor naik sebesar 6,46 persen.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus menjaga inflasi agar tetap terkendali dalam sasaran, melalui koordinasi dari pusat hingga daerah dan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Inflasi Indonesia dapat terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen.

Pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Industri perbankan tetap berdaya tahan dan

sidi untuk menjaga daya beli, sehingga masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan mereka. Pendapatan negara dimaksimalkan, dan belanja negara juga dibuat lebih efisien dan produktif, termasuk untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang semakin dirasakan kemajuannya oleh masyarakat, mulai dari jalan tol, bendungan dan irigasi, pelabuhan dan bandara, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Reformasi pajak terus berlanjut melalui peningkatan basis pajak dan penambahan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Menurut Peneliti ekonomi Center of

rentan untuk terkena dampak dari gejolak perekonomian dan ketika gejolak perekonomian terjadi mereka yang kemudian bekerja di sektor informal umumnya akan terdistorsi pendapatannya, sehingga di saat yang bersamaan juga akan berdampak terhadap kesejahteraan mereka.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama menengah ke bawah, juga perlu diimbangi dengan upaya penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik masyarakat atau angkatan kerja saat ini. Ke depan, upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi juga perlu diimbangi dengan upaya memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan



mampu menyalurkan kredit, terutama untuk UMKM, sektor produktif dan pembiayaan hijau. Ketika guncangan terjadi, pemerintah siap dan mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meredam guncangan dari berbagai dampak rambatan global, sebagaimana yang ditunjukkan saat pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik yang terjadi di dunia.

Selain itu, pemerintah memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat kelas bawah dan rentan, termasuk melalui pemberian bantuan sosial dan sub-

Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf R Manilet, pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ada beberapa pencapaian yang perlu diapresiasi, antara lain tren jumlah penduduk miskin dan pengangguran relatif mengalami penurunan. Namun di sisi lain, terjadi penurunan kelas menengah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pandemi dan relatif masih tingginya proporsi pekerja atau ekonomi informal dalam struktur perekonomian Indonesia.

Besarnya proporsi pekerja sektor informal menjadikan banyak masyarakat

kemudian dapat dirasakan oleh semua kelompok golongan.

Bantuan sosial ataupun subsidi ke kelas menengah yang rentan juga diperlukan untuk memastikan mereka tidak sangat tertekan daya belinya ketika terjadi guncangan perekonomian. Ringkasnya, kelas menengah adalah gambaran utuh tentang situasi middle income trap yang disinggung Jokowi dalam pidatonya. Itulah tantangan penyelenggaraan negara pada 2025 dan agaknya juga untuk beberapa tahun berikutnya pada pemerintahan baru Prabowo-Gibran. ●

RAPBN 2025 RUANG FISKAL UNTUK PRESIDEN BARU

Ruang fiskal bukanlah semacam kamar, melainkan keleluasaan dalam penggunaan anggaran. RAPBN 2025 ternyata menyediakannya untuk pemerintahan baru setelah Presiden Jokowi mengakhiri tugasnya pada 20 Oktober 2024.

Semua sudah terungkap dalam penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai otoritas fiskal (anggaran) pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Bu Menkeu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merancang anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) yang lebih rendah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2025. Rancangan ini, menurut dia, merupakan salah satu upaya memberi ruang fiskal kepada pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ruang fiskal itu

memungkinkan penyesuaian atau perubahan alokasi anggaran untuk program unggulan, yang tak terkecuali adalah makan bergizi gratis.

Kemenkeu mengalokasikan anggaran belanja pemerintah pusat senilai Rp 2.693,2 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2025. Angka ini tumbuh 9,1 persen dari alokasi belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024 yang senilai Rp 2.467,5 triliun.

Dalam alokasi belanja pemerintah pusat itu, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp 976,8 triliun. Angka ini lebih rendah dari belanja K/L



dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 1.090,8 triliun.

"Kenapa belanja K/L relatif lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang Rp 1.090,8 triliun? Karena menghormati presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan improvement," ungkap Bu Menkeu dalam konferensi pers RAPBN 2025 dan nota keuangan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Di sisi lain, sambungnya, belanja non K/L ditetapkan sebesar Rp 1.716,4 triliun dalam RAPBN 2025. Angka ini lebih tinggi dari alokasi belanja non K/L dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 1.376,7 triliun.

Menteri Ani menambahkan, pemerintahan berikutnya dapat melakukan penyesuaian anggaran belanja untuk sejumlah program unggulan setelah bertugas efektif pada 20 Oktober 2024. Beberapa program yang sudah disiapkan adalah program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun dan pro-

gram revitalisasi sekolah sebesar Rp 20,3 triliun dan sejumlah program unggulan lainnya.

"Makanya belanja K/L relatively (kecil), kecuali yang dari presiden terpilih menyampaikan ingin melakukan A,



Kenapa belanja K/L relatif lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang Rp 1.090,8 triliun? Karena menghormati presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan improvement.

B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain (ditahan) di belanja non-K/L yang makanya menjadi tinggi, yaitu Rp1.716,4 triliun," tegasnya.

Nah, Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 sudah memuat rincian belanja K/L itu. Sebagian besar K/L mengalami penurunan anggaran dibandingkan dengan nilai perkiraan realisasi (outlook) APBN 2024.

Sebagai penerima anggaran terbesar adalah Kementerian Pertahanan yang menteri-nya masih dijabat Prabowo Subianto. Alokasi anggaran untuk Kemenhan pada RAPBN 2025 tercatat Rp165,2 triliun. Angka ini masih lebih rendah dari Outlook APBN 2024 yang tercatat Rp175,1 triliun.

Di urutan kedua Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapatkan alokasi senilai Rp126 triliun di 2025. Angkanya naik Rp2,4 triliun dibandingkan dengan perkiraan belanja 2024.

Kementerian Kesehatan juga mendapat alokasi plafon belanja di urutan



berikutnya, mencapai Rp90,6 triliun. Pemerintah hanya sedikit menurunkan anggaran kementerian ini dari Outlook 2024 yang menembus Rp93,3 triliun.

Di urutan keempat ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) senilai Rp83,2 triliun. Masih lebih rendah Rp9,6 triliun dibandingkan dengan anggaran tahun berjalan.

Berikutnya, di posisi kelima ada Ke-

16 Agustus 2024. Namun, setelah kejelasan status badan yang mengelola sendiri belanja Rp71 triliun, anggarannya tercatat lebih besar dari K/L lain. Bahkan, badan ini langsung masuk dalam urutan ke-8 K/L penerima alokasi anggaran sejumlah kementerian.

Antara lain Kejaksaan Republik Indonesia yang semula berada di urutan 10 K/L penerima anggaran dalam RAPBN. Pada RAPBN 2025 Kejaksaan

6. Kementerian Sosial: Rp77,2 triliun (Outlook 2024 Rp76,2 triliun)
7. Kementerian PUPR: Rp75,6 triliun (Outlook 2024 Rp164,6 triliun)
8. Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun
9. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun (Outlook 2024 Rp67,4 triliun)
10. Kementerian Perhubungan: Rp24,8 triliun (Outlook 2024 Rp38,9 triliun)

Masih berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, PUPR hanya



menterian Agama. Kemenag mendapatkan jatah belanja Rp78 triliun, naik cukup banyak dibandingkan Outlook 2024 sebesar Rp70,4 triliun.

Nah, Presiden Joko Widodo yang membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Beleid ini mulai berlaku pada 15 Agustus 2024 juga berdampak pada RAPBN 2025.

Anggaran Badan Gizi Nasional belum sempat masuk rincian dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 karena baru dibentuk sehari sebelum penyampaian pidato Nota RAPBN 2025 pada

diproyeksikan mendapat anggaran senilai Rp23,3 triliun.

Berikut daftar lengkap 10 K/L penerima anggaran terbesar di 2025:

1. Kementerian Pertahanan: Rp165,2 triliun (Outlook 2024 Rp175,1 triliun)
2. Polri: Rp126 triliun (Outlook 2024 Rp123,6 triliun)
3. Kementerian Kesehatan: Rp90,6 triliun (Outlook 2024 Rp93,3 triliun)
4. Kemendikbud Ristek: Rp83,2 triliun (Outlook 2024 Rp92,8 triliun)
5. Kementerian Agama: Rp78 triliun (Outlook 2024 Rp70,4 triliun)

mendapat alokasi Rp75,6 triliun pada RAPBN 2025. Ini turun drastis dibandingkan Outlook 2024 yang diperkirakan mencapai Rp164,6 triliun.

Kementerian Pertanian alokasinya pada RAPBN turun juga. Pada 2025, Kementan hanya mendapatkan Rp7,9 triliun, turun cukup banyak dari outlook tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp13,3 triliun.

Begitu pula Kementerian Perhubungan yang anggarannya dipangkas Rp14,1 triliun, dari Rp38,9 triliun menjadi Rp24,8 triliun. Kementerian ESDM tahun depan bahkan hanya diberi

Rp3,9 triliun, turun dari Rp6,5 triliun pada 2024.

Lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Rp1,8 triliun di 2025, turun dibandingkan tahun ini sebesar Rp3,4 triliun. Nasib serupa dialami Kementerian Koperasi dan UKM yang anggarannya turun dari Rp1,4 triliun menjadi Rp900 miliar.

Penurunan anggaran yang cukup besar juga dialami Badan Intelijen Negara (BIN) yang pada Outlook 2024 diperkirakan mencapai Rp29,8 triliun. Sedangkan di tahun pertama kepemimpinan Prabowo hanya dijatah Rp6,7 triliun atau dipangkas Rp23,1 triliun. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya mendapatkan Rp7,7 triliun di 2025, turun setengahnya dari Rp14,6 triliun.

Pemangkasan anggaran juga menimpa K/L yang pada 2024 ini sibuk menggelar pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Anggaran KPU turun dari Rp48,5 triliun ke Rp3,1 triliun dan Bawaslu turun menjadi Rp2,4 triliun dari Rp15,2 triliun.

Bu Menkeu menjelaskan anggaran K/L di masa transisi ini tak seluruhnya kecil. Sejumlah K/L rupanya masih mendapat kenaikan alokasi anggaran di RAPBN 2025.

Kejaksaaan yang mendapat anggaran Rp23,3 triliun pada RAPBN 2025, sebenarnya naik Rp6,4 triliun dibandingkan dengan outlook realisasi APBN 2024. Begitu pula kenaikan Rp3,5 triliun menjadi Rp21,2 triliun untuk Kementerian Hukum dan HAM.

Toh dampak alokasi belanja non-K/L yang tinggi, antara lain belanja K/L pada tahun depan diusulkan hanya senilai Rp976,8 triliun, turun bila dibandingkan dengan alokasi belanja K/L tahun ini yang mencapai Rp1.090,8 triliun.

"Sebagian besar, cukup signifikan, itu masih di-retain nanti presiden terpilih yang akan menentukan. Format untuk nanti berapa kementerian ditambahkan anggarannya akan ditetapkan Presiden Terpilih," tambah Menkeu Ani.

Menurut Bu Menkeu, belanja akan dialokasikan ke kementerian-kementerian yang ditugasi untuk melaksanakan program-program presiden terpilih

pada Oktober 2024.

"Presiden baru dengan kabinet akan melihat program itu, dan DIPA-DIPA akan dipindahkan dari belanja pemerintah pusat yang non-K/L ke katakana-lah menteri pertanian, PUPR, kesehatan, atau pendidikan," ujar Sri Mulyani.

Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa RUU APBN diambil keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Dengan demikian, tenggat waktunya adalah Oktober setiap tahun.

APBN 2025 yang disetujui DPR kelak terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui

MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-APBN) Tahun 2025 dilakukan secara konstruktif guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ini masih terkait dengan rangkaian transisi penyelenggaraan negara di sayap eksekutif maupun legislatif. "Besar harapan kami, pembahasan RAPBN 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju, adil dan makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045," ujar Presiden Jokowi.

Apakah harapan Presiden akan dipenuhi DPR? Jawabnya masih menunggu September-Oktober saat pem-



RUU APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Dalam konteks itulah Bu Menkeu mengemukakan semuanya akan lebih jelas pada Oktober terkait dengan RAPBN 2025. "Nanti pada Oktober bisa dialokasikan dan biasanya nanti naik pada eksekusi belanja K/L terpilih, untuk tugas tertentu apakah makanan bergizi gratis, perbaikan sekolah, dan hal-hal prioritas Presiden Terpilih," ujarnya.

Berkaitan dengan itu, sebelumnya, dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung

bahasan RAPBN oleh DPR.

Namun, Presiden sudah melangkah lebih jauh dengan reshuffle kabinet. Antara lain masuknya mantan kepala Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas ke kabinet menjadi Menteri Hukum dan HAM pada Senin 19 Agustus 2024.

Selain itu, berlangsung pula konsolidasi koalisi partai politik sesuai Pilpres 2024. Seperti terbentuknya Koalisi Indonesia Maju Plus dan Munas Partai Golkar yang terjadwal mulai 20 Agustus 2024.

Spekulasi boleh saja. Namun, ruang fiskal bagi Presiden baru memang saling terkait dengan hasil pembahasan sayap eksekutif dan legislatif mengenai APBN. •



RAPBN 2025

BAHLIL DI ANTARA 2 PRESIDEN

Bahlil Lahadalia tampak berjaya di kabinet maupun partai. Membantu dua Presiden sekaligus. Fight man...

Bergeser dari posisi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, langkah Bahlil Lahadalia tampak mulus pula menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas XI yang terjadwal pada 20 Agustus 2024. Di balik itu, tugas berat menantangnya.

Pagi mengangkat sumpah saat pelantikannya menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif, malam harinya Bahlil Lahadalia mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Selanjutnya, hari-hari berat menantinya sepanjang dua bulan.

Menteri Bahlil menegaskan akan meneruskan langkah baik yang sudah dilakukan Arifin terutama terkait peningkatan lifting minyak bumi (migas).

"Waktu masa kabinet sekarang tidak lama, maksimal dua bulan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mempertahankan yang sudah baik, yang belum baik tolong sampaikan kepada saya. Memori tugas sudah ada. Saya akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Arifin secara baik dan penuh rasa tanggung jawab," tutur Bahlil usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Sarulla, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Bahlil menegaskan akan melanjutkan langkah-langkah yang sudah dilakukan Arifin dalam melakukan optimalisasi peningkatan lifting sesuai perintah Presiden Republik Indonesia dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Fokus ketiga saya adalah di waktu yang tersisa ini adalah saya akan fokus perintah Bapak Presiden Jokowi dan perintah Bapak Presiden Pak Prabowo, untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arifin terkait dengan optimalisasi peningkatan lifting minyak kita terhadap sumur-sumur idle yang sudah diberikan oleh SKK Migas dan perbaikan tata kelola," tuturnya lagi.

Dalam mengeksekusi kebijakan,



Bahlil pun mempertimbangkan gaya bicara orang Papua keras saat berkoordinasi dengannya. "Saya mohon maaf, saya ini orang Papua, kalau saya agak beda ini kelihatannya. Jadi saya mohon maaf kalau dua bulan ini jangan sampai tersinggung kalau suara saya agak keras. Itu bukan berarti saya marah, tapi memang kita orang Timur itu suaranya keras-keras, tapi hatinya lembut, saya pikir," lanjut Bahlil.

Pada kesempatan yang sama, Arifin mengungkapkan Kementerian ESDM sendiri memiliki peran penting untuk bisa menyediakan energi yang bersih, menjaga ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber alam yang ada. Di tengah pertumbuhan konsumsi migas, Indonesia dihadapkan dengan produksi minyak yang terus mengalami penurunan.

Arifin merinci upaya Kementerian ESDM dalam mengoptimalkan sumber yang ada dan penemuan baru dengan memanfaatkan teknologi. "Kita upayakan perbaikan-perbaikan kebijakan agar daya tarik investasi di sektor hulu Migas ini menjadi memiliki daya saing. Di samping itu perlu dilakukan

langkah-langkah peningkatan efisiensi agar kita bisa mengurangi import dan mengurangi beban subsidi," jelas Arifin menyampaikan terobosan kebijakan sebelumnya.

Saat ini, Indonesia telah memperoleh anugerah berupa ditemukannya sumber-sumber gas yang baru, antara lain Gang North yang diharapkan akan mulai berproduksi mulai tahun 2027-2028. Kemudian percepatan Blok Andaman diupayakan sebelum 2030 bisa berproduksi serta mendorong Blok Masela agar bisa berproduksi pada 1 Januari 2030.

"Untuk itulah kita perlu membangun infrastruktur energi dan inilah menjadi tantangan kementerian ini bagaimana infrastruktur energi bisa kita bangun sehingga kita bisa menjamin keberadaan energi dan sekaligus juga ketahanan energi buat negeri kita. Saat ini kita sedang menyelesaikan beberapa proyek-proyek transmisi antara yang untuk gas tersambung dari ujung Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Kita harapkan 2028 sudah bisa diselesaikan," jelas Arifin.

Di akhir sambutannya, Arifin mengatakan selain memaksimalkan potensi sumber-sumber cadangan minyak

dan gas bumi perlu diupayakan juga membuat potensi-potensi baru untuk peningkatan cadangan mineral-mineral yang masih terdapat di lapangan-lapangan green gate. "Saya beserta jajaran kementerian ESDM telah menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan program strategis di sektor ESDM. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan yang mampu mengakselerasi kesinambungan dalam pengambilan kerajaan Bapak Menteri ESDM (Bahlil)," tutup Arifin.

Jelas sudah, untuk jabatan Menteri ESDM, tugas Bahlil adalah mendongkrak sisi penerimaan pada APBN 2025 dari sektor migas, dan tentu saja mineral (mineral dan batu bara). Bagaimana dengan tugas sebagai Ketua Umum Partai Golkar?

Banyak spekulasi yang beredar bahwa upaya mengegolkan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar lebih kepada kepentingan Presiden Jokowi. Namun, belum banyak yang menelusuri tugas Bahlil di Partai Golkar, jika ia menjadi Ketua Umum, adalah menjamin suara partainya di parlemen (sayap legislatif) akan senantiasa selaras dengan kepentingan pemerintah baru

pada 2025 dan selanjutnya.

Bahlil tampaknya siap pula untuk tugas sebagai Ketua Umum Partai Golkar di sisi legislatif meski mengaku tanpa persiapan khusus menghadapi pemilihan ketua umum di Munas partai beringin itu. "Nggak ada, kita

ini dengan proses," tandasnya.

Berbekal proses tadi, Bahlil pun mendatangi markas Golkar di Jakarta Barat untuk menyerahkan formulir dan berkas persyaratan bakal calon Ketua Umum Golkar, Senin malam, 19 Agustus sekitar pukul 19.55 WIB.



sudah biasa kompetisi kok, fight-fight saja, kompetisi biasa," ujarnya.

Toh Bahlil tak bisa memastikan apakah dirinya sebagai calon tunggal ketua umum Partai Golkar. "Tanya itu ke SC ya saya nggak boleh mengatakan itu saya kan peserta kompetisi, yang mengatur kompetisi bukan saya," katanya.

Menurut dia, rekam jejaknya sudah terbiasa dengan kompetisi, siap menang dan kalah. "Kita kan sudah terbiasa, dari Ketua OSIS sudah fight, dari ketua kelas dulu, ketua HIPMI apa semua jabatan yang alhamdulillah saya jalani

Suasana meriah menyambut Menteri ESDM yang baru dilantik itu. Pintu masuk markas Golkar yang berada di Jalan Anggrek Nelumurni, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, dihiasi dengan spanduk bertuliskan "Selamat Datang Abang Bahlil Lahadalia, Calon Ketua Umum Golkar". Spanduk itu tertempel di dinding lorong menuju markas partai beringin.

Plt Ketua Umum Golkar Agus Gu-miwang Kartasasmita (AGK) hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus sudah menunggunya saat tiba di kantor

DPP Golkar.

Para petinggi Golkar yang juga hadir tampak menyalami Bahlil. "AMPI.. Bahlil.. Bahlil.. Golkar Satu..," teriak para kader yang berkumpul begitu Bahlil tiba.

Setelah itu, Bahlil yang diantar para petinggi Golkar menuju ruang pendaftaran caketum Golkar. Alhasil, Partai Golkar memastikan kadernya yakni Bahlil Lahadalia bakal menjadi calon tunggal dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang akan diselenggarakan pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar.

Ketua Pengarah Munas XI Partai Golkar Adies Kadir mengatakan selama proses pendaftaran, ada dua orang yang mendaftar yakni Ridwan Hisjam dan Bahlil Lahadalia. Namun dari verifikasi berkas yang dilakukan, menurutnya hanya Bahlil yang dinyatakan lolos.

"Berkas pendaftaran bakal calon atas nama Bahlil Lahadalia dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai calon ketua umum pada Munas XI Partai Golkar Tahun 2024," kata Adies di Kantor DPP Partai Golkar.

Dia mengatakan bahwa pendaftaran Ridwan Hisjam dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat. Menurut dari tujuh persyaratan untuk menjadi calon ketua umum, ada dua poin yang tidak terpenuhi oleh Ridwan, salah satunya yakni surat dukungan.

Selanjutnya, menurutnya Bahlil yang dinyatakan lolos akan memaparkan visi dan misinya ketika pelaksanaan Munas di hadapan para perwakilan pengurus Golkar dari daerah. Sejauh ini, menurutnya Bahlil mendapatkan dukungan sebanyak 83 persen dari keseluruhan pemilik suara di Partai Golkar.

Dengan hanya Bahlil sebagai calon tunggal, menurutnya proses pemilihan bisa berlangsung secara aklamasi maupun tidak, karena hal itu bakal tergantung dari para pemilik suara pada Munas XI. "Kita lihat besok pandangan umum dari para pemegang suara, pendapatnya bagaimana, jadi kita tunggu besok," kata dia.

Satu proses lagi untuk Bahlil. Selanjutnya tugas mendongkrak lifting migas dan menjamin dukungan Partai Golkar untuk pemerintah baru menjadi tugas berikutnya. Fight man, fight!!!! •

info indonesia

www.infoindonesia.id

Network

INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

 www.infoindonesia.id

 facebook @infoindonesia.id  twitter : @_infoindonesia

 Instagram @info_indonesia.id  YouTube : infoindonesiatv



inovasi **UNTUK** NEGERI
info indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #46 AGUSTUS 2024



PUADI

ANGGOTA BAWASLU RI

PERJUANGAN GURU JADI PENYELENGGARA PEMILU